



**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

TESIS

*Ditulis sebagai syarat untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2) Program
Studi Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah*

Oleh :

FITRI YENI
NIM. 1702042005

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH KONSENTRASI
AKUNTANSI SYARIAH PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2021M/1442 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing tesis atas nama **Fitri Yeni**, NIM : **1702042005** dengan judul: “**PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**” memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 3 Agustus 2021

Pembimbing I,



Dr. H. Syukri Iska, M.Ag
NIP.19631019 199203 1 004

Pembimbing II,








Dr. Nofrivul, SE, M.M
NIP.19670624 200312 1001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Fitri Yeni, Nim 1702042005, judul : **PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2021

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperti halnya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1	Dr. Farida Arianti, M.Ag NIP. 19780323 200701 2 026	Ketua Sidang	22/8-2021	
2	Dr. H.Syukri Iska, M.Ag NIP.19631019 199203 1 004	Pembimbing I/Penguji III	22-08-2021	
3	Dr.Nofrivul, SE, M.M NIP. 19670624 200312 1 001	Pembimbing II/Penguji IV	22/8'21	
4	Dr. Nurul Fauzi, SE, MM, Ak, CA NIP. 19760720 200112 1 003	Penguji I	21/8 21	
5	Dr. Hendra Yuharmain. H, SH., MM., CRBD.,CRBC NIDN :1018106701	Penguji II	22/8.2021.	

Batusangkar, 23 Agustus 2021

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Batusangkar



Dr. Susanto Haidirani, M.Pd., M.Pd

NIP.19660914 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Yeni
Nim : 1702042005
Program Studi : Ekonomi Syariah konsentrasi
Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul:
**"PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian
hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 4 Agustus 2021

Saya yang menyatakan


Fitri Yeni
NIM. 1702042005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya...(QS. Al-Baqarah :286)

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Q.S Al Insyirah : 6-8)

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. (Nelson Mandela)

Tesis ini kupersembahkan untuk :

Untuk Alm Apak Sawaludin, Ayah dan Amak

Untuk kedua adikku :

Abdul Ghafur dan Mutia Rahmi

Keluarga besar di nagari Simawang dan di Kota

Batusangkar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat dan karuni-Nya kepada penulis sehingga dapat menyusun Tesis ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syariat di akhirat kelak.

Penulisan Tesis ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Selanjutnya dalam penulisan Tesis ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Marjoni Imamora M. Sc selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN Batusangkar)
2. Bapak/Ibuk Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar
3. Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Batusangkar dan Dr. H.Yusuf Salam, S.Ag., MA selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Batusangkar.
4. Dr. Himyar Pasrizal, SE, MM sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan fasilitas dan layanan dalam proses perkuliahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan serta dalam penyelesaian tesis ini.
5. Dr. Nofrivul, SE., M.M selaku Penasehat Akademik (PA) dan Pembimbing II penulis yang telah membantu dan mengarahkan serta memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag selaku Pembimbing I penulis yang telah membimbing, memberikan ide, saran dan motivasi di tengah-tengah kesibukan beliau kepada penulis.

7. Dr. Nurul Fauzi, SE, MM, Ak, CA selaku penguji I dan Dr. Hendra Yuharmain. H, SH., MM., CRBD.,CRBC selaku penguji II penulis dalam sidang *Munaqasyah* yang juga telah memberikan ide dan saran demi kesempurnaan tesis ini.
8. Seluruh dosen dan staf administrasi serta petugas perpustakaan pada program Pascasarjana IAIN Batusangkar, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis
9. Teristimewa untuk Alm. Apak, Amak, Ayah, dan kedua adikkku “Aaat dan Aira” serta keluarga besarku tercinta yang selalu menyayangiku, memberi semangat dan dukungan moral maupun material, serta doa yang selalu menemani dalam setiap langkahku.
10. Muhammad Ridho, SH yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
11. Adik-Adik Kos manis yang telah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan dibalasi Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan sumbangan pikiran dan ide para pembaca berupa kritikan dan saran yang bersifat membangun, demi sempurnanya tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberi bermanfaat bagi kita semua. *Amiin.*

Batusangkar, 4 Agustus 2021

Penulis



Fitri Yeni

NIM. 1702042005

**PEDOMAN
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN**

A. Konsonan

Huruf Arab	Huruf latin	Keterangan	Huruf Arab	Huruf latin	Keterangan
ا		tidak dilambangkan	ض	<u>d</u>	de dengan garis di bawah
ب	b	be	ط	<u>t</u>	te dengan garis di bawah
ت	t	te	ظ	<u>z</u>	zet dengan garis di bawah
ث	ts	te dan es	ع	`	Koma terbalik di atas hadap kanan
ج	j	je	غ	gh	ge dan ha
ح	<u>h</u>	h dengan garis bawah	ف	f	ef
خ	kh	ka dan ha	ق	q	ki
د	d	de	ك	k	ka
ذ	dz	de dan zet	ل	l	el
ر	r	er	م	m	em
ز	z	zet	ن	n	en
س	s	es	و	w	we
ش	sy	es dan ye	ه	h	ha
ص	<u>s</u>	es dengan garis di bawah	ء	'	Apostrof
			ي	ye	ye

B. Vokal Panjang

Tanda vokal Arab	Tanda vokal latin	keterangan
اَ	â	a dengan topi di atas
إِ	î	i dengan topi di atas
أُ	û	u dengan topi di atas

C. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan kosongan ganda, dhammah, dan dalam bahasa Arab dengan (ّ).

D. Kata Sandang

Kata sandang (*al*) ditulis dengan huruf kecil, seperti bacaan *al-mudarris*, kecuali jika terletak pada: 1). Permulaan kalimat, seperti: “*Al-‘Arabiyyah...*”, 2). Awal nama diri, seperti: “*Al-Bayhaqi.....*”, dan 3). Judul buku, seperti: *Al-Kailany*.

E. Ta’ Marbûtah

Setiap *ta marbûtah* ditulis dengan /h/, jika kata tersebut berdiri sendiri, seperti: *al-ma’rifah*. Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûtah* diikuti oleh kata sifat, seperti: *al-jumlah al-muta’addidah* dan *ta marbûtah* pada dua kata yang bacaannya terpisah, seperti: *Nazariyyah al-Wahdah*

F. Daftar Singkatan

DLA : *Durûs al-Lughah al-‘Arabiyyah*

Cet : Cetakan

Ed : *Editor*

h. : Halaman

t.p : Tanpa Penerbit

t.th : Tanpa Tahun

ABSTRAK

FITRI YENI. NIM, 1702042005 Judul Tesis”**Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governnace terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”. Program Pascasarjana Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah. Indikasi terjadinya manajemen laba diukur dengan metode *discretionary accrual* dengan pendekatan *Modified Jones model*. Mekanisme *Good Corporate Governance* yang digunakan yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran komite, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 14 bank. Berdasarkan metode *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 7 bank syariah yang memenuhi kriteria. Data penelitian diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) Bank Umum Syariah selama periode 2012-2020. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan software *SPSS for windows versi 24.00*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel independen : ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Besarnya pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2020 adalah sebesar 8,5% dan sisanya 91,5% dipengaruhi variabel lain di luar model persamaan regresi.

Kata Kunci : Manajemen Laba, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Pengawas Syariah

ABSTRACT

FITRI YENI. NIM, 1702042005 with the title of the thesis “The Effect of Good Corporate Governance Mechanisms on Earnings Management in Islamic Banks in Indonesia”. Graduate Program In Economic Sharia kons. Sharia Accounting Islamic State Collage (IAIN) Batusangkar.

This study aims to determine the effect of the mechanism of Good Corporate Governance on Earnings Management in Islamic Commercial Banks. Indications of earnings management are measured by the discretionary accrual method with the Modified Jones model approach. The Good Corporate Governance mechanism used is the size of the board of commissioners, the proportion of independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, committee size, and the size of the Sharia Supervisory Board (DPS). This study uses a quantitative approach. The population in this study are Islamic Commercial Banks (BUS) registered with the Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as many as 14 banks. Based on purposive sampling method, obtained a sample of 7 Islamic banks that meet the criteria. The research data was obtained from the annual report of Islamic Commercial Banks for the period 2012-2020. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis with SPSS software for windows version 24.00.

The results showed that all independent variables: the size of the board of commissioners, the proportion of independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, the size of the audit committee, and the size of the Sharia Supervisory Board (DPS) had no significant effect on earnings management. The magnitude of the influence of the size of the board of commissioners, the proportion of independent commissioners, institutional ownership, managerial ownership, the size of the audit committee, and the size of the Sharia Supervisory Board (DPS) on earnings management at Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2012-2020 period is 8.5% and the rest 91.5% influenced by other variables outside the regression equation model.

Keywords : Earnings Management, Board of Commissioners Size, Proportion of Independent Commissioners, Institutional Ownership, Managerial Ownership, Audit Committee Size, Sharia Supervisory Board Size

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN TIM PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat dan Luaran Penelitian	12
G. Defenisi Operasional.....	13

BAB II KAJIAN TEORI

A. Manajemen Laba.....	15
1. Pengertian Manajemen Laba.....	15
2. Pola-Pola Manajemen Laba	16
3. Objek Manajemen Laba	17
4. Motivasi Manajemen Laba.....	19
5. Model Manajemen Laba	20

6.	Pandangan Terhadap Manajemen Laba	26
7.	Manajemen Laba dalam Perspektif Islam	27
B.	Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate governance</i>).....	30
1.	Pengertian <i>Corporate Governance</i>	30
2.	Prinsip-Prinsip dalam <i>Good Corporate Governance</i>	30
3.	<i>Good Corporate Governance</i> menurut Perspektif Islam	32
C.	Mekanisme <i>Good Corporate governance</i> dan Manajemen Laba	34
D.	<i>Discretionary Accrual</i>	42
E.	Teori Keagenan (<i>Agency Teory</i>)	43
F.	Penelitian Relevan	44
G.	Kerangka Berfiki.....	47
H.	Hipotesis Penelitian	47
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Jenis Penelitian.....	51
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	51
C.	Populasi dan Sampel	52
D.	Sumber Data.....	54
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	54
F.	Variabel Penelitian dan Pengukuran variabel	55
G.	Teknik Analisis Data.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN		
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	65
B.	Hasil Penelitian	74
C.	Pembahasan.....	114
BAB V PENUTUP		
A.	Kesimpulan	120
B.	Implikasi	120
C.	Saran	121
DAFTAR KEPUSTAKAAN		
LAMPIRAN I.....		130
LAMPIRAN II		138

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia	3
Tabel 3.1	Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia	52
Tabel 3.2	Teknik Pengambilan Sampel	53
Tabel 3.3	Daftar Bank Syariah yang dijadikan sampel	54
Tabel 4.1	Perhitungan Total AkruaI	75
Tabel 4.2	Menentukan Koefisien Regresi	77
Tabel 4.3	Hasil regresi untuk menentukan Koefisien β	80
Tabel 4.4	Perhitungan AkruaI Nondiskresioner	81
Tabel 4.5	Perhitungan AkruaI Diskresioner	84
Tabel 4.6	Discretionary Accrual (DA) Tahun 2012	86
Tabel 4.7	Discretionary Accrual (DA) Tahun 2013	87
Tabel 4.8	Discretionary Accrual (DA) Tahun 2014	88
Tabel 4.9	Discretionary Accrual (DA) Tahun 2015	89
Tabel 4.10	Discretionary Accrual (DA) Tahun 2016	90
Tabel 4.11	Discretionary Accrual (DA) Tahun 2017	91
Tabel 4.12	Discretionary Accrual (DA) Tahun 2018	92
Tabel 4.13	Discretionary Accrual (DA) Tahun 2019	93
Tabel 4.14	Discretionary Accrual (DA) Tahun 2020	94
Tabel 4.15	Statistik Deskriptif	96
Tabel 4.16	Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test	100
Tabel 4.17	Uji Normalitas Setelah Transformasi Data	101
Tabel 4.18	Hasil Uji Multikolinearitas	102
Tabel 4.19	Hasil Uji Durbin Watson	103
Tabel 4.20	Hasil Uji Autokorelasi (Uji Run)	104
Tabel 4.21	Hasil Uji Heteroskedastitas	105
Tabel 4.22	Koefisien Determinan	106

Tabel 4.23 Hasil Regresi.....	107
Tabel 4.24 Hasil Uji F.....	108
Tabel 4.25 Hasil Uji T.....	109

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 Perkembangan Aset Perbankan Syariah.....	4
Grafik 4.1 P Lot Non Probability Plots.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Hasil Output SPSS Versi 24.00
- Lampiran II Data masukan untuk Variable View pada SPSS
- Lampiran III Laporan Keuangan Perusahaan Sampel

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi investor sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan di pasar modal. Informasi akuntansi yang ada di dalam laporan keuangan dibutuhkan oleh investor untuk menilai kinerja suatu perusahaan dan juga untuk mengambil keputusan untuk melakukan investasi (Puspaningtyas, 2012). Salah satu pengukuran yang digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan adalah melalui analisis informasi laba yang ada pada laporan keuangan. Namun informasi laba sering menjadi target tindakan *opportunist* manajemen untuk memaksimumkan kepuasaannya. Tindakan *opportunist* tersebut sering dilakukan dengan cara mengatur laba perusahaan dengan cara menaikkan atau menurunkan laba perusahaan dengan menggunakan kebijakan akuntansi tertentu agar informasi mengenai laba perusahaan sesuai dengan keinginan manajemen. Tindakan *opportunistic* dikenal dengan istilah manajemen laba (Healy, 1999).

Manajemen laba telah menjadi suatu hal yang kontroversial dan menjadi salah satu masalah etika dalam literatur akuntansi (Sun, 2011). Beberapa pihak berpendapat perilaku manajemen laba merupakan perilaku yang tidak dapat diterima karena manajemen laba dapat mengurangi keandalan informasi dalam laporan keuangan, dan akibatnya investor mungkin tidak menerima informasi yang cukup akurat mengenai laba untuk mengevaluasi *return* dan resiko portofolionya. Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan kebijakannya untuk menyesuaikan angka-angka laporan keuangan dengan maksud untuk menyesatkan beberapa pemangku kepentingan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak (Healy, 1999). Manajemen laba dapat dilakukan dengan memainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab komponen

akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan (Sulistyanto, 2012)

Manajemen laba dapat dipahami dalam kerangka sudut pandang hubungan keagenan (*Theory Agency*). Teori agensi adalah teori yang mengatur hubungan antara satu kelompok pemberi kerja (*principals*) dengan penerima tugas (*agent*). Menurut teori ini sebagai agen, manajer secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang saling bertolak belakang di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak (*agent-principal*) berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Rokhlinasari, 2016). Meskipun secara prinsip praktek manajemen laba tidak menyalahi prinsi akuntansi yang diterima umum (PABU). Namun hal ini dapat menurunkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap keandalan laporan keuangan yang dihasilkan.

Praktik manajemen laba dapat terjadi di berbagai perusahaan, baik disektor perdagangan, manufaktur maupun di sektor industri jasa seperti perbankan (Peasnell K. P., 2000). Sebagai bagian dari industri jasa perbankan, Bank Syariah juga terdeteksi melakukan praktik manajemen. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Cahyati (2015), Rokhlinasari (2016), Pujiati (2016), Santoso (2018), Zainudin (2018), Chanifah, dkk (2020) yang dalam penelitiannya menemukan adanya indikasi perbankan syariah melakukan praktek manajemen laba dalam operasionalnya. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pambekti (2017) menunjukkan hasil praktik manajemen laba yang dilakukan Bank Syariah lebih rendah dibandingkan dengan praktik manajemen laba di Bank Konvensional. Sedangkan fenomena yang menunjukkan indikasi terjadinya praktik manajemen laba di bank syariah ditunjukkan dengan

adanya revisi laporan keuangan yang dilakukan oleh Bank Syariah Bukopin pada tahun 2018 untuk laporan keuangan Bank Syariah Bukopin tahun 2016 karena telah terjadinya kesalahan penyajian angka piutang pembiayaan syariah dari Bank Syariah Bukopin terkait penambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) untuk debitur tertentu. Dimana beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas asset keuangan direvisi meningkat dari Rp 649,05 Milyar menjadi Rp 797,65 Milyar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat menjadi Rp 148,6 Milyar dan pendapatannya menurun yang dari sebelumnya Rp 3.59 T menjadi Rp 3.57 T. (<https://finance.detik.com>).

Berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 telah menjadi pelopor berkembangnya perbankan syariah di Indonesia yang selanjutnya diikuti dengan bermunculannya bank-bank syariah lainnya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin pesat pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tercatat hingga Februari 2021 sudah terdaftar 14 Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 1.1

Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah Indonesia

Kelompok Bank	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Feb 2021
Bank Umum Syariah	12	13	13	14	14	14	14
Unit Usaha Syariah	22	21	21	20	20	20	20
Jumlah BPRS	163	166	167	167	164	163	163
TOTAL	197	200	201	201	198	197	197

Sumber : SPS OJK 2021

Perkembangan kuantitas bank syariah tidak terlepas dari inisiatif bank konvensional dalam mengembangkan bisnisnya, hal ini terbukti dengan munculnya bank-bank syariah yang merupakan anak perusahaan dari bank konvensional. Inisiatif ini juga didorong dengan adanya respon positif dari masyarakat terhadap bank syariah, sehingga sampai dengan bulan Februari tahun 2021 tercatat ada 14 Bank Umum Syariah di Indonesia. Perkembangan kuantitas Bank Umum Syariah tidak hanya dari

sisi jumlah banknya saja, tetapi juga pada sisi peningkatan aset yang dicapai oleh Bank Umum Syariah. Sampai dengan bulan Februari 2021 aset Bank Umum Syariah tercatat sebesar Rp. 394.862 Trilyun atau sekitar 67,20% dari total aset perbankan syariah secara keseluruhan yaitu Rp. 587.513 Triliyun. Aset Bank Umum Syariah ini menjadi penyumbang tertinggi dalam peningkatan aktiva Perbankan Syariah bila dibandingkan dengan aset lembaga Syariah lainnya seperti Unit Usaha Syariah. Sampai dengan bulan Februari 2021 aset Unit Usaha Syariah tercatat sebesar Rp. 192.651 Triliyun atau sekitar 32,80% dari total aktiva seluruh perbankan syariah.

Grafik 1.1



Semakin berkembangnya Bank Syariah berimplikasi pada semakin besarnya tantangan yang harus dihadapi Bank Syariah, dimana tantangan terbesarnya adalah untuk mempertahankan citra dan nama baik dimata nasabah agar tetap menjadi perbankan yang dapat dipercaya. Kemudian timbul pertanyaan adapakah adanya unsur syariah menjamin suatu lembaga terbebas dari tindakan manajemen laba ? Meskipun secara teoritis perbankan syariah beroperasi dengan sistem bagi hasil, namun dalam praktiknya terdapat kemungkinan bank syariah melakukan kebijakan manajemen laba.

Dasar utama untuk dapat memahami manajemen laba adalah adanya perspektif hubungan keagenan (*agency theory*). Menurut Lubis (2016) *agency theory* sangat relevan bagi perbankan syariah. Hal ini dikarenakan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemilik perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari sisi kewajiban atau liabilitas perbankan syariah dalam mempertanggungjawabkan dana investor yang dilakukan dalam kontrak atau akad investasi sesuai di dalam perbankan Islam. Apabila dilihat dari sisi harta, asset perbankan syariah syariah dalam melakukan pembiayaan secara bagi hasil harus dapat di monitoring dan dapat memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa proyek yang didanai mendapatkan pengawasan dan pelaporan yang memadai sehingga terhindar dari *moral hazard* dan *mismanagement* seperti melakukan manajemen laba. Salah satu bentuk kebijakan manajemen laba yang dapat dilakukan bank syariah menurut Padmanty (2011) adalah *smoothing of profit and lost sharing deposit returns* yaitu dengan cara memberikan insentif berupa return kepada IAH (*Investment Account Holder*) yang menyamai *market rate* sebagai *benchmark*-nya. Selain itu, kebijakan ini juga sering dilakukan dengan cara manajemen bank membentuk dana cadangan yang diambil dari porsi alokasi IAH dari periode akuntansi terdahulu.

Manajemen laba yang terjadi di industri perbankan lebih beresiko dibandingkan dengan sektor lainnya (Mersni & Othman, 2016). Industri perbankan merupakan industri “kepercayaan”. Jika pihak manajemen melakukan manajemen laba, laporan yang dihasilkan akan bersifat bias, hal ini akan menyebabkan investor melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang dapat menyebabkan bank tidak memiliki kas dan kemungkinan bisa mengalami kebangkrutan. Selanjutnya hal ini juga akan berdampak pada runtuhnya bank lain melalui efek bola salju dan pada akhirnya menyebabkan runtuhnya perekonomian suatu negara. Oleh karenanya, diperlukan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk dapat meminimalkan praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan

perbankan. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah praktik tata kelola yang baik atau *good corporate governance* (Novitasari, 2019)). Penerapan *good corporate governance* (GCG) dalam sebuah perusahaan sangat penting sebagai suatu proses untuk menjaga kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang yang mengutamakan kepentingan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Penerapan GCG yang tepat juga dapat menekan dan mengurangi perilaku manajemen laba (Illahi, 2019).

Secara defenitif *good corporate governace* dapat diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan tersebut dapat menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua pemangku kepentingannya (Sulistyanto, 2012). Secara *mandatory* pelaksanaan *corporate governance* bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia pertama kali diatur dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 Pasal 34 pasal 1, dan diperjelas dalam PBI No. 11/33/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nugraheni (2017), Novitasari dkk (2019), Putra (2019), Arif (2020), praktek *good corporate governance* (GCG) di perbankan syariah dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme diantaranya : dewan komisaris, proporsi dewankomisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Pertama, dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan pilar dari tata kelola perusahaan karena dewan komisaris menjunjung tinggi kepentingan pemegang saham dan perusahaan. Dewan komisaris berperan dalam memastikan laporan keuangan yang diterbitkan sesuai dengan prinsip akuntansi dan dan jugas mencegah kecurangan dalam publikasi laporan keuangan. Grassa (2017) menemukan ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selanjutnya Mersni (2016) mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris yang lebih besar mampu

mencegah praktik manajemen laba. Selanjutnya. Hal berbeda diungkapkan oleh Ramachandran (2015); Putra (2019) ukuran dewan komisaris yang besar akan meningkatkan praktik manajemen laba.

Kedua, dewan komisaris independen (*Board Independend*). Dewan komisaris independen (*Board Independend*) adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independem. Hubungan antara komisaris independen dan manajemen laba juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen sehingga diharapkan dapat menyelaraskan hubungan antara manajemen dan pemegang saham. Penelitian yang dilakukan oleh Kolsi (2017) ; Ermawati (2020) menemukan adanya dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba hal ini berarti keberadaan dewan komisaris juga dapat mencegah terjadinya manajemen laba disebuah perusahaan. Sedangkang hasil yang berbeda ditemukan oleh Putra (2019) yang menyatakan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Ketiga, kepemilikan institusi. Keberadan kepemilikan institusi dalam sebuah perusahaan dapat meningkatkan pengawasan secara optimal terhadap kinerja manajemen. Proporsi kepemilikan saham dalam sebuah perusahaan menunjukkan besarnya hak kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham dalam mengendalikan perusahaan. Kepemilikan saham yang lebih terkonsentrasi kepada institusi menjadikan institusi sebagai pemegang saham mayoritas sehingga institusi memiliki hak kontrol yang tinggi untuk mengendalikan manajemen (Purwantini, 2010). Ashari dan Haryono (2021) dalam penelitiannya menemukan bahwasanya kepemilikan institusi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang

berarti semakin tinggi manajemen laba di pengaruhi oleh rendahnya kepemilikan institusi.

Keempat, kepemilikan manajerial. Konsep kepemilikan manajerial muncul akibat adanya *teory agency*. Dimana dalam mengawasi dan memonitor perilaku manajer, pemegang saham harus bersedia mengeluarkan kos pengawasan yang disebut dengan *agency cost* (Jensen dan Meckling, 1976). *Agency cost* dapat dikurangi dengan melibatkan manajerial dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajemen yang merasa mempunyai bagian di dalam perusahaan akan bekerja secara hati-hati karena mereka juga ikut menanggung konsekuensi atas keputusan yang diambilnya. Selain itu dengan adanya keterlibatan kepemilikan saham, manager akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola perusahaan.

Kelima, Komite Audit. Komite audit merupakan mekanisme terpenting dalam tata kelola perusahaan yang dapat memitigasi terjadinya manajemen laba, karena komite audit bertanggung jawab untuk memastikan akurasi dan reliabilitas laporan keuangan yang disediakan manajemen. Mekanisme komite audit tercemin diantaranya melalui ukuran komite audit dan jumlah rapat komite audit. Menurut Al-Zoubi (2012) ukuran komite audit yang kecil akan menurunkan efektifitas pemantauan dan efisiensi dalam pemenuhan tugas mereka. Sebaliknya semakin besar ukuran komite audit diharapkan pengawasan semakin meningkat, sehingga dapat menurunkan manajemen laba. Hal ini diperkuat oleh Mersni (2016); Putra (2019) yang menyatakan ukuran komite audit adalah tata kelola perusahaan yang efektif untuk membatasi tindakan manajemen laba. Sedangkan Nahar & Erawati (2017) dalam penelitiannya menemukan hal sebaliknya dimana semakin besar jumlah komite audit juga akan meningkatkan manajemen laba.

Keenam, Dewan Pengawas Syariah (DPS). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di perbankan syariah diharapkan juga dapat meminimalisir resiko terjadinya manajemen laba di perbankan syariah.

DPS berperan penting dalam memastikan bank syariah beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip syariah. Selain memiliki pengaruh langsung terhadap aspek kepatuhan syariah DPS juga berperan penting dalam membangun kredibilitas bank syariah di mata masyarakat sebagai representasi dari lembaga keuangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Quttainah (2013) ;Kolsi (2017); Kodriyah (2017) mengungkapkan jumlah Anggota DPS yang besar bisa membatasi praktik manajemen laba. Sedangkan Novitasari (2019) menemukan hasil yang berbeda yaitu ukuran DPS berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang berarti semakin besar ukuran DPS maka semakin tinggi tingkat manajemen laba.

Alasan penelitian ini dilakukan di Bank Umum Syariah karena Bank Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan perbankan lainnya. Selain harus memenuhi kriteria modal minimum (CAR) agar dikatakan sehat, Bank juga harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karenanya konsep manajemen laba tidak dibenarkan dalam Bank Syariah agar bank tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Selain itu alasan peneliti mencoba meliti kembali tentang mekanisme *good corporate governance* karena melihat adanya ketidak konsistenan dari hasil pengaruh variabel mekanisme *good corporate governance* terhadap manajemen laba dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini diberi judul “**PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Terdapat praktik manajemen laba di Bank Umum Syariah di Indonesia

2. Pengaruh manajemen laba terhadap relevansi informasi akuntansi pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
5. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
6. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
7. Pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
8. Pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka batasan masalah dalam penelitian adalah :

1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
5. Pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
6. Pengaruh ukuran DPS terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba Bank Umum Syariah di Indonesia ?
5. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
6. Bagaimana pengaruh ukuran DPS terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?
7. Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, dan ukuran DPS secara bersama-sama terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia

5. Pengaruh ukuran komite audit terhadap praktik manajemen laba pada bank umum syariah di Indonesia
6. Pengaruh ukuran DPS terhadap praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
7. Pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, dan ukuran DPS secara bersama-sama terhadap praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu sebagai berikut :

- a. Bagi Akademisi
 - 1) Salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Pascasarjana IAIN Batusangkar.
 - 2) Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi. Khususnya untuk memahami tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
- b. Bagi peneliti yang akan datang, agar dapat dijadikan acuan terutama yang berkaitan mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba yang terjadi di perbankan
- c. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap praktik manajemen laba di lembaga perbankan

2. Luaran

Penelitian ini juga diharapkan nantinya dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan seminarkan pada forum seminar nasional dan internasional.

G. Defenisi Operasional

Beberapa konsep yang perlu dijelaskan dijelaskan defenisi operasionalnya adalah sebagai berikut :

Corporate governance menurut *Cadbury Committe* dalam KNKG (2006) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Pengukuran *corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan 6 (enam) proksi yaitu :

Pertama, ukuran dewan komisaris. Dewan komisaris adalah organ dalam sebuah perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan jumlah dari keanggotaan dewan komisaris

Kedua, Proporsi komisaris independen. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang mempengaruhinya kemampuannya untuk bertindak independen. (Abidin, 2013). Proporsi komisaris independen dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan persentase jumlah anggota dewan komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris.

Ketiga, Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya).

Keempat, Kepemilikan manajerial merupakan jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh total saham yang beredar.

Kelima, Ukuran komite audit. Komite audit yaitu suatu komite yang dibentuk yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum (KNKG, 2011). Ukuran Komite audit ditunjukkan oleh besarnya jumlah individu yang ada dalam komite audit

Keenam, Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah (Abidin, 2013). Ukuran DPS adalah jumlah dari anggota dalam DPS dalam satu tahun pelaporan.

Manajemen laba menurut Shippper (1989) suatu intervensi yang dilakukan dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Manajemen laba dalam penelitian ini, diproksikan dengan model jones modifikasi (*modified jones model*). Identifikasi terjadinya manajemen laba ditentukan oleh nilai *discretionary accrual* (DA). Nilai DA yang positif (+) mencerminkan adanya tindakan manajemen laba dengan teknik menaikkan laba (*income smooting*). Nilai DA yang negatif (-) menunjukkan adanya tindakan manajemen laba dengan cara menurunkan laba (*incomes decreasing*), dan apabila DA bernilai nol (0) dapat dikatakan perusahaan sampel tidak melakukan manajemen laba (Padmanty, 2011; Lesmana, 2017). Selanjutnya manajemen laba diukur dengan skala nominal yaitu menggunakan variable *dummy*, dimana akan diberi nilai 1 (satu) jika Bank Umum Syariah diindikasikan melakukan manajemen laba dan nilai 0 (nol) jika Bank Umum Syariah diindikasikan tidak melakukan manajemen laba.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Manajemen Laba

1. Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan (*judgment*) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, dan menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi *contractual outcomes* yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy, 1999). Belkai (2011, hal. 74) mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diinginkan.

Menurut Schipper (1989) dalam El Diri (2017) manajemen laba adalah suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi.

“Earnings management means disclosure management in the sense of a purposeful intervention in the external financial reporting process, with the intent of obtaining some private gain as opposed to, say, merely facilitating the neutral operation of the process”

Scott (2015, hal. 445) manajemen laba adalah cara yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi angka laba dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu yang bertujuan untuk memaksimalkan utilitas manajer dan atau nilai pasar dari perusahaan.

“Earnings management is the choice by a manager of accounting policies, or real actions, affecting earnings so as to achieve some specific reported earnings objective”.

Lebih lanjut Scott (2015) menjelaskan dalam memahami manajemen laba, ada dua cara pandang yang dapat digunakan yaitu : *pertama*, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk

memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang, dan *political costs (Opportunistic Earnings Management)*. Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting (Efficient Earnings Management)*, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Meskipun para ahli berbeda dalam mendefinisikan manajemen laba, namun inti dari semuanya adalah sama, yaitu upaya manajemen untuk memanipulasi angka-angka akuntansi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian informasi akuntansi yang diberikan tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya, sehingga dapat menyesatkan pemakai informasi tersebut.

2. Pola-Pola Manajemen Laba

Manajemen laba memiliki pola-pola tertentu dalam praktiknya. Pola manajemen laba menurut Scott (2015) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. *Taking Bath*

Pola ini terjadi karena pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa yang akan datang.

b. *Income Minimization*

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

c. *Income Maximization*

Income Maximization dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *Net Income*

yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

d. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. Dapat disimpulkan bahwa manajemen laba dapat bersifat negatif. Beberapa manajer menyalahgunakan manajemen laba dengan menggunakan manajemen laba secara oportunistik untuk kepentingan mereka sendiri.

3. Objek Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2012) komponen-komponen yang biasa menjadi objek rekayasa laba oleh para manajer yaitu sebagai berikut:

a. Aktiva lancar

Aktiva lancar (*current asset*) merupakan aktiva paling liquid yang dimiliki oleh perusahaan. Ada empat komponen utama yang selama ini dikenal dan dipakai sebagai objek rekayasa oleh manajemen yaitu :

- 1) Kas dan komponen lain yang setara kas (*cash*) yang dicatat sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan.
- 2) Piutang usaha (*account receivable*) yang dicatat pada estimasi jumlah yang mungkin dapat ditagih atau direalisasi
- 3) Pesediaan (*inventory*) yang dicatat pada nilai wajarnya.
- 4) Komponen biaya dibayar dimuka (*prepaid items*) yang dicatat sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan secara tunai.

Upaya rekayasa terhadap komponen kas dapat dilakukan dengan memainkan transaksi-transaksi yang terkait dengan komponen ini baik dengan melanggar maupun tidak melanggar Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). Komponen-komponen aktiva lancar yang direkayasa diklasifikasikan sebagai komponen *discretionary accruals*.

b. Aktiva tetap

Aktiva tetap (*fixed assets*) merupakan harta perusahaan yang memiliki wujud fisik, dipakai dalam operasi normal perusahaan, dimiliki perusahaan lebih dari satu periode akuntansi, dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Upaya yang digunakan untuk mempermainkan laba yang memanfaatkan aktiva tetap adalah dengan cara memanfaatkan metode depresiasi dan mengganti umur ekonomis yang bebas dipilih dan digunakan perusahaan untuk menentukan biaya depresiasi per periodenya.

c. Utang lancar

Utang (*liabilities*) merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan di masa depan dalam bentuk penyerahan barang atau jasa yang disebabkan transaksi atau peristiwa di masa lalu. Semua jenis utang pada dasarnya mempunyai sifat yang sama, yaitu harus diselesaikan perusahaan dengan menggunakan aktiva lancar dalam waktu kurang dari setahun. Sebagian besar utang lancar merupakan utang yang timbul dari transaksi yang berkaitan dengan aktiva lancar. Oleh sebab itu cara dan metode untuk merekayasa aktiva lancar juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan utang lancar. Beberapa upaya rekayasa yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan utang lancar adalah :

- 1) Mengakui dan mencatat transaksi pembelian lebih besar dibandingkan pembelian sesungguhnya.
- 2) Menunda mengakui pendapatan diterima dimuka sebagai pendapatan periodik
- 3) Menunda mengakui biaya yang masih harus dibayar sebagai biaya periodik
- 4) Menunda mengakui utang jangka panjang yang jatuh tempo

4. Motivasi Manajemen Laba

Menurut Scott (2015) motivasi perusahaan dalam melakukan manajemen laba adalah :

a. *Bonus Purpose*

Pemilik perusahaan (*share holders*) biasanya menjanjikan sejumlah bonus kepada manajer apabila kinerja yang dicapainya diatas target target laba yang ditentukan oleh perusahaaa. Namun hal ini telah mendorong manajer bersikap *opportunist* yaitu memaksimalkan keuntungan untuk diri mereka sendiri.

b. *Political Motivation*

Motivasi ini berkaitan dengan dengan adanya ketentuan peraturan yang dibuat oleh pemerintah terhadap aspek legalitas perusahaan. Motivasi membahas bahwasanya manajer cenderung melanggar peraturan pemerintah apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya. Hal ini di biasanya dikaitkan dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah seperti biaya pajak, porsi modal, cadangan kerugian piutang dan sebagainya.

c. *Taxation Motivation*

Motivasi ini dilakukan oleh pihak manajemen dengan menggunakan metode-metode akuntansi tertentu untuk memperkecil angka laba yang dilaporkan. Hal ini dilakukan agar kewajiban pembayaran beban pajak perusahaan tidak terlalu tinggi

d. *Pergantian CEO*

Motivasi ini terjadi ketika jabatan CEO dalam suatu perusahaan akan berakhir. Dalam hal ini, CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung melakukan strategi memaksimalkan prestasinya di akhir penugasan untuk meningkatkan bonus mereka.

e. *Initial Public Offerings* (penawaran saham perdana)

Motivasi ini dilakukan oleh perusahaan yang akan *go public*. Pihak manajemen perusahaan akan melakukan berbagai upaya termasuk

manajemen laba agar harga saham perusahaan naik dan juga menarik investor untuk membeli saham perusahaan tersebut.

f. *Motivasi kontrak hutang jangka panjang*

Kontrak hutang jangka panjang telah mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba karena biasanya dalam kontrak tersebut pihak kreditor telah mensyaratkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu. Agar memenuhi ketentuan tersebut pihak manajemen salah satunya akan berupaya untuk mengusahakan angka laba berada pada level tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh kreditor.

5. Model Manajemen Laba

Pengukuran dalam mendeteksi manajemen laba menurut Sulistiawan (2011) dapat dilakukan dengan cara kualitatif dan kuantitatif. Secara kualitatif, pendeteksian dilakukan dengan menggunakan analisis akuntansi sedangkan secara kuantitatif dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator manajemen laba yang diambil dari beberapa riset empiris. Secara umum ada tiga pendekatan yang digunakan untuk mendeteksi manajemen laba, yaitu :

a. Model berbasis *aggregate accrual*

Model berbasis *aggregate accruals* merupakan model yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas laba rekayasa laba dengan menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Healy, Dechow, dan Sloan. Selanjutnya model yang ditemukan oleh Jones dikembangkan oleh Dechow, Sloan dan Sweeney menjadi model yang dimodifikasi (*modified Jones Models*). Model ini menggunakan total akrual dan model regresi untuk akrual yang diharapkan (*expected accruals*) dan akrual yang tidak diharapkan (*unexpected accruals*).

b. Model berbasis *specific accruals*

Model berbasis *specific accrual* merupakan model yang berbasis akrual khusus (*specific accruals*), yaitu pendekatan yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau komponen laporan keuangan tertentu dari industry tertentu, misalnya piutang tak tertagih dari sector industry tertentu atau cadangan kerugian piutang dari industri asuransi. Model ini dikembangkan oleh McNichols dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beaver dan McNichols.

c. Model berbasis *distributions of earning management*

Model berbasis *distributions of earning management* dikembangkan dengan melakukan pengujian terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi factor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model ini terfokus pada pergerakan laba disekitar benchmark yang dipakai, misalkan laba kuartal sebelumnya, untuk menguji apakah incidence jumlah yang berada di atas maupun di bawah benchmark telah didistribusikan secara merata, atau merefleksikan ketidakberlanjutan kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Model ini dikembangkan oleh Burgtähler dan Dichev, Degerorge, Patel dan Zeckhauser serta Myers dan Skinner.

Dari ketiga model diatas model berbasis *aggregate accrual* lah yang paling banyak digunakan untuk mengukur manajemen laba karena model ini diyakini dapat memberikan hasil yang paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba. Hal ini dikarenakan model ini sejalan dengan akuntansi berbasis akruals (*accrual basis of accounting*) yang selama ini banyak dipergunakan oleh perusahaan. Model akuntansi ini yang membuat munculnya komponen akrual yang mudah untuk dipermainkan besar kecilnya (Sulistyanto, 2012, p. 160). Model ini telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini muncul guna memperbaiki kelemahan-kelemahan dari model sebelumnya dalam hal

melakukan pendeteksian manajemen laba. Perkembangan ini dimulai dari model Healy (1985), model DeAngelo (1986) model Jones (1991), Dechow dan Sloan (1991) model *Modified Jones* oleh Dechow et al (1995) dan model Kothari et al (2005).

Healy (1985) menggunakan *total accrual* sebagai proksi dari *discretionary accrual*. *Discretionary accrual* pada model Healy (1985) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$TA = (\Delta Ca_{it} - \Delta Cl_{it} - \Delta cash_{it} - \Delta STD_{it} - Dep_{it}) / (A_{it-1})$$

Ket :

- TA_{it} : total akrual perusahaan i pada tahun t
- ΔCa_{it} : perubahan dalam aktiva lancar perusahaan i periode ke-t
- ΔCl_{it} : perubahan dalam utang lancar perusahaan i periode ke-t
- $\Delta Cash_{it}$: perubahan dalam kas dan ekuivalen kas perusahaan i periode ke-t
- ΔSTD_{it} : perubahan dalam utang jangka panjang yang termasuk dalam utang lancar perusahaan i periode ke-t
- Dep_{it} : biaya depresiasi dan amortisasi perusahaan i periode ke-t
- A_{it-1} : Total aktiva perusahaan i periode ke-t-1
- i : 1, N perusahaan
- t : 1, T tahun estimasi

DeAngelo (1986) mengasumsikan bahwa tingkat akrual yang *non discretionary* mengikuti pola *random walk*. Dengan demikian tingkat akrual yang *nondiscretionary* perusahaan *i* pada periode *t* diasumsikan sama dengan tingkat akrual yang *non discretionary* pada periode *t-1*. Jadi selisih total akrual antara periode *t* dan *t-1* merupakan tingkat akrual yang *discretionary*. *Discretionary accrual* pada model DeAngelo (1986) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$DA_{it} = (TA_{it} - TA_{it-1}) / A_{it-1}$$

Ket :

DA : *Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t*

TA_{it} : Total AkruaI perusahaan *i* pada tahun *t*

T TA_{it-1}) : Total akruaI perusahaan *i* pada tahun *t-1*

Dechow dan Sloan (1991) menyusun model pengukuran manajemen laba yang dikenal dengan model industry. Model ini serupa dengan model Jones yang menyederhanakan anggapan bahwa akruaI nondiskretioner konstan sepanjang waktu. Model ini mengasumsikan bahwa variasi faktor penentu *non-discretionary accruals* secara umum terjadi di perusahaan-perusahaan pada industry yang sama. AkruaI nondiskretioner pada model industri dapat dihitung dengan :

$$NDA_t = \gamma_1 + \gamma_2 \text{medianI}(TA_t)$$

Dimana:

- medianI (TA_t)= nilai median dari total akruaI yang diukur dengan aset tahun *t-1* untuk semua perusahaan non-sampel dalam kode industry yang sama.

- Parameter spesifik perusahaan γ_1 dan γ_2 diperkirakan menggunakan koefisien regresi pada pengamatan di Periode estimasi.

Model *modified Jones* oleh Dechow et al (1995), model ini merupakan modifikasi dari model Jones (1991). Model ini merupakan modifikasi dari model Jones yang dirancang untuk menghilangkan kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang salah dari model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan. Berikut adalah model yang digunakan oleh *modified Jones* untuk mengestimasi manajemen laba :

1. Menghitung *Total Accrual* (TAC) yaitu laba bersih tahun *t* dikurangi arus kas operasi tahun *t*

$$TAC = NI_{it} - CF_{it}$$

Dimana :

TAC = Total accruals

NI_{it} = Laba bersih (*Net Income*) perusahaan I pada periode t

CF_{it} = arus kas operasi (*cash flow of operation*) perusahaan I pada periode t

Selanjutnya, *total accrual* (TA) diestimasi dengan Ordinary least Square sebagai berikut :

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

Dimana :

2. Dengan koefisien regresi seperti rumus diatas, maka *nondiscretionary accruals* (NDA) ditentukan dengan formula sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rec_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

3. Terakhir, *discretionary accruals* (DA) ditentukan dengan formula sebagai berikut :

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Dimana :

TAC = Total accruals

NI_{it} = Laba bersih (*Net Income*) perusahaan I pada periode t

CF_{it} = arus kas operasi (*cash flow of operation*) perusahaan I pada periode t

TA_{it} = Total Accruals perusahaan *i* dalam periode tahun *t*

A_{it-1} = Total Aset perusahaan *i* dalam periode tahun *t*

ΔRev_{it} = Pendapatan perusahaan *i* pada tahun *t* dikurangi dengan pendapatan perusahaan *i* pada tahun *t-1*

PPE_t = *Property, Plant, and Equipment* perusahaan i pada tahun t

ΔRev_{it} = Piutang Usaha perusahaan perusahaan i pada tahun t dikurangi dengan piutang usaha perusahaan i pada tahun $t-i$

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t

NDA_{it} = *Nondiscretionary Accruals* perusahaan i dalam periode tahun t

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

ε = *error term* (Galat)

Model Kothari (2005), model ini dikemukakan oleh Kothari et al (2005) yang berupaya menyempurnakan Model Jones, dengan menambahkan perubahan *return on Assets* (ROA) dalam perhitungan akrual diskresioner. Model ini beragumen bahwa memasukkan unsur ROA dalam perhitungan akrual diskresioner akan dapat meminimalkan kesalahan spesifikasi, sehingga akan mampu mengukur manajemen laba secara lebih akurat.

Model-model empiris diatas adalah pengidentifikasian manajemen dengan menggunakan nilai *discretionary accruals* sebagai proksi dari manajemen laba. Indikasi terjadinya manajemen laba dilakukan dengan melihat nilai *discretionary accrual* (DA) dari masing-masing perusahaan sampel. Jika nilai DA positif mencerminkan adanya tindakan manajemen laba dengan teknik menaikkan laba (*income smooting*) dan nilai DA yang negatif menunjukkan adanya tindakan manajemen laba dengan cara merunkan laba (*incomes decreasing*), dan apabila nilai DA bernilai nol dapat dikatakan perusahaan sampel tidak melakukan manajemen laba (Padmanty, 2011; Lesmana, 2017)

6. Pandangan Terhadap Manajemen Laba

Ada perbedaan pandangan antara praktisi dan akademisi terhadap manajemen laba. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan sudut pandang antara satu pihak dengan pihak lain dalam melihat aktivitas rekayasa laba.

a. Manajemen laba sebagai kecurangan

Pihak yang memandang manajemen laba sebagai sebagai sebuah kecurangan mempunyai persepsi bahwa manajemen laba mencerminkan perilaku tidak etis seorang manajer untuk menipu pihak lain dengan menggunakan informasi-informasi dalam laporan keuangan. Padahal laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan ekonomi, jika laporan keuangan sudah direkayasa maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemakai laporan keuangan. Oleh sebab, itu bisa disimpulkan bahwa tingkat ketepatan dan kualitas keputusan *stakeholder* sangat dipengaruhi oleh validitas dan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Beberapa pihak berpendapat aktifitas manajemen laba dikatakan sebagai kecurangan apabila perusahaan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- 1) Mencatat penjualan sebelum dapat direalisasi
- 2) Mencatat penjualan fiktif
- 3) Mengundurkan tanggal bukti pembelian
- 4) Mencatat persediaan fiktif

b. Manajemen laba bukan sebagai kecurangan

Pendapat manajemen laba bukanlah sebuah kecurangan datang dari sisi akademisi dan para peneliti. Menurut mereka praktik manajemen laba muncul akibat dari spectrum akuntansi berterima umum yang luas. Prinsip Akuntansi yang menyediakan beragam metode dan prosedur yang bebas dipilih dan dipergunakan oleh suatu perusahaan sesuai dengan keinginannya. Ada lebih dari satu metode

dan prosedur untuk satu komponen tertentu yang bisa dipergunakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Selain itu perusahaan juga diperbolehkan untuk mengganti satu metode dan prosedur akuntansi yang selama ini telah dipergunakan dengan metode dan prosedur akuntansi yang lain, bahkan prinsip akuntansi juga mengizinkan suatu perusahaan untuk menyajikan (*restatement*) laporan keuangan beberapa periode lalu. Artinya laporan keuangan yang pernah disajikan dapat ditarik kembali untuk diganti dengan laporan keuangan yang baru yang menggunakan metode dan prosedur akuntansi berbeda dengan yang dipakai sebelumnya. Menurut pendapat ini aktifitas manajemen laba berada di daerah abu-baru (*grey area*) antara aktifitas yang diizinkan dengan aktifitas kecurangan.

Meskipun demikian sebenarnya ada benang merah dari kedua pendapat tersebut, yaitu adanya kesepakatan bahwa manajemen laba merupakan upaya manajerial untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan. Upaya ini dilakukan sesuai dengan keinginan manajer sehingga pola rekayasa itu bisa menaikkan laba, perataan laba maupun penurunan laba. Hal ini dilakukan dengan memperbesar atau mengecilkan pendapatan dan biaya periode berjalan (Sulistyanto, 2008)

7. Manajemen Laba dalam Perspektif Islam

Islam sebagai sebuah agama yang sempurna, memiliki seperangkat aturan yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis. Islam memiliki aturan dan etika tersendiri yang mengikat para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya. Adanya konsepsi dalam Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungannya serta hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah wa hablum minannas*) telah menjadi landasan filosofi etika bisnis bagi pribadi seorang muslim. Persoalan etika dan bisnis menjadi

suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam ekonomi Islam (Marzuqi, 2010).

Banyak ayat al-Quran dan hadist yang dapat menjadi pedoman dalam melakukan bisnis diantaranya diantaranya Allah swt berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah :188)

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwasanya dalam melaporkan hasil dari laporan keuangan kepada para penggunanya para manajer ataupun akuntan haruslah jujur dan amanah. Allah SWT berfirman :

....فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

“....maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya.” (QS Al-A'raf:85)

Islam juga melarang kepada siapa saja (khususnya dalam hal ini adalah para pelaku bisnis) untuk berbuat curang dan melakukan penipuan yang dapat merugikan orang lain. Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil.” (QS An-Nisa:29)

وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“ Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui (Al-Baqarah : 42)

Dalam manajemen laba, manajer keuangan melakukan modifikasi terhadap pelaporan keuangan agar memperoleh keuntungan. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan menurunkan jumlah laba yang akan dilaporkan padahal perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi dengan maksud untuk memperoleh perhatian secara politis. Hal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29 yang menjelaskan sebuah transaksi bisnis tidak boleh dilakukan dengan jalan yang bathil dan harus ada keridhaan dalam menjalankan transaksi. Dengan demikian manajemen laba tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur ketidakjujuran. Walaupun praktek manajemen laba diatur dalam Prinsip-Prinsip Akuntansi Berterima Umum (Arisandy, 2015).

Dalam sebuah hadist Rasulullah SAW diceritakan bahwasanya Rasulullah berpapasan dengan seorang penjual makanan, lalu beliau bertanya kepada orang tersebut, *“bagaimana caramu menjual makanan ini ?*, dan orang itu pun menjelaskan apa yang ditanyakan Nabi tersebut. Kemudian Allah mewahyukan kepada beliau ; *“Masukkan tanganmu dalam makanan itu”* Nabi lalu memasukkan tangan beliau, dan ternyata makanan yang ada di bagian bawahnya busuk. Maka beliau pun lalu berkata *”Bukanlah termasuk golongan kami, orang yang menipu kami”*. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW. Bertemu dengan seseorang penjual makanan di pasar Madinah yang amat menarik perhatian beliau. Lalu beliau memasukkan tangannya ke bahan makanan yang ada di bagian bawah, dan mengeluarkan sesuatu yang tidak sama dengan yang ada di permukaan. Maka beliau pun memarahi penjual makanan itu, dan berseru : *Ayyuhan al-nas*, tidak dibenarkan menipu kaum muslimin, dan barang siapa yang menipu kami, ia tidak termasuk golongan kami. Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwasanya dilarang mengambil keuntungan dengan cara menipu atau menyamarkan perdagangan dengan

menyembunyikan cacatnya barang dagangan atau mengemasnya dalam bentuk menipu. Dan bila hal ini dikaitkan dengan manajemen laba maka didalamnya terdapat unsur “mengemas” dalam bentuk yang tidak sesuai dengan hakikatnya guna menipu pengguna lain dalam pelaporan keuangan perusahaan. Misalnya pada manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dengan pola *income maximization* pada saat laba mengalami penurunan. Manajer melaporkan laba yang tinggi agar mereka mendapatkan bonus yang lebih besar. Hal ini jelas tidak diperbolehkan syariat dalam Islam (Arisandy, 2015)

B. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate governance*)

1. Pengertian *Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia atau *FCGI* (2000) mendefinisikan *corporate governance* dengan definisi yang sama digunakan oleh *Cadbury Commite*, yaitu :

"seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan."

Disamping itu *FCGI* juga menjelaskan *corporate governance* bertujuan untuk memberikan nilai tambah (*value added*) bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Menurut Sulistyanto (2012) agar tujuan ini berjalan ada dua hal yang perlu ditekankan yaitu pemenuhan hak pemegang saham oleh perusahaan dan juga pelaksanaan kewajiban perusahaan. Pemegang saham berhak memperoleh semua informasi secara akurat dan tepat waktu. Selain itu perusahaan juga berkewajiban untuk mengungkapkan semua informasi mengenai kinerja perusahaan secara akurat, transparan dan tepat waktu.

2. Prinsip-Prinsip dalam *Good Corporate Governance*

Komite Nasional Kebijakan *Governance* atau *KNKG* (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-

prinsip pokok GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah :

a. *Transparansi (Transparency)*

Transparansi dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas perusahaan dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

b. *Akuntabilitas (Accountability)*

Akuntabilitas berarti perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

c. *Responsibilitas (Responsibility)*

Responsibility bermakna perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga kesinambungan usaha dalam jangka panjang menjadi terpelihara dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

d. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan dalam setiap kegiatannya harus senantiasa memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kepada asas kewajaran dan kesetaraan.

3. ***Good Corporate Governance* menurut Perspektif Islam**

Islam adalah agama yang berhubungan dengan semua aspek kehidupan, yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh manusia. Karakteristik dari ekonomi Islam adalah untuk menciptakan keadilan, kejujuran, serta distribusi yang seimbang berdasarkan pada nilai etika dalam Islam. Hukum Islam menyatakan bahwasanya bisnis dalam Islam harus dibangun berdasarkan pada etika dan kewajiban sosial dan juga harus didasarkan pada kerangka moral syariah. Alquran dan hadist secara luas juga menyatakan dan mendukung semua dasar dibalik tata kelola perusahaan dengan menekankan pada pentingnya nilai, etika dan moral untuk kesejahteraan masyarakat (Magalhães, 2013). Secara operasional, penerapan *good governance* berdasar syariah merupakan perwujudan peran manusi dalam mengemban amanah kekhilafahan dan kepemimpinan dalam mengelola sumber daya yang ada di muka bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah saw berikut :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخوري)

Dari Abdillah bin Umar ra bahwasanya Rasullahu saw bersabda: *Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya* (H.R Bukhari).

Kepercayaan umat Islam tentang pertanggungjawaban tindakan mereka di dunia ini dan seterusnya memiliki implikasi yang kuat tentang bagaimana penerapan tata kelola perusahaan terutama di bidang jasa keuangan (Magalhães, 2013). Tantangan utama yang dihadapi oleh

industri keuangan Islam terutama bank syariah adalah bagaimana mengubah produk keuangan konvensional dengan instrumen yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan juga ada kebutuhan untuk mengadaptasi prinsip-prinsip *corporate governance* sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah.

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keharusan bagi institusi, termasuk di dalamnya bank syariah. Hal ini dimaksudkan agar adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar-benar mematuhi ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif. Selain itu hal ini juga menyangkut dengan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah (Maradita, 2014).

Bank syariah bisa menjadi acuan utama dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya industri perbankan syariah dengan beragamnya perbankan yang dihasilkan serta bertambahnya sekmen pasar pelayanan perbankan syariah khususnya di Indonesia. Dalam rangka itulah IFSB (*Islamic Financial Service Board*), sebuah Badan Penetapan Standar Internasional untuk regulasi lembaga keuangan Islam yang berpusat di Kuala Lumpur, pada tahun 2009 menerbitkan standar *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah di semua negara atau yang lebih dikenal dengan istilah *Shariah Governance* (SG). Di Indonesia sendiri pelaksanaan *corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Selanjutnya di perjelas dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11/33/2009 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Konsep tata kelola syariah atau yang biasa disebut dengan *shariah governance* (SG) sangat penting bagi lembaga keuangan syariah

dengan berbagai alasan. Algaoud dan Lewis (2001:100) mengemukakan beberapa alasan sebagai berikut :

- a. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memainkan peran penting dalam struktur tata kelola perbankan syariah membuat bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip syariah (*shariah governance*)
- b. Permasalahan *agency theory* sangat relevan untuk bank syariah karena adanya *asymmetry information* terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Makanya keterwakilan *investment account holders* dalam mekanisme *Good Corporate governance* (GCG) menjadi masalah strategis yang harus pula mendapat perhatian bank syariah;
- c. Dari sudut pandang budaya korporasi, sudah semestinya bank syariah menerapkan nilai-nilai etika bisnis yang Islami dan menjadikannya karakter utama dalam praktik perbankan syariah.
- d. perbankan syariah semestinya melakukan transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter yang inheren dalam praktik bisnis perbankan syariah

Penerapan GCG merupakan suatu kebutuhan bagi setiap bank syariah. Hal ini karena secara yuridis bank syariah bertanggungjawab kepada banyak pihak (*stakeholders*). Pihak yang dimaksud antara lain nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai perseroan, pemasok serta masyarakat dan lingkungan (Maradita, 2014)

C. Mekanisme *Good Corporate governance* dan Manajemen Laba

Maraknya kasus–kasus penyimpangan korporasi diseluruh dunia menjadi faktor yang pemicu berkembangnya konsep *corporate governance*. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan terwujudnya kehidupan bisnis yang sehat, bersih dan bertanggung jawab (Sulistyanto, 2012). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen

laba muncul salah satunya akibat dari adanya konflik antara manajer dan pemilik perusahaan, yang selama ini memisahkan antara kepemilikan dan pengawasan (*agency problem*). Adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik ini telah mendorong manajer untuk menggunakan fleksibilitas dalam standar akuntansi untuk melakukan manajemen laba. Tata kelola perusahaan menyediakan kerangka kerja untuk membatasi perilaku *opportunistic* ini dan melindungi pemilik dengan memastikan kepatuhan dengan sistem akuntansi keuangan dan kepercayaan laporan keuangan (Lassoued, 2018).

Sulistiyanto (2008) mengungkapkan salah satu upaya mewujudkan *good corporate governance* adalah upaya untuk mengurangi manajemen laba dalam dunia usaha. Ada beberapa faktor yang ditenggarai mengapa upaya rekayasa manajerial ini seolah membudaya dalam pengelolaan sebuah perusahaan, pertama, aturan dan standard akuntansi, transparansi dan auditing yang masih lemah. Kedua, system pengawasan dan penegndalian sebuah perusahaan yang belum optimal. Ketiga *moral hazard* pengelola perusahaan yang memang cenderung mendahulukan dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya. Untuk itu salah satu kunci utama untuk mewujudkan bisnis yang bersih, sehat dan bertanggung jawab adalah dengan membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Sistem pengawasan dan pengendalian yang baik akan menjadi penghambat bagi manajer untuk membuat kebijakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan publik. Selanjutnya system pengawasan dan pengendalian yang baik akan mendorong manajer akan melakukan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan aktifitas perusahaan, prinsip *corporate governance* (GCG) dapat dimanifestasikan kedalam suatu mekanisme (Franita, 2018). Mekanisme *good corporate governance* adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (direksi, dewan komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah (*value added*) kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang

dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Diaz (2018) mengungkapkan mekanisme tata kelola perusahaan secara umum dikelompokkan menjadi dua yaitu : faktor internal dan faktor eksternal. Mekanisme internal adalah mekanisme yang dipengaruhi oleh faktor dari dalam perusahaan yang meliputi kepemilikan saham insider, struktur dan karakteristik dewan komisaris, proporsi dewan direksi independen, latar belakang direktur, komite audit, komite remunerasi, dan struktur kepemilikan perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit independen, dan proporsi dewan komisaris independen. Mekanisme eksternal adalah mekanisme yang berasal dari faktor dari luar perusahaan yang bertujuan untuk mengatur perusahaan dalam mendukung kepentingan *stakeholders* seperti peraturan perundang-undangan perlindungan hukum dan aturan pengambilalihan.

Diantara mekanisme *corporate governance* yang sering diteliti penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris ditunjuk dalam Rapat Pemegang Saham (RUPS) Dewan komisaris ini bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direktur dalam sebuah Perseroan Terbatas (PT). Tugas dan wewenang Dewan Komisaris ini diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 108 dijelaskan “ (1) Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan kepengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun memberikan nasehat kepada direksi. (2) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan”.

Dewan komisaris dianggap sebagai pilar tata kelola perusahaan, karena menjunjung tinggi kepentingan pemegang saham dan perusahaan. Dewan komisaris ini berperan dalam memastikan kepatuhan pada prinsip-

prinsip akuntansi dan juga mencegah kecurangan dalam publikasi laporan keuangan. Selain itu juga membatasi praktik manajemen laba yang ada di perusahaan. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwasanya keberadaan dewan komisaris yang efektif di dalam perusahaan, membatasi perilaku diskresi manager dan akibatnya bisa menimbulkan biaya agensi (Mersni & Othman, 2016). Dalam penelitian sebelumnya ditemukan bahwasanya manajer telah terlibat dalam perilaku *opportunistic* untuk memuaskan kepentingan mereka sendiri dari pada kepentingan pemegang saham. Mereka dapat memanipulasi prinsip-prinsip akuntansi untuk mengelola pendapatan dan untuk mencapai tujuan pribadi mereka sendiri. Dengan adanya dewan komisaris yang efektif dapat diperlukan untuk membatasi keleluasaan para pemimpin ini dan mengendalikan tindakan mereka untuk menjaga kredibilitas laporan keuangan dan juga melindungi kepentingan pemegang saham.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) diuraikan dalam pasal 4 bahwa (1) jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. (2) Paling kurang 1 (satu) orang anggota dewan komisaris wajib berdomisili di Indonesia (3) dewan komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama.

Mersni (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwasanya ukuran dewan komisaris yang besar lebih mampu untuk mencegah praktik manajemen laba dari pada ukuran dewan komisaris yang kecil.

2. Proporsi Komisaris Independen

Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas manajemen puncak. Untuk itu agar fungsi pengawasan tersebut berjalan efektif, maka dewan tersebut harus menyertakan komisaris independen untuk meningkatkan fungsi pengawasan (Kolsi, 2017). Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pemegang Saham Pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2011).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governannce* diuraikan dalam Pasal 5 bahwa (1) Dewan komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. (2) Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Marra (2011); Ermawati (2020) menemukan hubungan yang negatif antara al. Temuan ini diperkuat oleh Quttainah (2013) yang menemukan adanya komisaris independen dapat mencegah praktik manajemen laba di bank syariah. Abdelsalam (2016) juga mengungkapkan dewan komisaris independen juga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusi dalam sebuah perusahaan menjadikan pengawasan terhadap perusahaan tersebut lebih optimal lagi. Hal ini dikarenakan pemilik institusional akan melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap manajemen sehingga dapat mengurangi masalah keagenan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemilik institusional terhadap manajer perusahaan menjadikan manajer perusahaan membuat berbagai keputusan tidak berdasarkan kepentingan sendiri, melainkan berdasarkan kepentingan pemegang saham institusional yang sejalan dengan tujuan perusahaan. .Nofrivul dkk, (2017) mengemukakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan yang lebih terkonsentrasi pada satu atau beberapa pihak, akan membuat pengawasan terhadap manajemen berjalan efektif sehingga tindakan pengelolaan dapat diarahkan untuk kepentingan pemegang saham.

Purwantini (2010) mengungkapkan ketika sebuah institusi memiliki sejumlah saham dalam sebuah perusahaan, biasanya institusi akan

memantau perkembangannya secara lebih profesional. Dengan adanya profesionalisme institusi untuk memantau perkembangan investasinya, maka tingkat pengendalian dan pengawasan di perusahaan akan semakin ketat. Dengan ketatnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan akan dapat menekan potensi terjadinya kecurangan oleh pihak manajemen. Hal ini diperkuat oleh penelitian Ayuningtyas (2013); (Ashari, 2021) yang menunjukkan hasil bahwasanya kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Ayem (2019) dalam penelitiannya menemukan hal sebaliknya, kepemilikan institusional dalam penelitian yang dilakukannya justru meningkatkan manajemen laba. Menurut Hal ini kemungkinan disebabkan karena keberadaan kepemilikan institusional belum sepenuhnya sebagai alat monitoring. Manajer hanya termotivasi untuk memuaskan pemilik modal dengan menyajikan laba yang besar tanpa mempertimbangkan tujuan utama organisasi.

4. Kepemilikan Manajerial

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba disebabkan oleh adanya motivasi manajer (Scott, 2015). Motivasi manajemen laba bagi manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham akan berbeda dengan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Kepemilikan saham oleh manajer menentukan kebijakan terhadap metode akuntansi yang diterapkan perusahaan.

Jensen & Meckling (1976) menemukan kepemilikan manajerial bisa menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaskan kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham. Kepentingan manajer dan kepentingan pemegang saham dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya sendiri. Menurut Herawaty (2008) yang menguji kepemilikan manajerial dengan *discretionary accrual* dan kandungan informasi laba menemukan bukti

bahwa kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan manajemen laba.

5. Komite Audit

Keberadaan komite audit merupakan sebuah keharusan bagi bank yang telah mencatatkan sahamnya di bursa dan bank-bank besar, sedangkan untuk bank lain keberadaan komite audit disesuaikan dengan kebutuhan bank tersebut. Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Tugas selanjutnya yaitu memastikan struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, serta memastikan tindak lanjut dari temuan hasil audit yang dilaksanakan oleh manajemen (Sulistiyanto, 2012).

Menurut KNKG (2011) Jumlah komite audit dalam sebuah perusahaan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Anggota komite audit harus diangkat dari anggota Dewan Komisaris yang tidak melaksanakan tugas-tugas eksekutif dan terdiri atas paling sedikit tiga anggota dan mayoritasnya harus independen (KNKG, 2002). Pasal 38 Peraturan Bank Indonesia No 8/4/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* menyatakan anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari : (a) Seorang Komisaris Independen, (b) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan (c) seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit paling kurang 51% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit

Menurut Mersni (2016) yang mengukur mekanisme komite audit dengan jumlah anggota komite audit menemukan komite audit adalah

mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif untuk membatasi perilaku diskresi manajer di bank syariah. Hasil ini juga diperkuat oleh Alzaobi (2012) ukuran komite audit berhubungan negatif dengan manajemen laba. Ukuran komite audit yang kecil akan menurunkan efektifitas pemantauan dan efisiensi dalam pemenuhan tugas mereka. Sebaliknya semakin besar ukuran komite audit diharapkan pengawasan semakin meningkat, sehingga dapat membatasi tindakan manajemen laba.

6. Dewan Pengawas Syariah

Entitas syariah dan perusahaan yang mencatumkan dalam anggaran dasarnya menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS diangkat oleh RUPS atas rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Kedudukan DPS di dalam suatu struktur Bank Syariah atau Lembaga Keuangan Syariah berada sejajar dengan Dewan Komisaris dan berada dibawah Rapat Umum Pengawas Syariah.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 Pasal 26 Ayat 1, jumlah anggota DPS adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang atau paling banyak 50 % dari jumlah direksi. Rahman dan Bukair (2013) keberadaan anggota DPS dapat menciptakan suatu mekanisme pengawasan yang baik untuk meninjau semua transaksi yang terjadi di bank syariah, serta menjamin agar kegiatan operasional bank syariah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah. Ukuran dewan syariah yang lebih besar dianggap akan lebih baik kepada bank syariah hal ini dikarenakan DPS dapat menjadi faktor untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah tersebut. Quttainah (2013) (Suryanto, 2014), menemukan bahwasanya jumlah anggota DPS yang besar bisa mencegah praktik manajemen laba di bank syariah. Hal ini juga diperkuat

oleh Kolsi (2017) menemukan pentingnya keberadaan DPS dalam membatasi praktik manajemen laba di bank syariah.

D. *Discretionary Accrual*

Pada dasarnya ada dua prinsip pencatatan dalam akuntansi yang umum digunakan yaitu *accrual basic* dan *cash basic*. *Accrual basic* merupakan dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan untuk mengakui hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas akan diterima atau dikeluarkan. Basis akrual ini timbul karena akuntansi menggunakan periode waktu sebagai takaran pengukuran laba. Sedangkan *cash basis* hanya mengakui hak dan kewajiban apabila kas benar-benar diterima. Dengan demikian, laba yang diakui dalam satu periode baru akan diakui bila kas telah diterima.

Diantaranya keduanya, prinsip berbasis akrual lah yang digunakan pada prinsip akuntansi berterima umum karena prinsip akuntansi berbasis akrual dipandang lebih baik dalam mencerminkan kinerja perusahaan dalam satu periode. Sedangkan prinsip akuntansi berbasis kas tidak dapat mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Namun akuntansi berbasis akrual ini memiliki kelemahan yaitu sifat *account* akrual yang rawan untuk direkayasa tanpa harus melanggar prinsip akuntansi berterima umum.

Lebih lanjut De Angelo (1986) mengatakan sistem akuntansi akrual memberikan peluang kepada manajemen untuk memanipulasi atau pendapatan akuntansi. Hal ini lah yang dapat memunculkan manajemen laba yang berada didalam koridor tatanan sistem metode akuntansi *accrual basis* dimana pos yang dituliskan dapat sekali di rekayasa, karena tidak perlu ada perpindahan kas namun transaksi telah dicatat didalam laporan keuangan. Akuntansi akrual tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu : *discretionary accruals* dan *non-discretionary accruals*. Konsep *discretionary accruals* memberi pengertian bahwa pihak manajemen dapat memanipulasi pendapatan akrual dan biasanya digunakan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan.

Sedangkan *non-discretionary accrual* ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat dikontrol oleh pihak manajer. Dalam penelitian ini indentifikasi manajemen laba dilakukan dengan menggunakan nilai *discretionary accrual* model Jones Modifikasi.

E. Teori Keagenan (*Agency Teory*)

Bagaimana timbulnya praktik manajemen laba di dalam perusahaan dapat dijelaskan teori keagenan. Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori dasar yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama dalam teori ini mengatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*nexus of contract*" (Herawaty, 2008).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) konsep *agency theory* adalah hubungan antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Dalam teori keagenan, Jensen (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (*principal*) menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Adanya konflik kepentingan dalam hubungan keagenan yang disebabkan oleh prinsipal memiliki akses pada informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku memiliki informasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh. Selain itu adanya perbedaan posisi, fungsi, situasi,

tujuan, kepentingan dan latar belakang antara prinsipal dan agen yang saling bertolak belakang dapat menimbulkan *conflict of interest* atau pertentangan tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara yang satu dengan lainnya. Perbedaan kepentingan dapat menimbulkan asimetri informasi (kesenjangan informasi).

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Prinsipal hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah atau investasi dalam perusahaan. Sedangkan agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut (Zeptian A. , 2013).

Menurut Jensen (1976) permasalahan yang terjadi antara prinsipal dan agen adalah sebagai berikut:

1. *Moral hazard*

Moral hazard timbul ketika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja, atau menyeleweng dari kesepakatan yang telah ditetapkan.

2. *Adverse selection*

Merupakan suatu tindakan dimana prinsipal tidak dapat mengetahui apakah suatu kepentingan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya atau terjadi sebagai sebuah kesalahan tugas.

F. Penelitian Relevan

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang hubungan antara tata kelola perusahaan dan manajemen laba di industri perbankan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hamdi (2014) yang berjudul *Corporate Governance Practice and Earning Management In Islamic Banking Institution*. Penelitian ini membahas tentang karakteristik *corporate governance* dan hubungannya dengan praktik manajemen laba yang terjadi di lembaga perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan 90 bank syariah sebagai sampel dan analisis *multivariate* sebagai alat analisis dengan periode

penelitian dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2009. Hasil penelitiannya mengungkapkan DPS merupakan mekanisme *corporate governance* yang efektif dalam memitigasi tindakan manajemen laba.

Mersni (2016) yang berjudul : *The impact of corporate governance mechanisms on earnings management in Islamic banks in the Middle East region*. Penelitian ini menguji mekanisme tata kelola perusahaan terhadap perilaku manajemen laba di bank syariah yang ada di tujuh negara Timur Tengah untuk periode waktu 2007-2011. Dalam penelitiannya ditemukan bahwasanya keberadaan dewan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Ukuran DPS berpengaruh positif terhadap manajemen laba, selain itu keberadaan ulama yang memiliki pengetahuan akuntansi juga dapat mencegah perilaku manajemen laba. Selain itu komite audit juga dapat mencegah praktik manajemen laba. Lassoed (2018) yang meneliti praktik manajemen laba dan struktur kepemilikan di MENA juga menemukan bahwasanya bank syariah dan konvensional dan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi lebih cenderung untuk melakukan manajemen laba.

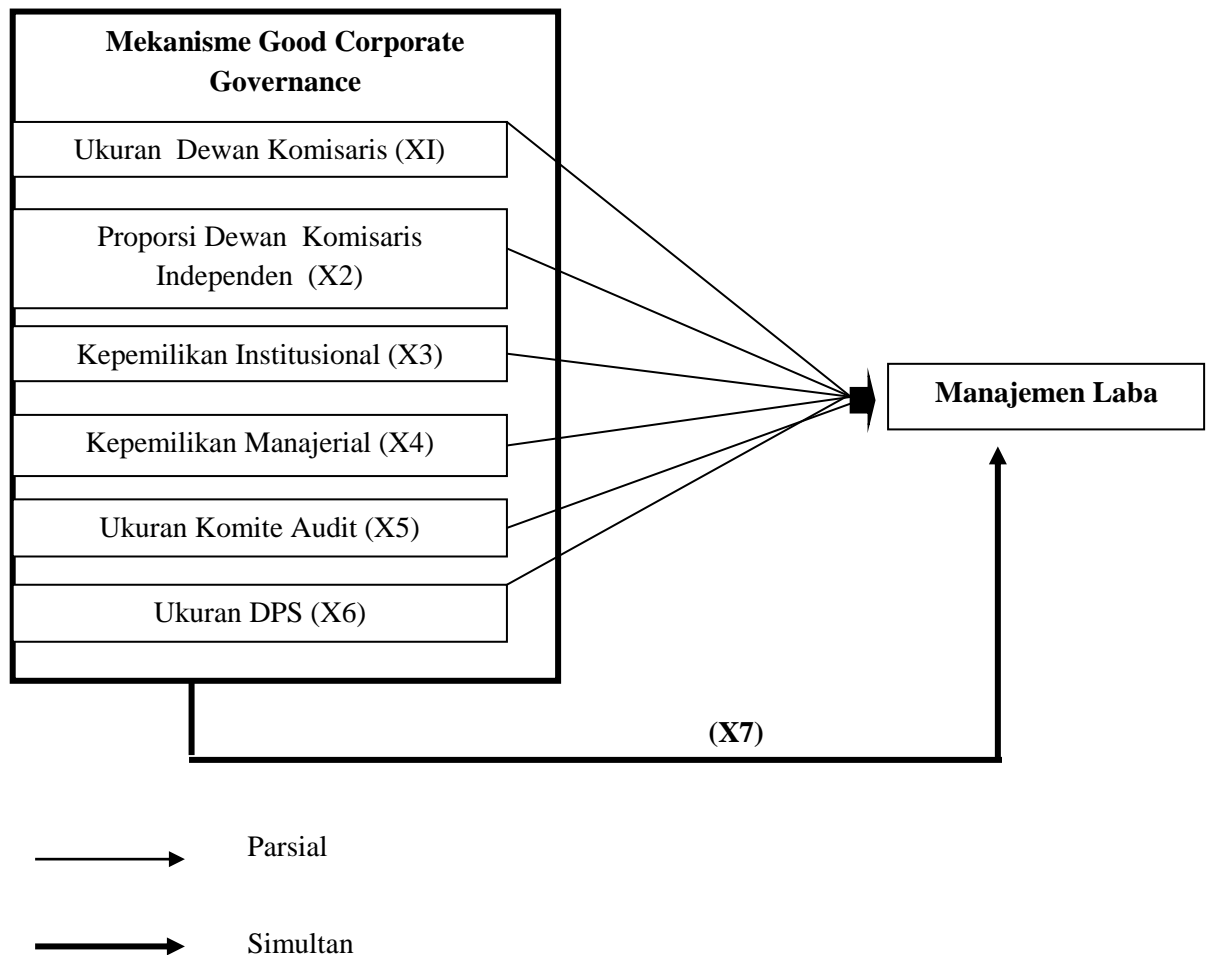
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Hamdi (2014) dan Mersni (2016) adalah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Bank Syariah yang terdapat di Negara Timur Tengah sedangkan populasi dan sampel penelitian ini adalah Bank umum Syariah di Indonesia dengan periode pengamatan Selma 9 (Sembilan) tahun dari tahun 2012-2020.

Di Indonesia, hubungan antara *good corporate governance* (GCG) dan manajemen laba dapat diketahui dari penelitian yang dilakukan oleh Nahar & Erawati (2017) dengan judul penelitian : Pengaruh NPM, FDR, Komite Audit, Pertumbuhan Usaha, Leverage dan Siza terhadap Manajemen Laba. Sampel dalam penelitian ini 6 Bank Umum Syariah dan 12 Unit Usaha Syariah periodisasi penelitian selama tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan NPM, FDR, KA, growth, leverage dan size berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan secara parsial hanya NPM yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan yang lainnya tidak berpengaruh signifikan.

Novitasari (2019) dengan judul penelitian : Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Auditor Terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama 2013-2018. Dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran komite adit, ukuran DPS, dan kualitas auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Arif & Purwanto (2020) dengan judul penelitian : Analisis pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Dengan menjadikan Bank-Bank Islam yang ada di Indonesia dan Malaysia selama periode 2012-2017. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dan *fix effect model*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jumlah rapat DPS, komite audit independen berdampak signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan jumlah anggota DPS dan audit commite tidak berdampak signifikan terhadap manajemen laba.

G. Kerangka Berfiki



H. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitiannya adalah sebagai berikut :

1. Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba

Dewan komisaris dianggap sebagai pilar tata kelola perusahaan, karena menjunjung tinggi kepentingan pemegang saham dan perusahaan. Dewan komisaris ini berperan dalam memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip akuntansi dan juga mencegah kecurangan dalam publikasi laporan

keuangan. Selain itu juga membatasi praktik manajemen laba yang ada di perusahaan. Mersni (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwasanya ukuran dewan komisaris yang besar lebih mampu untuk mencegah praktik manajemen laba dibandingkan dengan ukuran dewan komisaris yang kecil. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah :

H1 : ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba di bank syariah

2. Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Manajemen laba

Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas manajemen puncak. Untuk itu agar fungsi pengawasan tersebut berjalan efektif, maka dewan tersebut harus menyertakan komisaris independen untuk meningkatkan fungsi pengawasan (Kolsi, 2017). Arif (2020) mengungkapkan semakin besar proporsi komisaris independen maka akan dapat menurunkan angka manajemen laba. Abdelsalam (2016) mengungkapkan dewan komisaris independen juga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H2 : Proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba di bank syariah

3. Kepemilikan intitusional dan Manajemen Laba

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh lembaga keuangan non bank yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat. Kepemilikan institusi dalam perusahaan akan berperan sebagai fungsi pengawasan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasional (Mayangsari, 2015. Purwantini (2010) mengungkapkan ketika institusi memiliki memiliki sejumlah saham dalam sebuah perusahaan, biasanya institusi akan memantau perkembangannya secara lebih profesional. Dengan adanya profesionalisme institusi untuk memantau perkembangan investasinya, maka tingkat pengendalian dan pengawasan

di perusahaan akan semakin ketat. Dengan ketatnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan akan dapat menekan potensi terjadinya kecurangan oleh pihak manajemen. Hal ini diperkuat oleh penelitian Ayuningtyas (2013) yang menunjukkan hasil bahwasanya kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H3 : Kepemilikan Institusi berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba di bank syariah

4. Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba

Jensen dan Meckling (1976) menemukan kepemilikan manajerial bisa menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dari manager dengan menyelaskan kepentingan-kepentingan manager dengan pemegang saham. Kepentingan manager dan kepentingan pemegang saham dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manager diperbesar sehingga manager tidak akan memanipulasi laba untuk kepentingannya sendiri. Menurut Watfield (1995) dalam Herawaty (2008) yang menguji kepemilikan manajerial dengan *discretionary accrual* dan kandungan informasi laba menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berhubungan negatif *discretionary accrual*. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H4 : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba

5. Ukuran Komite Audit dan Manajemen Laba

Komite audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU). Menurut Suryanto (2014) ; Kodriyah (2017) dalam penelitiannya menemukan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Mersni (2016) mengatakan komite audit adalah mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif untuk

membatasi perilaku diskresi manajer di bank syariah. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H5 : Ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba

6. Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Manajemen Laba

Quttainah (2013) menemukan bahwasanya jumlah anggota DPS yang besar bisa mencegah praktik manajemen laba di bank syariah. Hal ini juga diperkuat oleh Kolsi (2017) menemukan pentingnya keberadaan DPS dalam membatasi praktik manajemen laba di bank syariah. Sedangkan Arif (2020) menemukan hasil yang berbeda ukuran DPS tidak berpengaruh negatif signifikan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H6 : Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba

7. Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Komite Audit, Rapat Komite Audit, Ukuran DPS, dan Manajemen Laba.

Penulis dalam penelitian ini memilih ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, dan ukuran DPS, sebagai proksi dari *good corporate governance* (GCG) diharapkan memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap manajemen laba. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis ketujuh dari penelitian ini adalah :

H7 : Ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran komite audit, dan ukuran DPS berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat asosiatif (hubungan) yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan variabel melalui pengujian hipotesis yaitu data atau variabel diteliti terlebih dahulu kemudian dijelaskan hubungannya. Berdasarkan jenis data yang digunakan maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif.

Melalui penelitian ini penulis menganalisis tentang pengaruh *good corporate governance* yang diproksikan oleh Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Komite Audit, Ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan periode pengamatan 2012-2020.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan dimulai sejak bulan Juni-Juli Tahun 2021 pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2020. Pengambilan data pada periode waktu tahun 2012-2020 di dimaksudkan juga untuk mengetahui praktik manajemen labadi bank Umum Syariah setelah adanya konvergensi IFRS di Indonesia, dimana Indonesia mengkonvergensi IFRS secara penuh sejak Tahun 2012. Selain itu bergabung nya tiga Bank Umum Syariah yaitu BRI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tanggal 27 Januari 2021 menjadi pemicu penulis membatasi periodesisasi penelitian sampai tahun 2020.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2013). Berdasarkan pengertian tersebut maka populasi penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia periode 2012-2020. Berdasarkan statistik perbankan syariah di Indonesia pada periode 2012-2020 tersebut terdapat 14 Bank Umum Syariah di Indonesia.

Tabel 3.1
Daftar Bank Umum Syariah di Indonesia

No	Nama Bank Syariah
1.	PT. Bank Aceh Syariah
2.	PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3.	PT. Bank Muamalat Indonesia
4.	PT. Bank Victoria Syariah
5.	PT. Bank BRI Syariah
6.	PT. Bank Jabar Banten Syariah
7.	PT. Bank BNI Syariah
8.	PT. Bank Syariah Mandiri
9.	PT. Bank Mega Syariah
10.	PT. Bank Panin Dubai Syariah
11.	PT. Bank Syariah Bukopin
12.	PT. BCA Syariah
13.	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
14.	PT. Maybank Syariah Indonesia

Sumber : data diolah oleh penulis dari SPS Indonesia 2020

2. Sampel

Menurut Sugiono (2013, hal. 82) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode penyampelan bersasaran (*purposive sumpling*) yaitu teknik pengambilan sampel

dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria tertentu dalam melakukan pemilihan sampel. Kriteria tersebut adalah :

1. Bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 2012-2020.
2. Data laporan keuangan tersedia lengkap secara keseluruhan dan di dalamnya terdapat data mekanisme *good corporate governance* yang dibutuhkan selama periode pengamatan 2012-2020.

Tabel 3.2
Teknik Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2012-2020	14
Yang tidak mempublikasikan laporan keuangan periode 2012-2020	(3)
Bank Syariah yang datanya tidak lengkap	(4)
Total bank yang dijadikan sampel	7

Dari 14 Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel terdapat tiga bank syariah yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dalam periode 2012-2020 yaitu : PT. Bank Aceh Syariah, PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Sedangkan bank Umum Syariah yang datanya tidak lengkap ada empat yaitu : PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank Victoria Syariah PT. Maybank Syariah Indonesia dan Bank Panin Dubai Syariah. Berdasarkan hal tersebut maka bank-bank syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Daftar Bank Syariah yang dijadikan sampel

No	Nama Bank Syariah
1.	PT. Bank Muamalat Indonesia
2.	PT. Bank BRI Syariah
3.	PT. Bank BNI Syariah
4.	PT. Bank Syariah Mandiri
5.	PT. Bank Mega Syariah
6.	PT. Bank Syariah Bukopin
7.	PT. BCA Syariah

Sumber : data diolah oleh penulis dari SPS Indonesia 2021

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari media elektronik. Penggunaan data sekunder memberikan jaminan tidak adanya manipulasi data yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan bank umum syariah selama periode 2012-2020 yang dapat diakses langsung melalui situs Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.id) atau *website* resmi bank-bank syariah yang dijadikan sampel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan beberapa data tertulis yang terkait dengan variabel penelitian yang telah tersedia. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.co.id), dan *website* resmi masing-masing perusahaan dan sumber data lainnya yang terkait dengan penelitian.

F. Variabel Penelitian dan Pengukuran variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba. Manajemen laba dalam penelitian ini diproksikan dengan model jones modifikasi (*modified jones model*). Model ini digunakan karena dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba. Model ini memiliki kelebihan yaitu memecah total akrual menjadi empat komponen utama akrual, yaitu *discretionary current accruals*, *discretionary long term accrual*, *nondiscretionary current accruals* dan *nondiscretionary long term accruals* (Sulistyanto, 2012). Indikasi terjadinya manajemen laba (DAC) dapat dilihat melalui nilai *discretionary accruals* yang dihitung dengan cara mengurangkan *total accruals (TAC)* dan *nondiscretionary accrual (NDA)*. Model perhitungannya adalah sebagai berikut :

1. Menghitung *Total Accrual (TAC)* yaitu laba bersih tahun t dikurangi arus kas operasi tahun t

$$TAC = NI_{it} - CF_{it}$$

Dimana :

TAC = *Total accruals*

NI_{it} = Laba bersih (*Net Income*) perusahaan I pada periode t

CF_{it} = arus kas operasi (*cash flow of operation*) perusahaan I pada periode t

Selanjutnya, *total accrual (TA)* diestimasi dengan Ordinary least Square sebagai berikut :

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

2. Dengan koefisien regresi seperti rumus diatas, maka *nondiscretionary accruals (NDA)* ditentukan dengan formula sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rec_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

3. Terakhir, *discretionary accruals (NDA)* ditentukan dengan formula sebagai berikut :

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Dimana :

TAC = Total accruals

NI_{it} = Laba bersih (Net Income) perusahaan I pada periode t

CF_{it} = arus kas operasi (cash flow of operation) perusahaan I pada periode t

TA_{it} = Total Acruals perusahaan *i* dalam periode tahun *t*

A_{it-1} = Total Aset perusahaan *i* dalam periode tahun *t*

ΔRev_{it} = Pendapatan perusahaan *i* pada tahun *t* dikurangi dengan pendapatan perusahaan *i* pada tahun *t-i*

PPE_t = *Property, Plant, and Equipment* perusahaan *i* pada tahun *t*

ΔRev_i = Piutang Usaha perusahaan perusahaan *i* pada tahun *t* dikurangi dengan piutang usaha perusahaan *i* pada tahun *t-i*

DA_{it} = *Discretionary Accruals* perusahaan *i* dalam periode tahun *t*

NDA_{it} = *Nondiscretionary Accruals* perusahaan *i* dalam periode tahun *t*

β₁, β₂, β₃, = Koefisien regresi

ε = *error term* (Galat)

Indikasi terjadinya manajemen laba dilakukan dengan melihat nilai *discretionary accrual* (DA) dari masing-masing bank yang dijadikan sampel dalam penelitian, dimana jika nilai DA positif mencerminkan adanya tindakan manajemen laba dengan teknik menaikkan laba (*income smooting*) dan nilai DA yang negatif menunjukkan adanya tindakan manajemen laba dengan cara merunkan laba (*incomes decreasing*), dan apabila nilai DA bernilai nol dapat dikatakan perusahaan sampel tidak melakukan manajemen laba (Padmanty, 2011; Lesmana, 2017)

Selanjutnya variabel manajemen laba diukur dengan skala nominal yaitu menggunakan variabel *dummy* (variabel yang bersifat kategorikal atau dikotomi) dimana Bank Umum Syariah yang terindikasi melakukan manajemen laba akan diberi nilai 1 (satu) dan 0 (nol) jika Bank Umum Syariah terindikasi tidak melakukan manajemen laba.

2. Variabel Independen

a. Ukuran Dewan Komisaris (X1)

Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menggunakan nilai *absolut*, yaitu jumlah anggota dalam Dewan Komisaris.

$$DK = \text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}$$

b. Proporsi Komisaris Independen (X2)

Indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi dewan komisaris adalah persentase jumlah anggota dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan (*outside directors*) terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris

$$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

c. Kepemilikan institusional (X3)

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan investasi lain. Untuk menghitung kepemilikan institusi diukur dari persentase jumlah saham yang dimiliki investor institusi dari total saham yang beredar.

$$KI = \frac{\text{Jumlah saham Investor institusional}}{\text{Total Saham yang beredar}} \times 100\%$$

d. Kepemilikan manajerial (X4)

Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan ada atau tidaknya sejumlah saham dari keseluruhan yang beredar yang dimiliki pihak manajemen perusahaan (baik eksekutif maupun direktur). Untuk menghitung kepemilikan manajerial diukur dari persentase jumlah saham yang dimiliki oleh direksi dan anggota dewan dari total saham yang beredar.

$$KM = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total Saham yang beredar}} \times 100\%$$

e. Ukuran Komite Audit (X5)

Ukuran komite audit mengacu kepada jumlah anggota komite audit, termasuk didalamnya ketua komite audit. Ukuran Komite Audit diukur secara numeral, yaitu berdasarkan jumlah individu yang berada dalam komite audit

$$U-KA = \text{Jumlah Anggota Komite Audit.}$$

f. Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) (X7)

Ukuran Dewan Komisaris diukur dengan menggunakan nilai *absolut*, yaitu jumlah anggota dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS)

$$U-DPS = \text{Jumlah Anggota Dewan Pengawas Syariah}$$

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Prosedur pengolahan data dalam penelitian ini dimulai dengan memilah data kedalam variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dari hasil operasionalisasi variabel yang akan diuji, nilai variabel tersebut akan diolah dengan menggunakan program *SPSS for Windows Release 24.0*

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi (*standard deviation*), dan maksimum-minimum. Mean digunakan untuk memperkirakan besar rata-rata populasi yang diperkirakan dari sampel. Standar deviasi digunakan untuk menilai dispersi rata-rata dari sampel. Maksimum minimum digunakan untuk melihat nilai minimum dan maksimum dari populasi. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah model regresi benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif. Beberapa langkah untuk menguji model yang akan diteliti antara lain :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen yaitu manajemen laba dan variabel independen yaitu : komposisi dewan komisaris, keberadaan komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan konstitusional atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Ini dimaksudkan agar uji t dan uji F dapat dilakukan, karena pada uji t dan uji F nilai residual harus berdistribusi normal, jika terjadi pelanggaran asumsi ini, maka uji statistik menjadi tidak valid bagi jumlah sampel penelitian yang kecil. Ada dua cara untuk mengetahui residual memiliki distribusi normal yaitu dengan cara analisis grafik normal *P Plot of regression standardized*. Pada uji

grafik, data dikatakan telah memenuhi asumsi normalitas jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya. Selain uji normalitas dengan *P Plot of regression standardized* digunakan juga uji *Kolmogorof Smirnov*. Kriteria dalam Uji *Kolmogorov-Smirnov* untuk menentukan hasil salah satunya dapat melihat nilai signifikan atas *asymptotic significance (2-tailed)*. Apabila nilai *asymptotic significance* yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal ($\text{sig} > 0,05$) dan sebaliknya jika nilai *asymptotic significance (2-tailed)* yang dihasilkan kurang dari 0,05 dapat dikatakan residual tidak berdistribusi normal ($\text{sig} < 0,05$).

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variabel independen (komposisi dewan komisaris, keberadaan komite audi, kepelikan manjerial dan kepemilikan institusional. jika antar variabel dependen terjadi multikolinieritas sempurna, maka koefisien regresi variabel independen tidak dapat ditentukan dan nilai standar eror menjadi tidak terhingga. Jika multikolinieritas antar variabel independen dapat ditentukan, tetapi memiliki nilai *standar error* tinggi berarti nilai koefisien regresi tidak dapat diestimasi dengan tepat.

Dalam uji ini akan diukur tingkat asosiasi (keeratn hubungan) atau pengaruh antar variabel tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Metode yang digunakan dalam uji multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan *inflation favior* (VIF) pada model regresi. Apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas (Priyatno, 2014).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan penganggu

(*residual*) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $(t-1)$ dalam model regresi. Jika terdapat korelasi maka model tersebut mengalami masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan uji statistik *Durbin Watson (DW test)*. Untuk mengambil keputusan ada tidaknya autokorelasi, ada pertimbangan yang harus dipatuhi, antara lain :

- 1) Bila nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan $(4-du)$, maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada korelasi
- 2) Bila nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah (dl) maka koefisien autokorelasi > 0 , berarti ada autokorelasi positif
- 3) Bila nilai DW lebih besar dari $(4-dl)$ maka koefisien autokorelasi < 0 , berarti ada autokorelasi negative
- 4) Bila nilai DW terletak antara (du) dan (dl) atau DW terletak antara $(4-du)$ dan $(4-dl)$, maka hasilnya tidak dapat diketahui .

d. Uji Heteroskedasitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2013). Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedasitas, sementara itu, untuk varians yang berbeda disebut heteroskedasitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedasitas tapi homoskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, penelitian ini menggunakan uji korelasi *Rank Spearman*. Uji *Rank Spearman* dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variable independen dalam menerangkan versi variabel dependen. Menurut Sugiyono (2013), koefisien determinan dapat diperoleh dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (R). Dalam Output SPSS, Koefisien determinasi terletak pada tabel *Summary Model* dan tertulis *R square*. Nilai *R Square* berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Nilai *R square* dinyatakan baik jika berada diatas 0,5. Nilai *R Square* yang kecil menunjukkan lemahnya kemampuan variable independen semakin lemah, sedangkan jika angka *r square* yang mendekati angka satu menunjukkan kemampuan variable independen dalam menjelaskan variabel dependen mendekati sempurna.

b. Regresi Linear Berganda

Untuk mencapai tujuan penelitian digunakan analisis regresi linear berganda. Analisis ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hubungan antara variabel dependen dan independen secara menyeluruh baik secara simultan atau secara parsial. Adapun model regresi linear berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_6 X_6$$

Dimana :

Y = Manajemen Laba

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi Variabel Independen

X1 = Ukuran Dewan Komisaris

X2 = Proporsi Dewan Komisaris Independen

X3 = Kepemilikan Institusional

X4	= Kepemilikan manajerial
X5	= Ukuran Komite Audit
X6	= Ukuran DPS

Sebelum melakukan uji regresi linear berganda, metode mensyaratkan untuk melakukan uji asumsi klasik guna mendapatkan hasil yang terbaik. Dalam penggunaan regresi berganda, pengujian hipotesis harus menghindari adanya kemungkinan penyimpangan asumsi-asumsi klasik. Tujuan pemenuhan asumsi ini dimaksudkan agar variabel independen sebagai estimator atas variabel dependen tidak mengalami bias.

c. Uji Signifikasi Simultan (uji statistik F)

Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013). Melalui uji ini dapat diketahui pengaruh mekanisme *corporate governance* (Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Konsentrasi Kepemilikan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Komite Audit, Rapat Komite Audit, Ukuran DPS dan Kompetensi DPS) secara bersama-sama terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Besarnya pengaruh antara variabel tersebut dapat dilihat dari tabel ANOVA atau F test, yang diperoleh setelah melakukan uji regresi linear berganda.

Apabila $F_{hitung} \leq F_{table}$, maka H_0 dapat diterima dan H_a ditolak (tidak memiliki pengaruh), dan jika $F_{hitung} \geq F_{table}$, maka H_0 ditolak (memiliki pengaruh). Bisa juga menggunakan nilai probabilitas. Apabila nilai *significance* $F < \alpha$ (alpha), maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan jika nilai *significance* $F > \alpha$ (alpha), H_0 diterima dan H_a ditolak.

d. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen yaitu : Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Konsentrasi Kepemilikan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Komite Audit, Rapat Komite Audit, Ukuran DPS dan Kompetensi DPS terhadap variabel dependen manajemen laba. Untuk menginterpretasikan koefisien parameter independen dapat menggunakan *unstandalized coefficient* maupun *standarrized coefficient*. Nilai dari uji t dapat dilihat dari *p-value* (kolom *sign*) pada masing-masing variabel independen. Agar hasil dari variabel independen dapat dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen, *p-value* harus lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan, atau t hitung (pada kolom t) lebih besar dari t tabel (di hitung dari two *tailed* $\alpha = 5\%$ serta *df-k*-) dimana K merupakan jumlah variabel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dengan periode penelitian dari tahun 2012-2020. Berdasarkan statistik perbankan di Indonesia pada periode 2012-2020 tersebut terdapat 14 Bank Umum Syariah di Indonesia. Selanjutnya objek dalam penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang digunakan jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya.

Berdasarkan hal tersebut, jumlah Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel adalah sebanyak 7 (tujuh) Bank Umum Syariah yaitu : PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Syariah Bukopin dan PT. BCA Syariah.

1. PT. Bank Muamalat Indonesia

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk berdiri tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabiul Akhir 1412 H di Jakarta Berdasarkan Akta No. 1 dihadapan Notaris Yudo Paripurno. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk selanjutnya disebut “Bank Muamalat Indonesia” atau BMI berdiri dengan nama PT Bank Muamalat Indonesia. Pendirian Bank Muamalat Indonesia ini atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indoensia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indoesia.

Sejak resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H sebagai bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah pertama di Indonesia. Pada 27 Oktober 1974 Bank

Muamalat mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik pertama yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak memesan terlebih dahulu (HMETD) sebanyak lima kali dan menjadi perusahaan perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Selanjutnya Bank Muamalat terus berinovasi terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance)*. Pada tahun 2004 Bank Muamalat Indonesia meluncurkan produk Bank *Share-e* yang merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Dan pada tahun 2011 produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan Bank Muamalat Indonesia memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM dan cash management.

Seiring kapasitas Bank yang semakin besar dan diakui, Bank Muamalat Indonesia terus memperluas jaringan kantor cabangnya di seluruhnya Indonesia dan juga diluar negeri. Pada tahun 2009, Bank Muamalat menjadi bank pertama mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini BMI memiliki 249 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Selain itu operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 619 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM bersama dan ATM Prima serta 55 unit Mobil kas keliling.

Bank memiliki visi “menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 Bank Terbesar di Indonesia dengan eksistensi

penguasaan yang diakui ditingkat regional”. Untuk mencapai hal tersebut Bank mempunyai misi “membangun Lembaga Keuangan Syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang Islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh kepentingan.

2. PT. Bank BRI Syariah

Sejarah Awal berdirinya PT Bank BRI Syariah dimulai dengan peristiwa akuisisi PT Bank Jasa Arta oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk pada tanggal 19 Desember 2007. PT Bank Brisyarlah secara resmi beroperasi pada tanggal 17 November 2008 setelah sebelumnya mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia melalui surat No.10/67/KEP.GB I/DPG/2008 pada 16 Oktober 2008.

Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Syofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI Syariah.

Melihat potensi pasar pada segmen perbankan syariah Bank Brisyarlah berniat untuk menghadirkan bisnis keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip luhur perbankan syariah dan berkomitmen untuk menghadirkan produk serta layanan terbaik yang menteramkan, untuk pertumbuhan. Untuk semakin memperkuat citranya, pada tahun 2016 BRI Syariah melakukan rebranding logo yang bertujuan untuk menumbuhkan brand equity BRI Syariah semakin kuat. Pada tahun 2017 BRI Syariah menjadi bank syariah pertama yang menyalurkan KUR Syariah sebesar Rp 58,1 Miliar dengan jumlah nasabah sebanyak 2.578 nasabah. Pada tahun 2018

Bank melakukan Initial Publik Offering (IPO) pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia.

Kantor pusat Bank BRI syariah terletak di Jl. Abdul Muis No 2-4 Jakarta Pusat kemudian pada tanggal 31 Desember 2020, Bank memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut : Kantor Cabang sebanyak 17 buah, Kantor Cabang Pembantu 318 buah, Kantor Kas 10 buah, Kantor Layanan Syariah 2.179 buah.

3. PT. Bank BNI Syariah

PT. Bank BNI Syariah, selanjutnya disebut “BNI Syariah” didirikan pada tanggal 29 April 2000 yang ditandai dengan beroperasinya Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BNI. Sesuai dengan *corporate plan* UUS Bank BNI Tahun 2003 ditetapkan bahwasanya status UUS bersifat sementara untuk kemudian dilakukan *spin off*. Terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tanggal 19 Maret 2009 tentang Pemisahan Unit Usaha Syariah dari Bank Konvensional menjadi landasan bagi Bank BNI untuk mempercepat *spin off*.

Pada tanggal 19 Juni 2010 BNI Syariah secara resmi beroperasi setelah sebelumnya mendapat SK Gubernur Bank Indonesia No. 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010, setelah sebelumnya pendirian Perseroan telah ditetapkan berdasarkan Akta No.160 dan telah disahkan melalui SK Menteri Hukum & HAM No. AHU-15574, AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010.

Memiliki visi “ menjadi Bank Syariah Pilihan Masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja” merupakan visi perusahaan sejak awal dan BNI Syariah terus tumbuh menjadi penyedia layanan jasa perbankan syariah yang diperhitungkan di Indonesia. Setiap tahunnya Bank melakukan penambahan outlet atau kantor cabang hingga pada akhir tahun 2020 BNI Syariah telah memiliki 401 outlet dengan komposisi 3 Kantor Wilayah, 68 Kantor Cabang, 241 Kantor

Cabang Pembantu, 13 Kantor Kas, 54 Payment Point dan 23 Bank Layanan Gerak (BLG). Disamping itu terdapat sebanyak 1.722 outlet Layanan Syariah Bank (LSB) yang dapat mengakomodir layanan BNI Syariah di outlet BNI yang tersebar di pulau Jawa, Bali dan Sumatera.

4. PT. Bank Syariah Mandiri

Pertama kali berdirinya PT Bank Syariah Mandiri (selanjutnya disebut dengan “Mandiri Syariah”) bernama PT. Bank Industri Nasional yang disingkat PT. BINA (PT National Industrial Banking Corporation Ltd) berkantor pusat di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1955. Pada tanggal 6 April 1967 terjadi perubahan Anggaran Dasar No. 12 yang membuat nama Bank berubah dari PT. National Industrial Banking Corporation Ltd (PT. BINA) menjadi PT. Bank Maritim Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 1974 nama bank kembali mengalami perubahan menjadi PT Bank Susila Bakti. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2000 nama Bank diubah kembali diubah dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri. Kemudian tanggal 8 September 1999 nama Bank kembali diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya Bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999.

Bank telah mengalami beberap kali perubahan Anggaran Dasar dan perubahan terakhir sehubungan dengan perubahan Pengurus Perseroan yang dilakukan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 06 tanggal 4 Desember 2020, pemegang saham (PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.). Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.03-0415919 tanggal 04 Desember 2020.

Bank memiliki Visi : Bank Syariah terdepan dan Modern (The leading and modern Sharia Bank) Adil, Seimbang dan Maslahat.

Untuk mencapai hal tersebut membangun misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industry yang berkesinambungan
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah
- c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
- d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal
- e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat
- f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Saat ini Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Dan pada tanggal 31 Desember 2020, Bank memiliki 129 kantor cabang, 414 kantor cabang pembantu, 49 kantor kas, 112 payment point dan 43 outlet kantor layanan gadai (tidak diaudit) serta 1.089 ATM yang tersebar diseluruh Indonesia.

5. PT. Bank Mega Syariah

Berdirinya PT. Bank Mega Syariah berawal PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) yang didirikan pada 14 Juli 1990 yang kemudian diakuisisi oleh PT CT Corpora (d/h Para Group) melalui PT Mega Corpora (d/h Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Akuisisi ini juga diikuti dengan perubahan kegiatan usaha pada tanggal 24 Juli 2004 dari yang semula bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah dengan Nama PT. Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) perubahan ini disertai dengan perubahan logo yang bertujuan untuk meningkatkan citra dimasyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan resmi beroperasi pada tanggal 25 Agustus 2004

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, tanggal 30 Juni 2010 tentang Perubahan nama dari Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) menjadi Bank Mega Syariah (BMS) serta peningkatan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-45317.AH.01.02 tahun 2010 tanggal 23 September 2010.

Untuk mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”, PT CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas berkomitmen dan bertanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai Bank Umum Syariah terbaik di Industri perbankan syariah Nasional. Hal ini dibutuhkan dengan cara terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di Industri perbankan Nasional. Hingga saat ini jumlah modal yang disetor bank telah mencapai Rp1,150 Triliun.

Untuk mewujudkan visi “Tumbuh dan Sejahtera Bersama bangsa“, Bank merumuskan beberapa misi sebagai berikut :

- a. Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan
- b. Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang Islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.

Pada tanggal 31 Desember 2020 Bank Mega Syariah memiliki 30 kantor cabang. 31 kantor cabang pembantu 5 kantor kas. Kantor pusat Bank berlokasi di Menara Mega Syariah, Jl. HR. Rasuna Said Kav 19A, Jakarta, dengan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Kediri, Makassar, Bogor, Palembang, Medan, Jambi, Yogyakarta, Solo, Lampung, Purwokerto, Padang, Banten, Pontianak, Malang, Samarinda, Pekanbaru, Cirebon, Balikpapan, Sibolga, Tegal, Palu,

Bali, Banjarmasin, Jember, Banda Aceh, Manado, Bengkulu, Mataram, Pangkal Pinang, Kendari.

6. PT. Bank Syariah Bukopin

Sejarah berdirinya Bank Syariah Bukopin diawali dengan berdirinya PT Bank Swansarindo Internasional pada tahun 1990 di Samarinda, Kalimantan Timur. Dasar hukum pendirian adalah Akta nomor 102 tanggal 29 Juli 1990. Pengoperasian bank dilakukan berdasarkan pada SK Menteri Keuangan nomor 1659/KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 Bank Pasar dan peningkatan status menjadi bank umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional. Bank tersebut kemudian memperoleh izin untuk melakukan kegiatan operasi berdasarkan Surat Bank Indonesia nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan kantor bank.

Periode 2001-2003 organisasi Muhammadiyah melakukan akuisisi terhadap Bank Swansarindo. Kemudian terjadi perubahan nama bank dari Bank Swansarindo menjadi PT Bank Persyarikatan Indonesia melalui Persetujuan dari Bank Indonesia nomor 5/4/KEP.DGS/2003 tanggal 24 Januari 2003 yang dituangkan ke dalam akta nomor 109 Tanggal 31 Januari 2003. Selanjutnya PT Bank Persyarikatan Indonesia diakuisisi oleh PT Bank KB Bukopin Tbk pada tahun 2005 – 2008 yang dilakukan secara bertahap.

Pada tahun 2009 Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank KB Bukopin Tbk digabungkan ke dalam PT Bank Syariah Bukopin setelah sebelumnya disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat No. 11/842/DPbS tanggal 30 Juni 2009. Pengalihan hak dan kewajiban atas penggabungan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2009 dan dituangkan ke dalam akta pemisahan UUS PT Bank KB Bukopin Tbk melalui akta nomor 18 tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, SH. MH.

Bank Syariah Bukopin terus tumbuh dan berkembang serta melengkapi layanannya dengan produk dan layanan perbankan berbasis syariah. Dengan Kantor pusat Bank berlokasi di Jakarta, hingga saat ini Bank beroperasi melalui 1 (satu) kantor pusat operasional, 11 (sebelas) kantor cabang, 7 (tujuh) kantor cabang pembantu, 4 (empat) kantor kas, 97 (sembilan puluh tujuh) kantor layanan syariah, dan 6 (enam) kas keliling

7. PT. BCA Syariah

Awal mula berdirinya bank PT. BCA Syariah tidak terlepas dari hasil konversi dari akuisisi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) yang beroperasi sebagai bank konvensional. Akuisisi tersebut disahkan melalui Akta Akuisisi No. 72 tanggal 12 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Setelah adanya Akta Perubahan Anggaran Dasar pada tanggal 16 Desember 2009, nama PT Bank UIB berubah menjadi PT Bank BCAS. Akta perubahan Anggaran Dasar tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. AH.01.02 tanggal 14 Januari 2010.

Pada tanggal tersebut juga dilakukan penjualan 1 lembar saham ke BCA Finance, sehingga 99,996% kepemilikan saham BCAS dimiliki oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan 0,004% dimiliki oleh PT BCA Finance. Tanggal 5 April 2010 BCAS resmi beroperasi sebagai Bank Syariah setelah sebelumnya memperoleh izin dari Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan BI No. 12/13KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2010

Pada tanggal 10 Desember 2020 BCAS melakukan *merger* dengan PT Bank Interim Indonesia yang dahulu bernama PT Bank Rabobank International Indonesia (“Bank Interim”) . Hingga akhir tahun 2020, BCAS telah melayani 106.356 nasabah pendanaan dan 12.334 nasabah pembiayaan Selain itu saat ini bank memiliki 69

jaringan cabang yang terdiri dari 14 Kantor Cabang (KC), 15 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 40 Unit Layanan Syariah (ULS) yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Kudus, Palembang, Medan dan Banda Aceh. Selain jaringan BCAS, nasabah juga dilayani melalui 50 jaringan LSBU (Layanan Syariah Bank Umum) BCA yang tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

B. Hasil Penelitian

1. Cara Perhitungan Nilai *Discretionary Accrual*

Pengukuran ada atau tidaknya praktik manajemen laba pada laporan keuangan Bank Umum Syariah Periode 2012-2020 dilakukan menggunakan pendekatan *Discretionary Accrual (DA)* Model Jones yang dimodifikasi (Modified Jones) oleh Deshow, Sloan, dan Sweeney (1995). Langkah-langkah perhitungan nilai *discretionary accrual* dengan pendekatan modifikasi Jones adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan data-data yang diperlukan dalam perhitungan *discretionary accrual (DA)*. Data-data yang dibutuhkan adalah data laba bersih, arus kas dari aktifitas operasi, data piutang, asset tetap, dan total asset yang mana data tersebut diperoleh dari laporan keuangan Bank Umum Syariah periode 2012-2020 yang menjadi sampel dalam penelitian ini.
- b. Setelah semua data yang dibutuhkan lengkap, maka selanjutnya adalah mencari nilai total akrual (TA_{it}) dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TAC = NI_{it} - CF_{it} \dots \dots \dots$$

Dengan menggunakan rumus tersebut diperoleh hasil perhitungan seperti berikut ini :

Tabel 4.1 Perhitungan Total Akrua

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	Nama Bank	TAHUN	NI_{it}	CF_{it}	TAC_{it}
1	PT. BCA Syariah	2012	8.360	61.420	-53.060
2		2013	12.701	42.997	-30.296
3		2014	12.950	-403.929	416.879
4		2015	23.437	-94.671	118.108
5		2016	36.816	616.704	-579.888
6		2017	47.860	172.570	-124.710
7		2018	58.367	-129.343	187.710
8		2019	67.194	-760.157	827.351
9		2020	73.106	6.632	66.474
10	PT. Bank Muamalat Indonesia	2012	389.414	-466.290	855.704
11		2013	475.847	-2.597.909	3.073.756
12		2014	57.174	6.167.572	-6.110.398
13		2015	74.492	-2.949.515	3.024.007
14		2016	80.511	-1.467.126	1.547.637
15		2017	26.116	371.971	-345.855
16		2018	46.002	797.328	-751.326
17		2019	16.326	9.670	6.656
18		2020	10.020	1.074.618	-1.064.598
19	PT. Bank Mega Syariah	2012	184.872	426.848	-241.976
20		2013	149.540	-101.098	250.638
21		2014	17.396	-143.558	160.954
22		2015	12.224	-320.572	332.796
23		2016	110.729	-59.286	170.015
24		2017	72.555	857.690	-785.135
25		2018	46.577	-177.626	224.203
26		2019	49.151	-233.631	282.782
27		2020	131.727	8.264.546	-8.132.819
28	PT. Bank BNI Syariah	2012	101.892	-689.607	791.499
29		2013	117.462	503.255	-385.793
30		2014	163.251	601.157	-437.906
31		2015	228.525	375.000	-146.475
32		2016	277.376	233.257	44.119
33		2017	306.686	2.518.837	-2.212.151
34		2018	416.080	2.283.305	-1.867.225
35		2019	603.153	4.822.493	-4.219.340
36		2020	505.106	4.636.980	-4.131.874
37	PT. Bank BRI Syariah	2012	101.888	563.249	-461.361
38		2013	129.564	-373.846	503.410

39		2014	6.577	1.258.902	-1.252.325
40		2015	122.637	2.496.959	-2.374.322
41		2016	170.209	652.133	-481.924
42		2017	101.091	3.993.431	-3.892.340
43		2018	106.600	644.983	-538.383
44		2019	74.016	-200.219	274.235
45		2020	248.054	3.146.554	-2.898.500
46	PT. Bank Syariah Bukopin	2012	17.298	173.826	-156.528
47		2013	19.548	18.325	1.223
48		2014	8.662	-635.737	644.399
49		2015	27.778	-440.267	468.045
50		2016	32.710	-78.443	111.153
51		2017	1.648	570.314	-568.666
52		2018	2.245	-314.225	316.470
53		2019	1.729	637	1.092
54		2020	133	-967.885	968.018
55	PT. Bank Syariah Mandiri	2012	805.691	-1.693.696	2.499.387
56		2013	651.240	4.086.071	-3.434.831
57		2014	71.779	2.194.000	-2.122.221
58		2015	289.576	1.819.355	-1.529.779
59		2016	325.414	1.031.513	-706.099
60		2017	365.166	6.191.608	-5.826.442
61		2018	605.213	4.699.431	-4.094.218
62		2019	1.275.034	8.304.311	-7.029.277
63		2020	1.434.488	8.911.231	-7.476.743

(Sumber : Data Diolah)

- c. Menentukan nilai parameter β_1 , β_2 , dan β_3 menggunakan rumus :

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

Berdasarkan rumus diatas maka data-data yang dimasukkan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 2 Menentukan Koefisien Regresi

NO	Nama Bank	TAHUN	TAC_{it}	$1/A_{it-1}$	$\Delta Rev/A_{it-1}$	PPE/A_{it-1}
1	PT. BCA Syariah	2012	-0,04359554	0,00000082	0,01836008	0,00555913
2		2013	-0,01890922	0,00000062	0,02378071	0,01158296
3		2014	0,20421040	0,00000049	0,03540527	0,00979466
4		2015	0,03944231	0,00000033	0,04355626	0,01335805
5		2016	-0,13332046	0,00000023	0,01569761	0,01166205
6		2017	-0,02496394	0,00000020	0,00959343	0,01628511
7		2018	0,03148876	0,00000017	0,00815091	0,02118391
8		2019	0,11712204	0,00000014	0,01400055	0,02092580
9		2020	0,00769876	0,00000012	0,00518138	0,01721851
10	PT. Bank Muamalat Indonesia	2012	0,02634597	0,00000003	0,02033313	0,01301128
11		2013	0,06852739	0,00000002	0,03059032	0,01935718
12		2014	-0,11373688	0,00000002	0,01639324	0,04275689
13		2015	0,04842891	0,00000002	-0,00425200	0,03834295
14		2016	0,02708471	0,00000002	-0,02009620	0,04616970
15		2017	-0,00619963	0,00000002	-0,00163524	0,04756427
16		2018	-0,01217769	0,00000002	-0,00793618	0,05441575
17		2019	0,00011631	0,00000002	-0,00769736	0,05472689
18		2020	-0,02105800	0,00000002	-0,00688516	0,05904952
19	PT. Bank Mega Syariah	2012	-0,04348440	0,00000018	0,04714428	0,00923740

20		2013	0,03070164	0,00000012	0,02492875	0,00624486	
21		2014	0,01764542	0,00000011	-0,01758819	0,03164596	
22		2015	0,04724137	0,00000014	-0,05536080	0,04812404	
23		2016	0,03057923	0,00000018	-0,02605391	0,05835801	
24		2017	-0,12797132	0,00000016	-0,00351657	0,05183430	
25		2018	0,03187282	0,00000014	-0,00366007	0,04789730	
26		2019	0,03854537	0,00000014	0,01305692	0,04378722	
27		2020	-1,01562788	0,00000012	0,02177398	0,05017711	
28		PT. Bank BNI Syariah	2012	0,09348170	0,00000012	0,01798323	0,01151238
29			2013	-0,03624064	0,00000009	0,03727828	0,00961447
30	2014		-0,02977230	0,00000007	0,04710629	0,00753918	
31	2015		-0,00751458	0,00000005	0,02068196	0,00819608	
32	2016		0,00191675	0,00000004	0,01617592	0,00932262	
33	2017		-0,07812875	0,00000004	0,01368954	0,00814995	
34	2018		-0,05362131	0,00000003	0,01177163	0,00997934	
35	2019		-0,10278903	0,00000002	0,01178432	0,01287205	
36	2020		-0,08267016	0,00000002	0,00023737	0,02337230	
37	PT. Bank BRI Syariah		2012	-0,04118992	0,00000009	0,02609978	0,01098714
38		2013	0,03573093	0,00000007	0,02832795	0,01158095	
39		2014	-0,07196892	0,00000006	0,01833760	0,00873086	
40		2015	-0,11672573	0,00000005	0,01809888	0,00767847	
41		2016	-0,01988936	0,00000004	0,00864411	0,00581158	
42		2017	-0,14058271	0,00000004	0,00658510	0,00642662	
43		2018	-0,01706802	0,00000003	0,00963064	0,00702030	

44		2019	0,00724164	0,00000003	0,00672198	0,00591642
45		2020	-0,06721395	0,00000002	0,02254590	0,01008309
46	PT. Bank Syariah Bukopin	2012	-0,05733570	0,00000037	0,02645981	0,02138917
47		2013	0,00033821	0,00000028	0,02276066	0,02355461
48		2014	0,14837411	0,00000023	0,02172289	0,01860620
49		2015	0,09069731	0,00000019	0,00865592	0,02146180
50		2016	0,01907501	0,00000017	0,01199625	0,02381592
51		2017	-0,08240475	0,00000014	-0,00649800	0,03317152
52		2018	0,04416113	0,00000014	-0,00546701	0,04405926
53		2019	0,00017255	0,00000016	-0,00248908	0,04218934
54		2020	0,14362873	0,00000015	-0,01709402	0,03918217
55		PT. Bank Syariah Mandiri	2012	0,05135169	0,00000002	0,01876894
56	2013		-0,06333891	0,00000002	0,01388653	0,01452849
57	2014		-0,03317766	0,00000002	0,00169951	0,01134058
58	2015		-0,02284764	0,00000001	0,00706173	0,01678932
59	2016		-0,01003413	0,00000001	0,00721734	0,01383085
60	2017		-0,07390987	0,00000001	0,01038639	0,01118210
61	2018		-0,04657018	0,00000001	0,00457395	0,01119979
62	2019		-0,07147852	0,00000001	0,00741254	0,01139990
63	2020		-0,06658312	0,00000001	0,00193006	0,01597233

(Sumber : Data Diolah)

Untuk menentukan nilai β_1 , β_2 , β_3 , maka dilakukan regresi berganda terhadap rumus diatas. Setelah dimasukkan kedalam persamaan regresi yang menjadi variabel dependennya adalah TA_{it}/A_{it-1} . Sedangkan variabel independennya adalah $1/A_{it-1}$ sebagai X1, $\Delta Rev_{it}/A_{it-1}$ sebagai X2, dan PPE_{it}/A_{it-1} sebagai X3.

Tabel 4. 3

Hasil regresi untuk menentukan Koefisien β

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,047	0,047		0,998	0,322
	Ait	142093,933	125311,451	0,146	1,134	0,261
	REV	-2,662	1,377	-0,322	-1,933	0,058
	PPE	-2,713	1,436	-0,308	-1,889	0,064

a. Dependent Variable: TA

Dari hasil regresi diatas, maka diketahui koefisien $\beta_1 = 142093,933$
 $\beta_2 = -2,662$ $\beta_3 = -2,713$

d. Kemudian menghitung nilai NDA dengan menggunakan rumus :

$$NDA_{it} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + \beta_2 \left(\frac{\Delta Rev_{it}}{A_{it-1}} - \frac{\Delta Rec_{it}}{A_{it-1}} \right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon$$

Nilai dari β_1 , β_2 , dan β_3 adalah koefisien regresi yang diperoleh dari hasil perhitungan langkah sebelumnya. Adapun hasil perhitungan dari rumus diatas adalah sebagai berikut

Tabel 4.4
Perhitungan Akruai Nondiskresioner

NO	Nama Bank	TAHUN	NDA_{it}	$\beta_1(1/A_{it-1})$	$\beta_2(\Delta Rev/A_{it-1}) - (\Delta Rec/A_{it-1})$	$\beta_3(PPE/A_{it-1})$
1	PT. BCA Syariah	2012	0,26784981	0,11674824	0,16618349	-0,01508192
2		2013	0,26373102	0,08868782	0,20646778	-0,03142457
3		2014	0,40597999	0,06960547	0,36294743	-0,02657291
4		2015	0,32202641	0,04745245	0,31081435	-0,03624039
5		2016	0,00019696	0,03266843	-0,00083234	-0,03163913
6		2017	-0,00788431	0,02844378	0,00785341	-0,04418151
7		2018	-0,00097069	0,02383657	0,03266470	-0,05747196
8		2019	-0,10979621	0,02011520	-0,07313972	-0,05677169
9		2020	-0,12124855	0,01645677	-0,09099152	-0,04671381
10	PT. Bank Muamalat Indonesia	2012	0,41013055	0,00437488	0,44105528	-0,03529961
11		2013	0,07353288	0,00316789	0,12288102	-0,05251603
12		2014	-0,11682752	0,00264489	-0,00347298	-0,11599943
13		2015	-0,21250192	0,00227561	-0,11075309	-0,10402443
14		2016	-0,09011657	0,00248674	0,03265508	-0,12525839
15		2017	-0,00372911	0,00254711	0,12276564	-0,12904185
16		2018	-0,29908036	0,00230310	-0,15375353	-0,14762992
17		2019	-0,19607149	0,00248298	-0,05008040	-0,14847406
18		2020	-0,20561891	0,00281065	-0,04822823	-0,16020134

19	PT. Bank Mega Syariah	2012	0,78190097	0,02553505	0,78142698	-0,02506106
20		2013	0,41689480	0,01740565	0,41643147	-0,01694232
21		2014	-0,47023538	0,01557778	-0,39995768	-0,08585548
22		2015	-0,40671442	0,02017065	-0,29632457	-0,13056051
23		2016	0,07603918	0,02555729	0,20880718	-0,15832529
24		2017	-0,26575608	0,02316028	-0,14828990	-0,14062647
25		2018	-0,11955947	0,02020015	-0,00981424	-0,12994538
26		2019	-0,08652686	0,01936850	0,01289936	-0,11879472
27		2020	-0,60357684	0,01774472	-0,48519107	-0,13613049
28		PT. Bank BNI Syariah	2012	0,45182203	0,01678231	0,46627280
29	2013		0,69692731	0,01334803	0,70966333	-0,02608405
30	2014		0,46521781	0,00966067	0,47601093	-0,02045378
31	2015		0,19305287	0,00728982	0,20799903	-0,02223598
32	2016		0,12319237	0,00617326	0,14231139	-0,02529227
33	2017		0,07398880	0,00501847	0,09108113	-0,02211080
34	2018		0,06161012	0,00408053	0,08460354	-0,02707395
35	2019		0,00191143	0,00346161	0,03337170	-0,03492188
36	2020		-0,00832819	0,00284300	0,05223786	-0,06340905
37	PT. Bank BRI Syariah		2012	0,31396218	0,01268603	0,33108426
38		2013	0,25825746	0,01008551	0,27959106	-0,03141912
39		2014	0,08963447	0,00816589	0,10515541	-0,02368683
40		2015	-0,07256313	0,00698558	-0,05871702	-0,02083169
41		2016	0,04604541	0,00586432	0,05594790	-0,01576681
42		2017	-0,03415622	0,00513212	-0,02185292	-0,01743542

43		2018	0,03685142	0,00450471	0,05139278	-0,01904607
44		2019	0,09910364	0,00375223	0,11140266	-0,01605125
45		2020	0,50137314	0,00329505	0,52543352	-0,02735542
46	PT. Bank Syariah Bukopin	2012	0,59983912	0,05204854	0,60581938	-0,05802881
47		2013	0,38551381	0,03929471	0,41012274	-0,06390365
48		2014	-0,69021476	0,03271740	-0,67245354	-0,05047861
49		2015	-0,06249824	0,02753483	-0,03180720	-0,05822587
50		2016	-0,06044649	0,02438480	-0,02021870	-0,06461259
51		2017	-0,28000941	0,02059067	-0,21060574	-0,08999434
52		2018	-0,14763447	0,01982819	-0,04792988	-0,11953278
53		2019	-0,07430424	0,02245321	0,01770223	-0,11445968
54		2020	-0,19497053	0,02108305	-0,10975236	-0,10630122
55		PT. Bank Syariah Mandiri	2012	0,32667313	0,00291942	0,36520225
56	2013		0,19156105	0,00262024	0,22835659	-0,03941578
57	2014		-0,02091205	0,00222142	0,00763351	-0,03076698
58	2015		-0,03084956	0,00212221	0,01257765	-0,04554942
59	2016		-0,05658568	0,00201925	-0,02108183	-0,03752310
60	2017		-0,05780519	0,00180250	-0,02927066	-0,03033703
61	2018		0,02773005	0,00161626	0,05649882	-0,03038504
62	2019		0,00750661	0,00144491	0,03698963	-0,03092793
63	2020		0,07085720	0,00126540	0,11292474	-0,04333294

(Sumber. Data Diolah)

e. Lalu menghitung nilai DA dengan menggunakan rumus :

$$DA_{it} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - NDA_{it}$$

Tabel 4.5.

Perhitungan AkruaI Diskresioner

NO	PERUSAHAAN	TAHUN	TA_{it}/A_{it-1}	NDA_{it}	DA_{it}
1	PT. BCA Syariah	2012	0,05279178	0,26784981	-0,21505802
2		2013	-0,00604100	0,26373102	-0,26977203
3		2014	-0,05121627	0,40597999	-0,45719627
4		2015	-0,10473471	0,32202641	-0,42676112
5		2016	-0,04075773	0,00019696	-0,04095469
6		2017	-0,04127544	-0,00788431	-0,03339113
7		2018	-0,05533312	-0,00097069	-0,05436243
8		2019	-0,07392595	-0,10979621	0,03587026
9		2020	-0,04404987	-0,12124855	0,07719867
10	PT. Bank Muamalat Indonesia	2012	-0,08505152	0,41013055	-0,49518207
11		2013	-0,13077958	0,07353288	-0,20431246
12		2014	-0,15699334	-0,11682752	-0,04016582
13		2015	-0,09043001	-0,21250192	0,12207191
14		2016	-0,06927558	-0,09011657	0,02084099
15		2017	-0,12214174	-0,00372911	-0,11841263
16		2018	-0,12420071	-0,29908036	0,17487965
17		2019	-0,12550071	-0,19607149	0,07057078
18		2020	-0,13906238	-0,20561891	0,06655653
19	PT. Bank Mega Syariah	2012	-0,12502409	0,78190097	-0,90692506
20		2013	-0,06589699	0,41689480	-0,48279179
21		2014	-0,02345794	-0,47023538	0,44677744
22		2015	0,03698058	-0,40671442	0,44369501
23		2016	-0,06341250	0,07603918	-0,13945169
24		2017	-0,10810508	-0,26575608	0,15765100
25		2018	-0,10000214	-0,11955947	0,01955733
26		2019	-0,13418373	-0,08652686	-0,04765687
27		2020	-0,17634811	-0,60357684	0,42722873

28	PT. Bank BNI Syariah	2012	-0,06232213	0,45182203	-0,51414416
29		2013	-0,11197081	0,69692731	-0,80889812
30		2014	-0,13619005	0,46521781	-0,60140787
31		2015	-0,07000153	0,19305287	-0,26305440
32		2016	-0,06217932	0,12319237	-0,18537170
33		2017	-0,05353388	0,07398880	-0,12752268
34		2018	-0,05432951	0,06161012	-0,11593963
35		2019	-0,06283012	0,00191143	-0,06474155
36		2020	-0,06119793	-0,00832819	-0,05286975
37		PT. Bank BRI Syariah	2012	-0,08659969	0,31396218
38	2013		-0,09674260	0,25825746	-0,35500006
39	2014		-0,06433563	0,08963447	-0,15397010
40	2015		-0,06202534	-0,07256313	0,01053779
41	2016		-0,03291312	0,04604541	-0,07895853
42	2017		-0,02983284	-0,03415622	0,00432338
43	2018		-0,04017812	0,03685142	-0,07702954
44	2019		-0,03019294	0,09910364	-0,12929658
45	2020		-0,08407757	0,50137314	-0,58545071
46	PT. Bank Syariah Bukopin	2012	-0,07641628	0,59983912	-0,67625540
47		2013	-0,08519781	0,38551381	-0,47071161
48		2014	-0,07558754	-0,69021476	0,61462722
49		2015	-0,05373309	-0,06249824	0,00876515
50		2016	-0,07216182	-0,06044649	-0,01171532
51		2017	-0,05210599	-0,28000941	0,22790342
52		2018	-0,08515140	-0,14763447	0,06248306
53		2019	-0,08538054	-0,07430424	-0,01107630
54		2020	-0,03971388	-0,19497053	0,15525665
55	PT. Bank Syariah Mandiri	2012	-0,08849204	0,32667313	-0,41516517
56		2013	-0,07376148	0,19156105	-0,26532253
57		2014	-0,03306967	-0,02091205	-0,01215761
58		2015	-0,06222554	-0,03084956	-0,03137598
59		2016	-0,05471641	-0,05658568	0,00186927
60		2017	-0,05618310	-0,05780519	0,00162209
61		2018	-0,04094463	0,02773005	-0,06867468
62		2019	-0,04921519	0,00750661	-0,05672180
63		2020	-0,04720536	0,07085720	-0,11806256

(Sumber. Data Diolah)

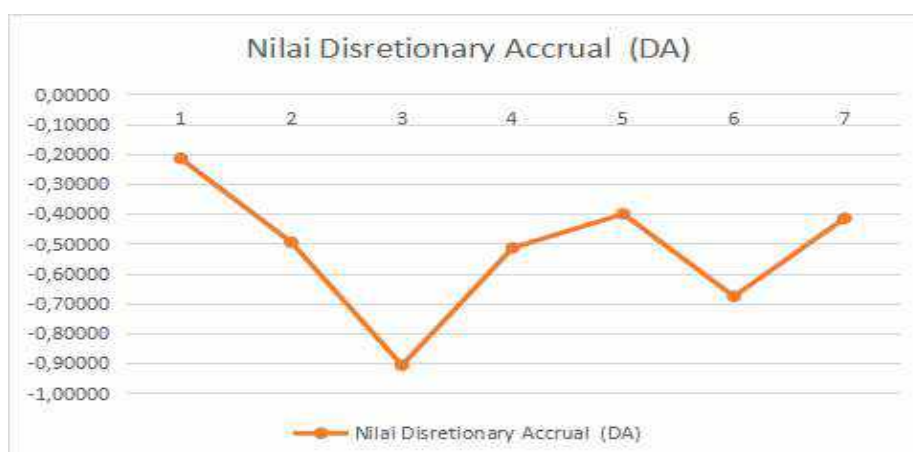
Nilai DA Bank Umum Syariah Pada tahun 2012

Tabel 4.6

Discretionary Accrual (DA) Tahun 2012

Nama Bank	Nilai <i>Discretionary Accrual</i> (DA)
PT. Bank BCA Syariah	-0,21506
PT. Bank Muamalat Indonesia	-0,49518
PT. Bank Mega Syariah	-0,90693
PT. Bank BNI Syariah	-0,51414
PT. Bank BRI Syariah	-0,40056
PT Bank Syariah Bukopin	-0,67626
PT. Bank Syariah Mandiri	-0,41517

(Sumber : Data diolah)



Keterangan :

1. PT Bank BCA Syariah
2. PT Bank Muamalat Indonesia
3. PT. Bank Mega Syariah
4. PT Bank BNI Syariah
5. PT Bank BRI Syariah
6. PT Bank Syariah Mandiri
7. PT Bank Syariah Bukopin

Tabel 4.7 diatas menunjukkan nilai *Discretionary Accrual* 7 (tujuh) bank syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini selama tahun 2012 bernilai negatif. Hal ini berarti bank syariah melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba.

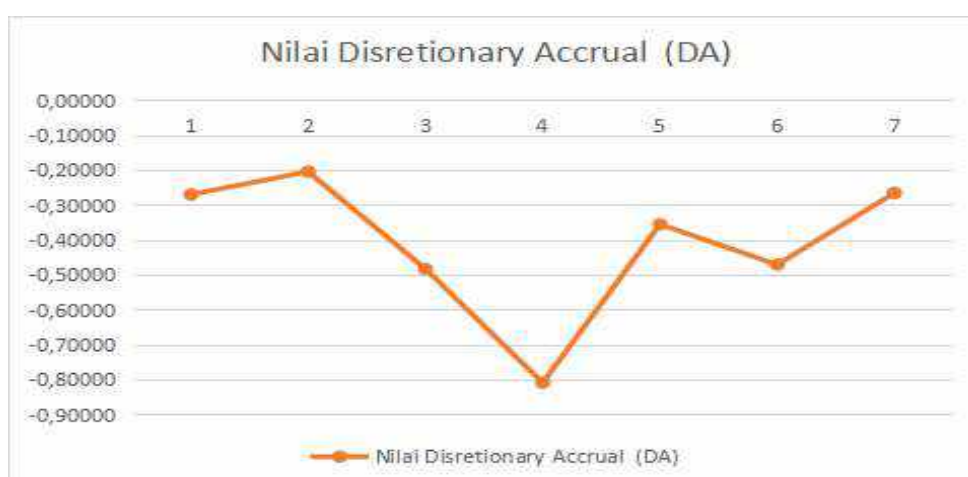
Dari grafik 4.1 dapat dilihat nilai DA di tahun 2012 dengan nilai minimum adalah -0,90693 yang merupakan nilai DA dari PT Bank Mega Syariah sedangkan nilai maksimum adalah sebesar -0,21506 yang merupakan nilai DA PT Bank BCA Syariah.

Nilai DA Bank Umum Syariah Pada Tahun 2013

Tabel 4.7
Discretionary Accrual (DA) Tahun 2013

Nama Bank	Nilai <i>Discretionary Accrual</i> (DA)
PT. Bank BCA Syariah	-0,26977
PT. Bank Muamalat Indonesia	-0,20431
PT. Bank Mega Syariah	-0,48279
PT. Bank BNI Syariah	-0,80890
PT. Bank BRI Syariah	-0,35500
PT Bank Syariah Bukopin	-0,47071
PT. Bank Syariah Mandiri	-0,26532

(Sumber : Data diolah)



Tabel 4.7 diatas menunjukkan nilai *Discretionary Accrual* 7 (tujuh) bank syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini selama

tahun 2013 bernilai negatif. Hal ini berarti bank syariah melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba.

Dari grafik 4.2 dapat dilihat nilai DA di tahun 2013 dengan nilai minimum adalah -0,80890 yang merupakan nilai DA dari PT Bank BNI Syariah sedangkan nilai maksimum adalah sebesar -0,20431 yang merupakan nilai DA PT Bank Muamalat Indonesia.

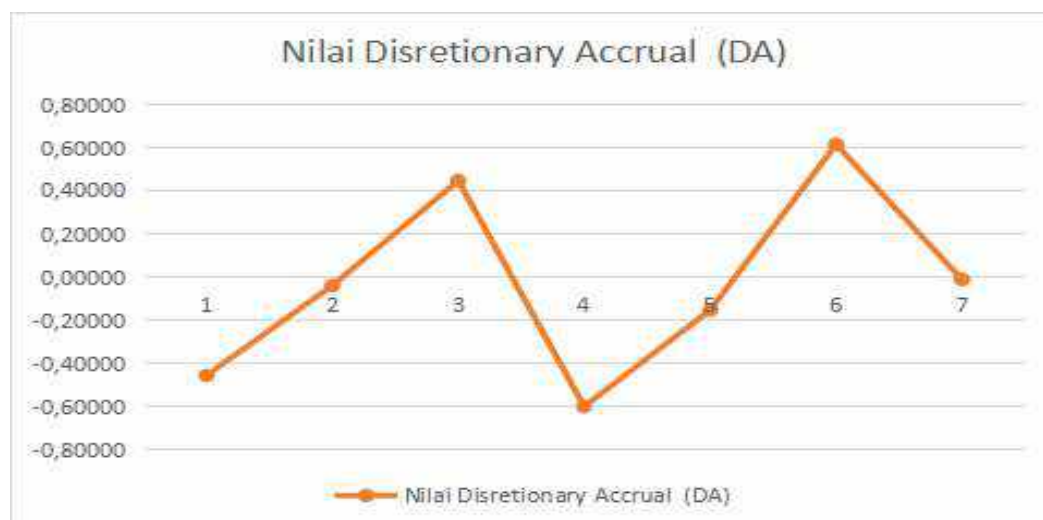
Nilai DA Bank Umum Syariah Pada Tahun 2014

Tabel 4.8

Discretionary Accrual (DA) Tahun 2014

Nama Bank	Nilai <i>Discretionary Accrual</i> (DA)
PT. Bank BCA Syariah	-0,45720
PT. Bank Muamalat Indonesia	-0,04017
PT. Bank Mega Syariah	0,44678
PT. Bank BNI Syariah	-0,60141
PT. Bank BRI Syariah	-0,15397
PT Bank Syariah Bukopin	0,61463
PT. Bank Syariah Mandiri	-0,01216

(Sumber : Data diolah)



Tabel 4.8 menunjukkan pada tahun 2014 nilai *Discretionary Accrual* dari 7 (tujuh) bank syariah yang dijadikan sampel, dua diantaranya bernilai positif dan lima lainnya bernilai negatif. DA yang bernilai positif berarti bank syariah tersebut melakukan manajemen laba

dengan pola menaikkan laba. Dan DA yang bernilai negatif berarti Bank Syariah tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba.

Dari grafik 4.3 dapat dilihat nilai DA di tahun 2014 dengan nilai minimum adalah -0,60141 yang merupakan nilai DA dari PT Bank BNI Syariah sedangkan nilai maksimum adalah sebesar 0,61463 yang merupakan nilai DA PT Bank Syariah Bukopin

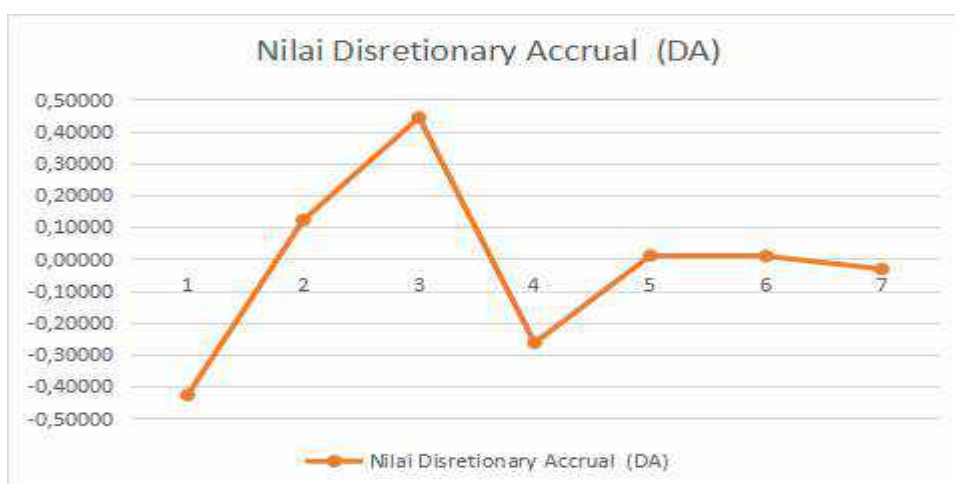
Nilai DA Bank Umum Syariah Pada Tahun 2015

Tabel 4.9

Discretionary Accrual (DA) Tahun 2015

Nama Bank	Nilai <i>Discretionary Accrual</i> (DA)
PT. Bank BCA Syariah	-0,42676
PT. Bank Muamalat Indonesia	0,12207
PT. Bank Mega Syariah	0,44370
PT. Bank BNI Syariah	-0,26305
PT. Bank BRI Syariah	0,01054
PT Bank Syariah Bukopin	0,00877
PT. Bank Syariah Mandiri	-0,03138

(Sumber : Data diolah)



Tabel 4.9 menunjukkan pada tahun 2015 nilai *Discretionary Accrual* dari 7 (tujuh) bank syariah yang dijadikan sampel, Empat

diantaranya bernilai positif dan 3 lainnya bernilai negatif. DA yang bernilai positif berarti bank syariah tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menaikkan laba. Dan DA yang bernilai negatif berarti Bank Syariah tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba.

Dari grafik 4.4 dapat dilihat nilai DA di tahun 2015 dengan nilai minimum adalah -0,42676 yang merupakan nilai DA dari PT Bank BCA Syariah sedangkan nilai maksimum adalah sebesar 0,44370 yang merupakan nilai DA dari PT Bank Mega Syariah.

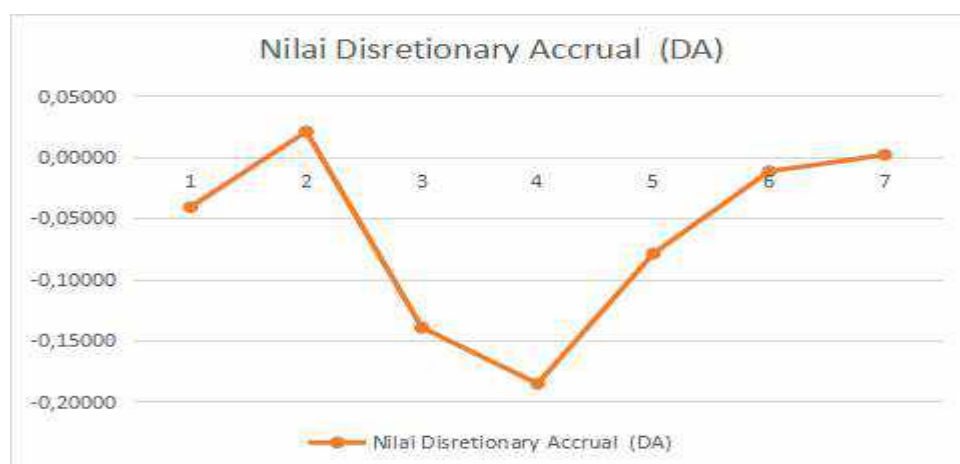
Nilai DA Bank Umum Syariah Pada Tahun 2016

Tabel 4.10

Discretionary Accrual (DA) Tahun 2016

Nama Bank	Nilai <i>Discretionary Accrual</i> (DA)
PT. Bank BCA Syariah	-0,04095
PT. Bank Muamalat Indonesia	0,02084
PT. Bank Mega Syariah	-0,13945
PT. Bank BNI Syariah	-0,18537
PT. Bank BRI Syariah	-0,07896
PT Bank Syariah Bukopin	-0,01172
PT. Bank Syariah Mandiri	0,00187

(Sumber : Data diolah)



Tabel 4.10 menunjukkan pada tahun 2016 nilai *Discretionary Accrual* dari 7 (tujuh) bank syariah yang dijadikan sampel, dua diantaranya bernilai positif dan 5 lainnya bernilai negatif. DA yang bernilai positif berarti bank syariah tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menaikkan laba. Dan DA yang bernilai negatif berarti Bank Syariah tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba.

Dari grafik 4.5 dapat dilihat nilai DA di tahun 2016 dengan nilai minimum adalah -0,18537 yang merupakan nilai DA dari PT Bank BNI Syariah sedangkan nilai maksimum adalah sebesar 0,02084 yang merupakan nilai DA dari PT Muamalat Indonesia

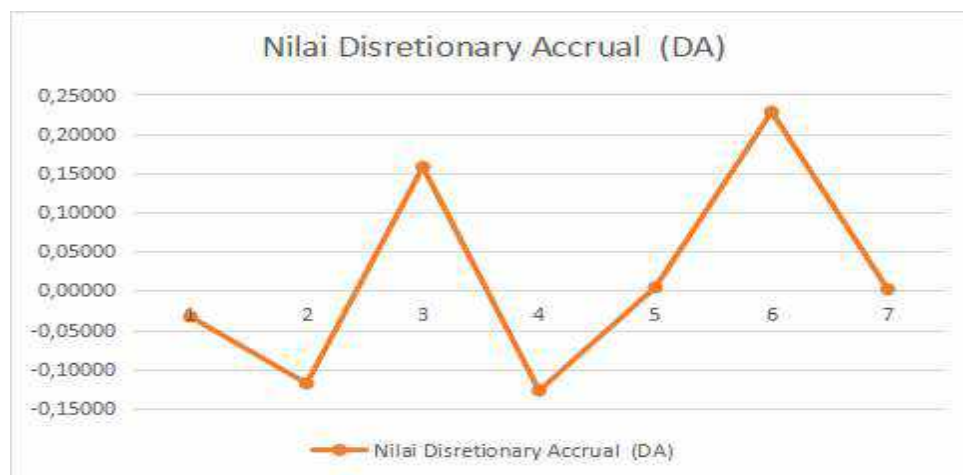
Nilai DA Bank Umum Syariah Pada Tahun 2017

Tabel 4.11

Discretionary Accrual (DA) Tahun 2017

Nama Bank	Nilai <i>Discretionary Accrual</i> (DA)
PT. Bank BCA Syariah	-0,03339
PT. Bank Muamalat Indonesia	-0,11841
PT. Bank Mega Syariah	0,15765
PT. Bank BNI Syariah	-0,12752
PT. Bank BRI Syariah	0,00432
PT Bank Syariah Bukopin	0,22790
PT. Bank Syariah Mandiri	0,00162

(Sumber : Data diolah)



Tabel 4.11 menunjukkan pada tahun 2017 nilai *Discretionary Accrual* dari 7 (tujuh) bank syariah yang dijadikan sampel, empat diantaranya bernilai positif dan tiga lainnya bernilai negatif. DA yang bernilai positif berarti bank syariah tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menaikkan laba. Dan DA yang bernilai negatif berarti Bank Syariah tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba.

Dari grafik 4.6 dapat dilihat nilai DA di tahun 2017 dengan nilai minimum adalah -0,12752 yang merupakan nilai DA dari PT Bank BNI Syariah sedangkan nilai maksimum adalah sebesar 0,2279 yang merupakan nilai DA dari PT Bank Bukopin Syariah.

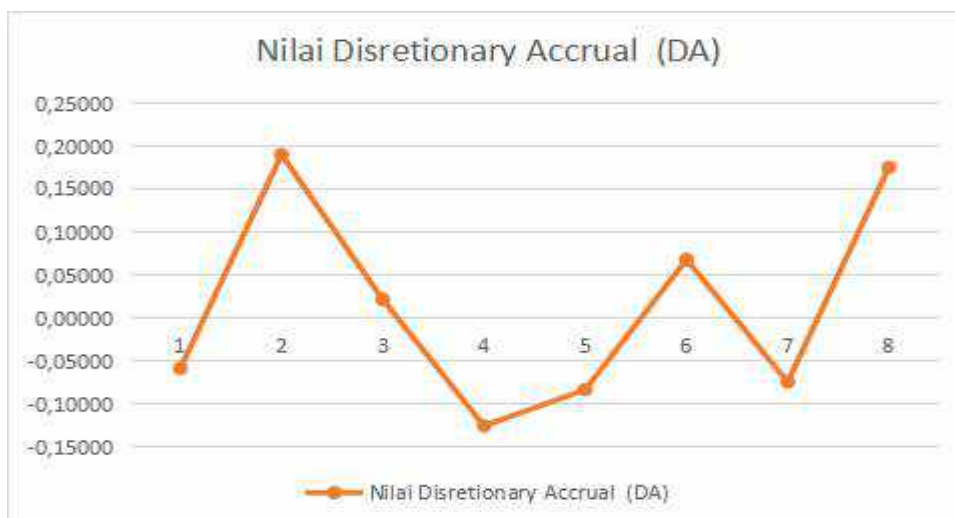
Nilai DA Bank Umum Syariah Pada Tahun 2018

Tabel 4.12

Discretionary Accrual (DA) Tahun 2018

Nama Bank	Nilai <i>Discretionary Accrual</i> (DA)
PT. Bank BCA Syariah	-0,05436
PT. Bank Muamalat Indonesia	0,17488
PT. Bank Mega Syariah	0,01956
PT. Bank BNI Syariah	-0,11594
PT. Bank BRI Syariah	-0,07703
PT Bank Syariah Bukopin	0,06248
PT. Bank Syariah Mandiri	-0,06867

(Sumber : Data diolah)



Tabel 4.12 menunjukkan pada tahun 2018 nilai *Discretionary Accrual* dari 7 (tujuh) bank syariah yang dijadikan sampel, empat diantaranya bernilai positif dan 3 lainnya bernilai negatif. DA yang bernilai positif berarti bank syariah tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menaikkan laba. Dan DA yang bernilai negatif berarti Bank Syariah tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba.

Dari grafik4. 7 dapat dilihat nilai DA di tahun 2018 dengan nilai minimum adalah -0,11594 yang merupakan nilai DA dari PT Bank BNI Syariah sedangkan nilai maksimum adalah sebesar 0,17488 yang merupakan nilai DA dari PT Bank Muamalat Indonesia.

DA Bank Umum Syariah Pada Tahun 2019

Tabel4.13

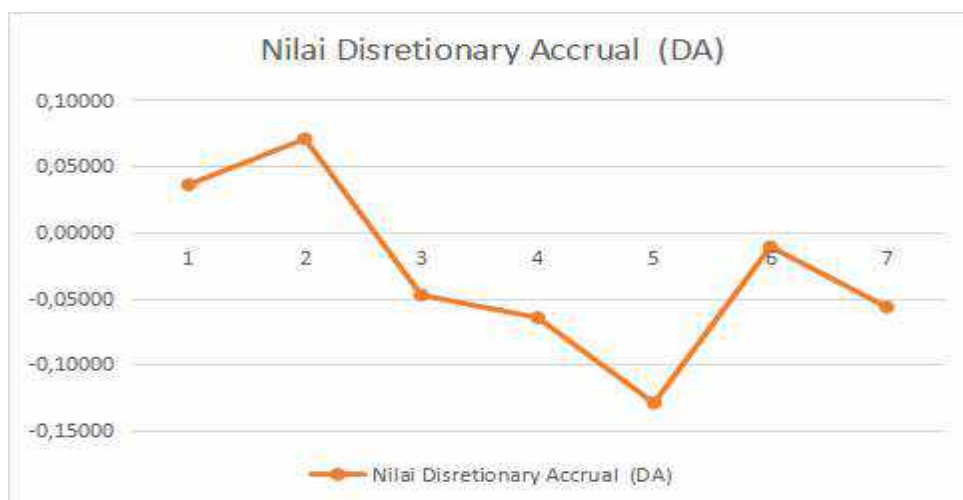
Discretionary Accrual (DA) Tahun 2019

Nama Bank	Nilai <i>Discretionary Accrual</i> (DA)
PT. Bank BCA Syariah	0,03587
PT. Bank Muamalat Indonesia	0,07057
PT. Bank Mega Syariah	-0,04766
PT. Bank BNI Syariah	-0,06474
PT. Bank BRI Syariah	-0,12930
PT Bank Syariah Bukopin	-0,01108

PT. Bank Syariah Mandiri

-0,05672

(Sumber : Data diolah)



Tabel 4.13 menunjukkan pada tahun 2019 nilai *Discretionary Accrual* dari 7 (tujuh) bank syariah yang dijadikan sampel, dua diantaranya bernilai positif dan lima lainnya bernilai negatif. DA yang bernilai positif berarti bank syariah tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menaikkan laba. Dan DA yang bernilai negatif berarti Bank Syariah tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba.

Dari grafik 4.7 dapat dilihat nilai DA di tahun 2019 dengan nilai minimum adalah -0,1293 yang merupakan nilai DA dari PT Bank BRI Syariah sedangkan nilai maksimum adalah sebesar 0,07057 yang merupakan nilai DA dari PT Bank Muamalat Indonesia.

Nilai DA Bank Umum Syariah Pada Tahun 2020

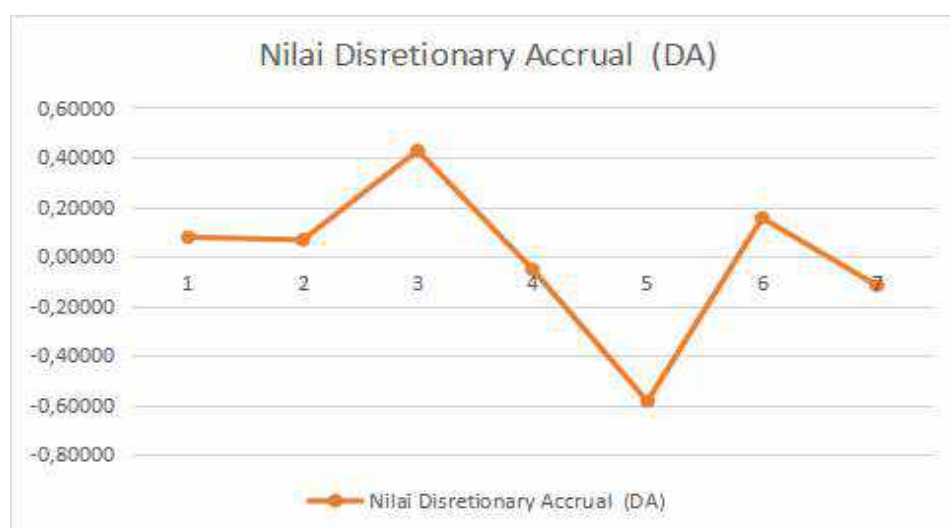
Tabel 4. 14

Discretionary Accrual (DA) Tahun 2020

Nama Bank	Nilai <i>Discretionary Accrual (DA)</i>
PT. Bank BCA Syariah	0,07720
PT. Bank Muamalat	0,06656

Indonesia	
PT. Bank Mega Syariah	0,42723
PT. Bank BNI Syariah	-0,05287
PT. Bank BRI Syariah	-0,58545
PT Bank Syariah Bukopin	0,15526
PT. Bank Syariah Mandiri	-0,11806

(Sumber : Data diolah)



Tabel 4.14 menunjukkan pada tahun 2020 nilai *Discretionary Accrual* dari 7 (tujuh) bank syariah yang dijadikan sampel, Empat diantaranya bernilai positif dan tiga lainnya bernilai negatif. DA yang bernilai positif berarti bank syariah tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menaikkan laba. Dan DA yang bernilai negatif berarti Bank Syariah tersebut melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba.

Dari grafik 4.7 dapat dilihat nilai DA di tahun 2020 dengan nilai minimum adalah -0,58545 yang merupakan nilai DA dari PT Bank BRI Syariah sedangkan nilai maksimum adalah sebesar 0,42723 yang merupakan nilai DA dari PT Bank Mega Syariah.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu data pada variabel-variabel yang digunakan. Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui deskripsi tentang nilai *Discretionary Accrual (DA)*, Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusi, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Komite Audit dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Umum Syariah periode 2012-2020. Deskripsi data ini meliputi nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA	63	-,906925	,614627	-,11799308	,289348454
U-DK	63	2,00	6,00	3,9048	1,02728
P-KI	63	,40	1,00	,6695	,16515
KepIns	63	,846	1,000	,97768	,043109
KepMan	63	,00000000	,01643000	,0009478597	,003331243590
U-KA	63	2,00	7,00	3,9365	1,37809
U-DPS	63	2,00	3,00	2,3651	,48532
Valid N (listwise)	63				

Sumber : Data diolah

Jumlah seluruh observasi pengamatan penelitian adalah 63 observasi pengamatan dengan enam variabel independen dan satu variabel dependen yaitu manajemen laba yang diproksikan dengan nilai *discretionary accruals*. Berdasarkan tabel 4. 15 Nilai *discretionary accrual* sebagai proksi dari manajemen laba menunjukkan nilai

minimums sebesar 0,906925, nilai maksimum 0,614627, nilai *mean* -0,11799308 dan nilai standar deviasi 0,289348454. Dengan nilai rata-rata -0,11799308 dapat disimpulkan bahwa perusahaan perbankan syariah rata-rata melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba. Bank Syariah yang memiliki nilai DA terendah adalah PT. Bank Mega Syariah tahun 2012 sedangkan Bank Syariah yang memiliki nilai DA tertinggi PT. Bank Syariah Bukopin pada tahun 2014.

Nilai *Discretionary Accrual* (DA) yang merupakan proksi dari Manajemen Laba yang berada diatas 0 menunjukkan bahwa metode manajemen laba yang dilakukan oleh bank adalah menaikkan laba (*income increasing*). Sedangkan nilai DA yang dibawah 0 atau bernilai negatif menunjukkan bahwa metode manajemen laba dilakukan dengan cara menurunkan laba (*income decreasing*). Berdasarkan olah data secara statistik diketahui dari tahun 2012-2020 nilai rata-rata DA Bank Umum Syariah diatas dikadalah bernilai negatif, hal ini menunjukkan rata-rata Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia melakukan manajemen laba dengan pola menurunkan laba (*income decreasing*).

Variabel independen pertama yaitu ukuran dewan komisaris memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum 6, nilai *mean* 3,9048 dan standar deviasi 1,02728. Bank syariah yang memiliki jumlah dewan komisaris terendah adalah PT. BRI Syariah pada tahun 2020 sedangkan jumlah dewan komisaris tertinggi dimiliki oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tahun 2012 dan 2015 dan juga Bank Syariah Mandiri pada tahun 2020.

Variabel Independen kedua yaitu proporsi komisaris independen memiliki nilai minimum 0.40, nilai maksimum 1,00 nilai *mean* 0,6695 dan standard deviasi 0,16515. Bank Syariah yang memiliki proporsi komisaris independen terendah adalah PT Bank BRI Syariah pada tahun 2014 sedangkan proporsi komisaris independen tertinggi adalah PT. Bank Mega Syariah pada tahun 2012-2020 dan PT. BNI Syariah pada tahun 2015 hal ini menunjukkan dari semua jumlah dewan komisaris yang ada adalah dewan komisaris independen.

Variabel independen ketiga yaitu kepemilikan institusi memiliki nilai minimum sebesar 0,846 , nilai maksimum 1,00 , nilai mean 0,97768 dan standar deviasi 0,43109. Bank syariah yang memiliki nilai kepemilikan institusional terendah adalah PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2012 sedangkan Bank Syariah yang memiliki nilai kepemilikan institusional tertinggi adalah PT Bank BCA Syariah pada tahun 2012-2020, PT Bank Mega Syariah pada tahun 2012-2020, PT Bank BNI Syariah tahun 2012-2020, PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2020 dan PT. Bank BRI Syariah tahun 2012-2018. Tingginya nilai rata-rata kepemilikan institusional menunjukkan rata-rata Bank Syariah di Indonesia dimiliki oleh Institusi .

Variabel Independen keempat adalah kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 0, 01643, nilai rata-rata 0,09478597 dan standar deviasi 0,333124359. Nilai kepemilikan manajerial terendah dimiliki oleh PT Bank BCA Syariah pada tahun 2012-2020, PT Bank Mega Syariah pada tahun 2012-2020, PT Bank BNI Syariah tahun 2012-2020, PT Bank Syariah Mandiri tahun 2012-2020 dan PT. Bank BRI Syariah tahun 2012-2018 sedangkan kepemilikan manajerial yang tertinggi adalah PT. Bank Syariah Bukopin pada tahun 2012-2013.

Variabel independen kelima adalah ukuran komite audit memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 7, nilai rata-rata 3,94 dan standar deviasi 1,37809. Ukuran komite audit terendah dimiliki oleh PT. Bank Syariah Bukopin pada tahun 2012, 2013, 2014, 2018 sedangkan ukuran komite audit tertinggi adalah PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020.

Variabel independen keenam adalah ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki nilai minimum sebesar 2, nilai maksimum sebesar 3, nilai rata-rata 2,37 dan standar deviasi 0,48532. Ukuran Dewan Pengawas Syariah dimiliki oleh PT Bank BCA Syariah, PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2020, PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2017, 2018, 2019, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah,

PT Bank Syariah Bukopin. Sedangkan Ukuran DPS yang tertinggi adalah PT Bank Muamalat Indonesia 2012-2019 dan PT Bank Mega Syariah 2012-2016 dan Bank Syariah Mandiri 2012-2020.

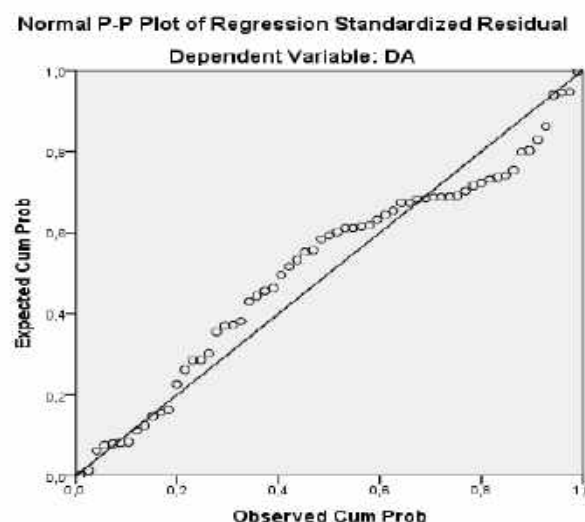
3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi nilai residual normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan dua cara yaitu dengan uji grafik dan uji statistik. Untuk uji grafik menggunakan analisis grafik *on probability plot*. Jika melalui grafik suatu variabel dapat dikatakan normal apabila gambar titik-titik pada grafik *non probability plots* mengikuti garis diagonal dan tidak melenceng dari arah garis .

Gambar 4. 1

P Plot *Non Probability Plots*



Berdasarkan pada gambar 4. 16 dapat dilihat plotting data residual sudah hampir menyebar disekitar garis diagonal, hal ini

berarti bahwa model regresi sudah hamper memenuhi asumsi normalitas. Namun uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik dapat menyesatkan karena terkadang data kelihatan normal, padahal belum tentu berdistribusi normal. Oleh karena itu untuk memastikan apakah data berdistribusi normal atau tidak maka dilakukan uji analisis statistik. Pengujian normalitas dengan metode statistic dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 4. 16
Hasil Uji Kolmogorov – Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,28062199
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,108
	Negative	-,112
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		,048 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Pada hasil uji analisis statistik dengan uji *Kolmogrov Smirnov* (1 sample KS) pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai *asymptonic significance* sebesar $0,048 < 0,05$. Hal ini berarti data dalam penelitian ini tidak terdistribusi secara normal. Ada 2 (dua) metode yang dapat digunakan untuk mengobati data yang tidak normal. Metode pertama dapat dilakukan dengan cara

mentransformasi data. Dan metode kedua adalah dengan menghapus data-data *outlier*. Peneliti akan menggunakan metode pertama terlebih dahulu yaitu mentransformasi data ke dalam bentuk *logaritma natural (Ln)*. Berikut adalah hasil uji normalitas setelah melakukan transformasi data dengan menggunakan bantuan SPSS versi 24 :

Tabel 4.17
Uji Normalitas Setelah Transformasi Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,16263769
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,093
	Negative	-,101
Test Statistic		,101
Asymp. Sig. (2-tailed)		,181 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi *Kolmogrov-Smirnov* sebesar 0,181 dan sudah lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti data sudah berdistribusi secara normal sehingga model regresi layak untuk digunakan.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas digunakan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linear di antara variabel-variabel independen

dengan model regresi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tolerance value dan variance inflation factor (VIF) dengan kriteria, jika tolerance value $< 0,1$ dan VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas dan jika tolerance value $> 0,1$ atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut ini :

Tabel 4. 18
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Ln-UDK	,509	1,966
	Ln_KI	,463	2,160
	Ln_KepInst	,565	1,771
	Ln_Kepman	,761	1,314
	Ln_KA	,619	1,615
	Ln_DPS	,599	1,670
a. Dependent Variable: Ln-DA			

Tabel 4.19 diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih besar dari 0,1 dan nilai *Value Inflating Factor* (VIF) untuk semua variabel dalam tiap-tiap model regresi lebih kecil dari 10. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linier ada atau tidak ada kolerasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian ini

menggunakan uji *Durbin-Watson*. Berikut hasil uji autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson*

Tabel 4.19
Hasil Uji Durbin Watson

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.291 ^a	.085	-.013	.17113	1,620
a. Predictors: (Constant), Ln_DPS, Ln_KI, Ln_Kepman, Ln_KA, Ln_KepInst, Ln-UDK					
b. Dependent Variable: Ln-DA					

Berdasarkan tabel 4.20 pada uji autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,471 nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson d Statistic: *Significance Point For dl and du at 0,05 Level of Significance* dengan menggunakan nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 63 (n) dan jumlah variabel independen 6 (k=6), maka di tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai sebagai berikut nilai batas bawah (dl) adalah 1,3918 dan nilai batas atas (du) adalah 1,8058. Nilai DW 1,620 Jika dilihat dari dasar pengambilan keputusan termasuk kepada $dl < d < du$, hal ini berarti tidak ada keputusan pasti dari hasil uji Durbin-Watson atas model regresi tersebut,

Untuk memastikan lebih lanjut ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi lebih lanjut digunakan Uji Run. Uji Run digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Hipotesis dari Uji Run adalah sebagai berikut :

Ho : Nilai Sig > 0,05, residual random (acak),

Ha : Nilai Sig < 0,05, residual tidak random.

Hasil dari Uji Run dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.20
Uji Autokorelasi (Uji Run)

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,02145
Cases < Test Value	31
Cases >= Test Value	32
Total Cases	63
Number of Runs	27
Z	-1,396
Asymp. Sig. (2-tailed)	,163
a. Median	

Dari tabel 4.21 dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2- tailed) di atas tingkat kepercayaan 5% sehingga H_0 tidak dapat ditolak. Hal ini berarti data yang dipergunakan tersebar (random). Dapat diketahui bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi antar variabel independen, sehingga model regresi layak digunakan.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi terjadi kesamaan atau ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau homokedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank Spearman. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 5% (≤ 0.05) maka persamaan regresi mengandung heteroskedastisitas dan begitu sebaliknya berarti non heteroskedastisitas

atau homoskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji korelasi Rank Spearman ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel. 4.21
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations			
			Unstandardized Residual
Spearman's rho	Ln-UDK	Correlation Coefficient	-,043
		Sig. (2-tailed)	,735
		N	63
	Ln_KI	Correlation Coefficient	,034
		Sig. (2-tailed)	,792
		N	63
	Ln_KepInst	Correlation Coefficient	,140
		Sig. (2-tailed)	,273
		N	63
	Ln_Kepman	Correlation Coefficient	,054
		Sig. (2-tailed)	,676
		N	63
	Ln_KA	Correlation Coefficient	-,051
		Sig. (2-tailed)	,694
		N	63
	Ln_DPS	Correlation Coefficient	-,020
		Sig. (2-tailed)	,877
		N	63
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1,000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	63
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).			
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).			

Sumber : Hasil pengolahan SPSS, 2021

Berdasarkan tabel 4.22 di atas dapat dilihat hasil dari uji korelasi *Rank Spearman* diketahui bahwa nilai signifikansi variabel Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusi, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Komite Audit, dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah lebih besar dari α (0,05) sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala heteroskedasitas pada keenam variabel tersebut

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Tabel berikut menunjukkan nilai koefisien determinasi dari variabel independen dalam penelitian ini.

Tabel. 4.22
Koefisien Determinan

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,291 ^a	,085	-,013	,17113
a. Predictors: (Constant), Ln_DPS, Ln_KI, Ln_Kepman, Ln_KA, Ln_KepInst, Ln-UDK				
b. Dependent Variable: Ln-DA				

Pada Tabel *model summary* di atas nilai R^2 sebesar 0,085 memiliki arti bahwa pengaruh semua variabel bebas (Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Komite Audit dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah) terhadap perubahan variabel terikat (Manajemen Laba yang diprosikan dengan nilai *Discretionary Accrual*) adalah sebesar 8,5 %

sedangkan 91,5 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Komite Audit dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah) terhadap variabel dependen manajemen laba yang diprosikan dengan nilai *discretionary accrual*. Hasil regresinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.23

Hasil Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,653	,151		4,320	,000
	Ln-UDK	-,103	,118	-,156	-,870	,388
	Ln_PDKI	-,022	,138	-,031	-,163	,871
	Ln_KepInst	-,663	,630	-,179	-1,051	,298
	Ln_Kepman	-5,635	7,547	-,109	-,747	,458
	Ln_KA	,142	,083	,278	1,710	,093
	Ln_DPS	-,126	,143	-,146	-,883	,381
a. Dependent Variable: Ln-DA						

Pada tabel diatas dapat dilihat hubungan antara manajemen laba (Y) dengan mekanisme *good corporate governance* yang diprosikan dengan Ukuran Dewan Komisaris (X1), Proporsi Komisaris Independen (X2), Kepemilikan Institusi (X3), Kepemilikan Manajerial (X4) Ukuran Komite Audit (X5) Ukuran Dewan Pengawas Syariah (X6). Persamaan regresi berganda yang

diperoleh dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 24 adalah sebagai berikut :

$$Y = 653 - 0,103X_1 - 0,022X_2 - 0,663X_3 - 0,635X_4 + 0,142X_5 - 0,126X_6$$

Dari hasil persamaan regresi berganda diatas, dapat diinterpretasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Jika Variabel X1 (Ukuran Dewan Komisaris), X2 (Proporsi Dewan Komisaris Independen), X3 (Kepemilikan Institusi), X4 (Kepemilikan Manajerial), X5 (Ukuran Komite Audit) dan X6 (Ukuran Dewan Pengawas Syariah) adalah sebesar 0 (nol), variable Y (*discretionary accrual*) adalah sebesar nilai konstanta 0,653. Artinya jika variabel independen terdiri atas Ukuran Dewan Komisaris (U-DK), Proporsi Dewan Komisaris (P-DK), Kepemilikan institusi (KepInst), Kepemilikan Manajerial (KepMan), Ukuran Komite Audit (U-KA) serta ukuran Dewan Pengawas Syariah (U-DPS) dianggap konstan, akan tetap terjadi praktik manajemen laba yang ditunjukkan oleh DA yang bernilai positif sebesar 0,653.
- 2) Jika variabel X1 (Ukuran Dewan Komisaris) ditambah sebesar 1 (satu) unit satuan, akan menurunkan variabel Y (*discretionary accrual*) sebesar -0,103. Artinya setiap penambahan 1 (satu) unit satuan U-DK akan berakibat pada menurunnya variabel Y (*discretionary accrual*) sebesar -0,103 dengan asumsi bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen (P-DKI), Kepemilikan Institusi (KepInst), Kepemilikan Manajerial (KepMan), Ukuran Komite Audit (U-KA) serta Ukuran Dewan Pengawas Syariah (U-DPS) dianggap konstan
- 3) Jika variabel X2 (Proporsi Dewan Komisaris Independen) ditambah sebesar 1 (satu) unit satuan, maka akan menurunkan nilai variabel Y (*discretionary accrual*) sebesar -0,022 . Artinya setiap penambahan 1 (satu) unit satuan U-DK akan

berakibat pada menurunnya variabel Y (*discretionary accrual*) sebesar -0,022, dengan asumsi bahwa Ukuran Dewan Komisaris (U-DK), Kepemilikan Institusi (KepInst), Kepemilikan Manajerial (KepMan), Ukuran Komite Audit (U-KA) serta ukuran Dewan Pengawas Syariah (U-DPS) dianggap konstan

- 4) Jika variabel X3 (Kepemilikan Instusi) ditambah sebesar 1 (satu) unit satuan, akan menurunkan variabel Y (*discretionary accrual*) sebesar -0,663. Artinya setiap penambahan 1 (satu) unit satuan KepInst akan berakibat pada menurunnya variabel Y (*discretionary accrual*) sebesar -0,663 dengan asumsi bahwa Ukuran Dewan Komisaris (U-DK), Proporsi Dewan Komisaris Independen (P-DKI), Kepemilikan Manajerial (KepMan), Ukuran Komite Audit (U-KA) serta Ukuran Dewan Pengawas Syariah (U-DPS) dianggap konstan.
- 5) Jika variabel X4 (Kepemilikan Manajerial) ditambah sebesar 1 (satu) unit satuan, akan mengurangi variabel Y (*discretionary accrual*) sebesar -5,635. Artinya setiap penambahan 1 (satu) unit satuan Kepemilikan Manajerial akan berakibat pada berkurangnya variabel Y (*discretionary accrual*) sebesar -5,635, dengan asumsi bahwa Ukuran Dewan Komisaris (U-DK), Proporsi Dewan Komisaris Independen (P-DKI), Kepemilikan Institusi (KepIns), Ukuran Komite audit (U-KA) serta Ukuran Dewan Pengawas Syariah (U-DPS) dianggap konstan.
- 6) Jika variabel X5 (Ukuran Komite Audit) ditambah sebesar 1 (satu) unit satuan, akan menambah variabel Y (*discretionary accrual*) sebesar 0,142. Artinya setiap penambahan 1 (satu) unit satuan U_KA akan berakibat pada bertambahnya variabel Y (*discretionary accrual*) sebesar 0,142 dengan asumsi bahwa Ukuran Dewan Komisaris (U-DK), Proporsi Dewan Komisaris

Independen (P-DKI), kepemilikan manajerial (KepMan), Kepemilikan Institusi (KepInst) serta ukuran Dewan Pengawas Syariah (U-DPS) dianggap konstan.

- 7) Jika variabel X6 (Ukuran DPS) ditambah sebesar 1 (satu) unit satuan, akan mengurangi variabel Y (*discretionary accrual*) sebesar -0,126. Artinya setiap penambahan 1 (satu) unit satuan U-DPS akan berakibat pada berkurangnya variabel Y (*discretionary accrual*) sebesar -0,126 dengan asumsi bahwa ukuran dewan komisaris (U-DK), proporsi dewan komisaris Independen (P-DKI), Kepemilikan Institusi (KepInst), kepemilikan manajerial (KepMan), serta ukuran komite audit (U-KA) dianggap konstan.

c. Uji Signifikan F (Uji F)

Uji signifikan F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen Ukuran Dewan Komisaris (U-DK), Proporsi Komisaris Independen (P-KI), Kepemilikan Institusi (KepIns), Kepemilikan Manajerial (KepMan), Ukuran Komite Audit (U-KA) dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (U-DPS) yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (*discretionary accrual*). Kriteria yang digunakan dalam pengujian ini adalah :

- 1) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_8 ditolak
- 2) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_8 diterima

Untuk nilai F_{tabel} pada tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan derajat bebas pembilang 6 ($k-1= 7-1$) dan derajat bebas penyebut 56 ($n-k = 63-7$) diperoleh hasil sebesar 2,266 Berikut hasil uji signifikan-F pada tabel 4.8 :

Tabel 4.25 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,152	6	,025	,863	,528 ^b
	Residual	1,640	56	,029		
	Total	1,792	62			
a. Dependent Variable: Ln-DA						
b. Predictors: (Constant), Ln_DPS, Ln_KI, Ln_Kepman, Ln_KA, Ln_KepInst, Ln-UDK						

Berdasarkan tabel 4.25 diatas dapat dilihat hasil uji F hitung sebesar 0,863 dan nilai sig. 0,528. Karena nilai signifikan F lebih besar dari sig 0.05 ($0,528 > 0,05$) dan F_{hitung} lebih kecil dari F_{tabel} ($0,863 < 2,266$), maka H_8 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris (U-DK), Proporsi Komisaris Independen (P-KI), Kepemilikan Institusi (KepIns), Kepemilikan Manajerial (KepMan), Ukuran Komite Audit (U-KA) dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (U-DPS) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap nilai *discretionary accrual* (DA) sebagai proksi manajemen laba. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis 7 pada penelitian ini ditolak

d. Uji Parsial (t Test)

Pengujian variabel independen secara parsial atau secara individual dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (U-DK, P-KI, KepInst, KepMan, U-KA dan U-DPS) terhadap manajemen laba yang diproksikan dengan nilai *discretionary accrual* (DA). Pengujian dilakukan dengan

membandingkan nilai T_{hitung} dengan T_{tabel} , yaitu jika T_{hitung} lebih besar dari pada T_{tabel} maka dapat disimpulkan variabel independen yang diuji berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika T_{hitung} lebih kecil dari pada T_{tabel} maka dapat disimpulkan variabel independen yang diuji tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai T_{tabel} pada tingkat signifikansi sebesar 0,05 dengan derajat kebebasan (dk) $n-k-1$ (63-7-1) diperoleh hasil sebesar 2,00324.

Kriteria pengambilan keputusan :

- 1) Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ atau $-T_{hitung} < -T_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a Diterima
- 2) Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ atau $-T_{hitung} > -T_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a Ditolak

Hasil pengujian Uji T dapat dilihat pada tabel 16 berikut ini :

Tabel 4.25
Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,653	,151		4,320	,000
	Ln-UDK	-,103	,118	-,156	-,870	,388
	Ln_PDKI	-,022	,138	-,031	-,163	,871
	Ln_KepInst	-,663	,630	-,179	-1,051	,298
	Ln_Kepman	-5,635	7,547	-,109	-,747	,458
	Ln_KA	,142	,083	,278	1,710	,093
	Ln_DPS	-,126	,143	-,146	-,883	,381

a. Dependent Variable: Ln-DA

Berdasarkan hasil output SPSS *version 24.00* pada tabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Ukuran Dewan Komisaris
Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel Ukuran Dewan Komisaris (U-DK) terhadap Manajemen Laba yang diproksikan dengan *discretionary accrual* menunjukkan nilai t hitung sebesar $-0,870$ dengan signifikansi sebesar $0,388$ ($p > 0,05$). Karena t hitung $< t$ tabel ($-0,870 < 2,00324$). Hal ini berarti bahwa Ukuran Dewan Komisaris (U-DK) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sehingga Hipotesis 1 ditolak.
- 2) Proporsi Dewan Komisaris Independen
Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen (P-DKI) terhadap Manajemen Laba yang diproksikan dengan *discretionary accrual* menunjukkan nilai t hitung sebesar $-0,163$ dengan signifikansi sebesar $0,871$ ($p > 0,05$). Karena t hitung $< t$ tabel ($-0,163 < 2,00324$). Hal ini berarti bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen (P-KI) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sehingga Hipotesis 2 ditolak.
- 3) Kepemilikan intitusional
Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel Kepemilikan Intitusional (KepInst) terhadap Manajemen Laba yang diproksikan dengan *discretionary accrual* menunjukkan nilai t hitung sebesar $-1,051$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,298$ ($p > 0,05$). Karena t hitung $< t$ tabel ($-1,051 < 2,00324$). Hal ini berarti bahwa Kepemilikan Institusi (KepInst) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sehingga Hipotesis 3 ditolak
- 4) Kepemilikan Manajerial
Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel Kepemilikan Manajerial (Kepman) terhadap Manajemen Laba yang diproksikan dengan *discretionary accrual* menunjukkan nilai t hitung sebesar $-0,747$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,458$ ($p > 0,05$). Karena t

hitung $< t$ tabel ($0,747 < 2,00324$). Hal ini berarti bahwa Kepemilikan Manajerial (KepMan) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sehingga Hipotesis 4 ditolak

5) Ukuran Komite Audit

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh Ukuran Komite Audit (UKA) terhadap Manajemen Laba yang diproksikan dengan *discretionary accrual* menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,710 dengan nilai signifikansi sebesar 0,093 ($p > 0,05$). Karena t hitung $< t$ tabel ($1,710 < 2,00324$). Hal ini berarti bahwa ukuran Komite Audit (U-KA) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sehingga Hipotesis 5 ditolak

6) Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UPS) terhadap Manajemen Laba yang diproksikan dengan *discretionary accrual* menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,883 dengan nilai signifikansi sebesar 0,381 ($p > 0,05$). Karena t hitung $< t$ tabel ($-0,883 < 2,00324$). Hal ini berarti bahwa Ukuran Dewan Pengawas Syariah (U-DPS) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sehingga Hipotesis 6 ditolak

C. Pembahasan

1. Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba

Hasil pengujian hipotesis pertama menyatakan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba yang diproksikan dengan *discretionary accrual* pada Bank Umum Syariah (BUS) yang dijadikan sampel periode 2012-2020. Hal ini dapat diketahui dari nilai t hitung $-0,870 < t$ tabel 2,00324 dan nilai sig. sebesar 0,388 ($p > 0,05$).

Berdasarkan hasil penelitian Ukuran Dewan Komisaris pada Bank Umum Syariah (BUS) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,9048. Nilai rata-rata ini telah lebih besar dari

jumlah Dewan Komisaris yang dipersyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dimana didalamnya diungkapkan bahwasanya Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga orang) dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Namun kondisi ini belum mampu membuat ukuran dewan komisaris yang besar menekan praktik manajemen laba pada Bank umum Syariah yang dijadikan sampel periode 2012-2020. Hal ini menunjukkan besar kecilnya ukuran dewan komisaris bukanlah menjadi faktor penentu dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen laba. Ukuran Dewan Komisaris yang kecil lebih mampu meminimalkan manajemen laba karena pada dewan komisaris yang mempunyai anggota sedikit lebih cepat dalam mengambil keputusan dan tidak menemui kendala dalam melakukan koordinasi dan berkomunikasi dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh setiawan (2018) Putra (2019)

Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mersni & Othman (2016) yang menyatakan ukuran dewan komisaris yang besar lebih mampu untuk mencegah praktik manajemen laba.

2. Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Manajemen laba

Hasil pengujian hipotesis kedua menyatakan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba yang diproksikan dengan *discretionary accrual* pada Bank Umum Syariah (BUS) yang dijadikan sampel pada periode 2012-2020. Hal ini dapat diketahui dari nilai t hitung $-0,870 < t \text{ tabel } 2,00324$ dan nilai sig. sebesar $0,388 (p.>005)$.

Tidak signifikannya pengaruh dari hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh penempatan anggota dewan komisaris independen selama ini hanya sekedar untuk memenuhi

ketentuan formal saja tidak dimaksudkan untuk *menegakkan good corporate governance (GCG)*. Selain itu penunjukan dewan komisaris independen yang selama ini dilakukan oleh pemegang saham mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang juga turut menjadi faktor penghambat keindepedensian dewan komisaris independen, hal ini dikarenakan apabila komisaris independen tidak sejalan dengan keputusan pemilik saham mayoritas, maka perusahaan dapat melakukan penggantian. Kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas menjadikan dewan komisaris kurang efektif dalam menajalan tanggungjawabnya dalam melakukan pengawasan.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2019) yang menyatakan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan peneltian yang dilakukan oleh Arif (2020) yang mengungkapkan proporsi komisaris independen yang besar akan dapat menurunkan angka manajemen laba.

3. Kepemilikan intitusional dan Manajemen Laba

Hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba yang diprosikan dengan discretionary accrual pada Bank Umum Syariah. Hal ini dapat diketahui dari nilai t hitung $-1,051 < t$ tabel $2,00324$ dan nilai sig. sebesar $0,298$ ($p > 0,005$).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tingkat kepemilikan institusional pada Bank Umum Syariah (BUS) sudah cukup tinggi hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata (mean) dari variabel ini mencapai $97,76$. Tingginya tingkat kepemilikan institusi pada Bank Umum Syariah tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba yang terjadi pada Bank umum

Syariah. Hal ini dikarenakan pihak institusional adalah pemilik yang lebih memfokuskan pada current earnings atau laba saat ini (Zeptian & Rohman, 2013). Institusi yang memiliki saham yang cukup besar mempunyai kemampuan untuk melakukan intervensi terhadap jalannya perusahaan dan proses pelaporan keuangan perusahaan. Besarnya saham yang dimiliki atau diinvestasikan oleh investor institusi dalam perusahaan akan membuat manajer merasa terikat untuk memenuhi target laba dari para investor.

4. Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba

Hasil pengujian hipotesis keempat menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba yang diproksikan dengan discretionary accrual pada Bank Umum Syariah. Dengan nilai t hitung $-1,747 < 2,00324$ dan nilai sig. sebesar 0,458. Selanjutnya dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar -5,635 yang menunjukkan adanya hubungan secara negatif, berarti bahwa semakin besar kepemilikan manajerial pada perusahaan maka semakin kecil manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Namun hasil penelitian ini secara statistik menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Persentase tingkat kepemilikan manajerial pada Bank Umum Syariah (BUS) tergolong masih sangat rendah ini dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) hasil statistik deskriptif variabel kepemilikan manajerial yang hanya sebesar 0,094 %.

5. Ukuran Komite Audit dan Manajemen laba

Hasil pengujian hipotesis kelima menyatakan bahwa Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba yang diproksikan dengan *discretionary accrual* pada Bank Umum Syariah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $1,710 < t \text{ tabel } 2,00324$ dan nilai sig. sebesar 0,93 ($p > 0,05$). Hal menarik disini bila dilihat dari koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,142 yang berarti setiap ada peningkatan anggota

akan menambah tingkat manajemen laba hal ini berbanding terbalik dengan teori yang menyatakan komite audit dapat memitigasi terjadinya manajemen laba.

Berdasarkan hasil penelitian rata-rata Bank Umum Syariah telah memiliki jumlah komite audit yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu 3 orang. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata (*mean*) hasil statistik deskriptif pada variabel ini sebesar 3,94. Hal ini membuktikan jumlah komite audit yang besar belum tentu mampu memperketat sistem pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen pada Bank Umum Syariah. dengan demikian ketidaksesuaian hasil penelitian ini dengan hipotesis kemungkinannya disebabkan oleh pembentukan komite audit dalam perusahaan perbankan syariah didasari hanya sebatas untuk memenuhi regulasi dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. dimana pada peraturan tersebut mensyaratkan perusahaan agar mempunyai komite audit yang paling sedikit terdiri dari seorang komisaris independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang hukum.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Mersni & Othman (2016). Dan mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nahar & Erawati (2017) dan Novitasari, dkk (2019) yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

6. Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Manajemen Laba

Hasil pengujian hipotesis keenam menyatakan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba yang diprosikan dengan *discretionary accrual* pada Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel periode 2012-

2020. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $-1,747 < t$ tabel $2,00324$ dan nilai sig. sebesar $0,458$.

Berdasarkan hasil penelitian ini banyak atau sedikitnya jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Bank Umum Syariah tidak mempengaruhi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Hal ini dikarenakan jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank Umum Syariah yang relatif sama dari tahun ketahun dan kontribusi tingkat pengawasan yang dilakukan oleh DPS terhadap manajemen lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti jumlah rapat yang diadakan DPS. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dkk (2017) dan Arif & Purwanto (2020) yang menyatakan semakin sering DPS melakukan rapat, maka pengawasan terhadap prinsip syariah akan semakin optimal dan akan menurunkan manajemen laba. Selain itu menurut Mersni & Bent Othman (2016) untuk meningkatkan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah juga bisa menambahkan faktor keahlian Dewan Pengawas Syariah pada bidang akuntansi akuntansi dan keuangan.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Saharmi & Praptitorini (2015) Kodriyah dkk (2017), Nurhayati dkk (2017) dan Agustin & Filianti (2021) yang menyatakan ukuran DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Quttainah (2013) dan Kolsi (2017).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah periode 2012-2020 yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel mekanisme *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusi, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Komite Audit dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai *discretionary accrual* (DA) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2012-2020. *Discretionary Accrual* adalah salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi terjadinya manajemen laba .
2. Tidak signifikannya pengaruh mekanisme *good corporate governance* tersebut membuktikan bahwasanya penerapan *good corporate governance* belum mampu untuk meredam praktik manajemen laba pada Bank Umum Syariah periode 2012-2020 sehingga tujuan dari penerapan mekanisme *good corporate governance* itu sendiri sendiri belum tercapai.

B. Implikasi

1. Hasil penelitian ini memberikan bukti mengenai fenomena manajemen laba yang terjadi pada bank umum syariah di Indonesia periode 2012-2020. Hasil penelitian ini dapat membantu investor dalam mengambil keputusan yang tepat untuk melakukan investasi.

2. Hasil penelitian juga dapat memberi masukan kepada auditor untuk lebih berhati-hati dalam melakukan audit, serta mempertimbangkan prosedur tambahan apabila diperlukan dalam menilai dan mengaudit laporan keuangan.

C. Saran

1. Kepada institusi Perbankan syariah disarankan sebaiknya tidak melakukan praktik manajemen laba. Karena manajemen laba menjadikan informasi yang disampaikan di dalam laporan keuangan menjadi tidak akurat dan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Untuk menghindari hal tersebut diperlukan penegakan praktik *good corporate governance* salah satunya adalah dengan membentuk Dewan Pengawas Syariah yang kompeten.
2. Penelitian ini menggunakan nilai *Discretionary Accrual* (DA) dari model *Modifikasi Jones* dalam mendeteksi indikasi terjadinya manajemen laba pada Bank Umum Syariah (BUS), penelitian selanjutnya bisa menggunakan manajemen laba riil yang dilakukan dengan cara memanipulasi aktifitas riil serta memiliki dampak langsung terhadap arus kas perusahaan yang sulit dideteksi oleh auditor maupun oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)
3. Penelitian ini hanya menggunakan 7 Bank Umum Syariah untuk dijadikan sampel, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menjadikan jumlah keseluruhan Bank Umum Syariah menjadi sampel. Dan kepada Bank Syariah disarankan juga untuk mempublikasikan seluruh laporan keuangannya sebagai bagian dari pemenuhan prinsip GCG yaitu Transparansi dan keterbukaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdelsalam, O. D. (2016). Earnings management behaviors under different monitoring mechanisms: The case of Islamic and conventional banks. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 132, 155-173.
- Abidin, Z. d. (2013). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Manajemen Goog Corporate Governance*. Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (Pres) Bank Indonesia.
- Agustin, & Filianti, D. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance dan Kinerja Keuangan terhadap Manajemen Laba Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* p-ISSN: 2407-1935, e-ISSN: 2502-1508. Vol. 8 No. 4 Juli .
- Alzoubi, E. S. (2012). Board Characteristics and Financial Reporting Quality among Jordanian Listed Companies : Proposing Conceptual Framework. *Asian Journal of finance & Accounting* ISSN 1946-052X Vol 4 No.1.
- Arif, A. &. (2020). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. *PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Akuntansi* Vol.12, No.2 <http://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana> (ISSN :2685-600x).
- Arif, P. A. (2020). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governnace terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* <http://permana.upstegal.ac.id/index.php/permana> ISSN (Online) :2685-600X Vol. 12, No.2, Agustus 2020,, 183-195.
- Arisandy, Y. (2015). Manajemen Laba dalam Perspektif Islam. *MIZANI* 25 (2).
- Ashari, M. P. (2021). Pengaruh kepemilikan perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Biaya Produksi terhadap Manajemen laba Rill Bank syariah. *Journal of Economic, Public and Accounting (JEPA)* Vol.3. No.2 April 2021.
- Ayem, S. e. (2019). Pengaruh Pengadopsian Internasional Financial Reporting Standar (IFRS) dan Good Corporate Governance terhadap Manajemen

Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Jasa Transportasi yang Terdaftar di BEI). *Jurnal of Economic Management and Accounting* .

- Belkaoui, A. R. (2011). *Teori Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cahyati, A. D. (2015). Pembuktian Fenomena Earning Management pada perbankan Syariah : Analisa Laba Rill dan Laba AkruaI. *El-Muhasaba, Vol 6 No. 1* .
- Diaz, B. (2018). *Corporate Governnace in Banking and Investor Protection from Theory to practice*. Switzerland: Springer International Publishing.
- dkk, C. (2020). Earning Management praktices in Islamic Banking in Indoesia. *The Accounting Journal of BINANIAGA Vol. 05, No. 01, June 2020 p-ISSN: 2527-4309, e-ISSN: 2580-1481*.
- El Diri, M. (2017). *Introduction to Earnings Management*. Spinger.
- Erawati, N. &. (2017). Pengaruh NPM, FDR, Komite Audit, Pertumbuhan Usaha, Leverage dan Size terhadap Manajemen Laba. *Akuntansi Dewantara Vol 1 No 1 April 2017*.
- Ermawati, L. d. (2020). Pengaruh Komisaris Independen Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia). *Al-Mal: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Volume 01 , No. 01 (2020) , hal. 61-70 E-ISSN:2715-954X, 21 Februari 2020*.
- FCGI. (2000). *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jakarta: FCGI.
- Franita, R. (2018). *Mekanisme Good Corporate Governance dan Nilai Perusahaan : Studi unytuk Perusahaan Telekomunikasi*. Medan: Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamdi, F. M. (2014). Corporate Governance Practices and Earnings Management in Islamic Banking Institutions. *Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.5, No.9, 2014www.iiste.org*.

- Healy, P. &. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. *Accounting horizons*, 13(4),, 365-383.
- Herawaty, V. (2008). Peran Praktek Corporate Governance sebagai moderating Variabel dari Pengaruh Earnings Management terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, (10) 2, 97-108.
- Illahi, I. (2019). Fenomena Manajemen Laba pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Tindakan Mitigasinya. *Ekonomi Syariah : Journal of Economic Studies e-ISSN:2614-8110 Vol. 3 , No. 2, Juli-Desember 2019*.
- Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic* 3.
- KNKG. (2002). *Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif*. Komite Nasional Good Corporate Governance.
- KNKG. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Komite Nasional Kebijakan Nasional Governance.
- KNKG. (2011). *Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah*. Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kodriyah, & dkk. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Dewan Komisaris dalam mendeteksi Praktik Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi Vol 4 No.2 Juli 2017 e-ISSN 2549-5968*.
- Kolsi, M. C. (2017). Did corporate governance mechanisms affect earnings management? Further evidence from GCC Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 10 (1), 2-23.
- Lassoued, N. A. (2018). Earnings Management in Islamic and Conventional Banks: Does Ownership Structure Matter ? Evidence From the MENA Region. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 30, 85-105.
- Lesmana, I. P. (2017). Pengaruh Manajemen Laba Pada Nilai Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.2. Mei (2017): 1060-1087 ISSN: 2302-8556*.
- Lubis, A. (2016). Agency Problem dalam Penerapan Pembiayaan Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Al-Qalam Vol. 33 No. 1* .

- Magalhães, R. & S. (2013). Corporate governance in Islamic financial institutions: the issues surrounding unrestricted investment account holders. *Corporate Governance: The international journal of business in society*, (13)1, 39-57.
- Mahrani, M. &. (2018). The effect of good corporate governance mechanism and corporate social responsibility on financial performance with earnings management as mediating variable. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 41–60. <https://doi.org/10.1108/ajar-06-2018-0008>.
- Maradita, A. (2014). Karakteristik Good Corporate Governance Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Yuridika*, 29(2).
- Marra, A. M. (2011). Board monitoring and earnings management pre-and post-IFRS. *The International Journal of Accounting*, 46(2), 205-230.
- Marzuqi, A. Y. (2010). Manajemen Laba dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (7) 1. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*.
- Mersni, H., & Othman, B. (2016). The impact of corporate governance mechanisms on earnings management in Islamic banks in the Middle East regio. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 7(4), 318-348.
- Muid, D. (2009). Faktor Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis* 6 (2).
- Mulford, C. W. (2005). *The financial numbers game: detecting creative accounting practices*. John Wiley & Sons.
- Nahar, & Erawati. (2017). Pengaruh NPM, FDR, Komite Audit, Pertumbuhan Usaha, Leverage dan Size terhadap Manajemen Laba. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 63–74.
- Nahar, & Erawati, T. (2017). Pengaruh NPM, FDR, Komite Audit, Pertumbuhan Usaha, Leverage dan Size terhadap Manajemen Laba. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 63–74.
- Nofrivul, d. (2017). Corporate Governance, Ownership Structure, Capital Structure and Firm Value Studies on The Indonesia Stock Exchange Issuer. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 12, Issue 2 (April)ISSN 2289-1552 2.

- Novitasari, d. (2019). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan kualitas Auditor terhadap Manajemen Laba Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *JEAM Vol. 18 No.2 e-ISSN : 2459-9816*.
- Novitasari, d. (2019). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kualitas Auditor Terhadap Manajemen Laba Pada Nank Umum Syariah di Indonesia. *JEAM Vol.18 No.2 September 2019 ISSN : 1412-5366 e-ISSN : 2459-9816*.
- Nugraheni, P. &. (2017). Mekanisme Corporate Governance dan Pengungkapan Isamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. *Iqtishadia*.
- Nurhayati, & dkk. (2017). Analisi Pengaruh Islamic Social Reporting, Ukuran, dan Jumlah Rapat PDS Terhadap Manajemene Laba Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal BanqueSyar'i Vol.3 No.1 Januari-Juni 2017*.
- Padmanty, S. (2011). Analisis Manajemen Laba Pada Laporan Keuangan Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat Indonesia). *Benefit: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 14(2)*, 46-70.
- Pambekti, G. T. (2017). Analisis Perbandingan Manajemen Laba dengan Metode Discretionary Accrual pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Vol. 3 No. 2, Juli 2017: 81-89*.
- Peasnell, K. P. (2000). Detecting earnings management using cross-sectional abnormal accruals models. . *Accounting and Business research, 30(4)*, 313-326.
- Peasnell, K. V. (2005). Board monitoring and earnings management: do outside directors influence abnormal accruals? *Journal of Business Finance & Accounting, 32 (7-8)*, 1311-1346.
- Priyatno, D. (2014). SPSS 22 : Pengolahan Data Terpraktis. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Pujiati, I. &. (2016). Perbedaan Manajemen Laba pada Bank Syariah dan bank konvensional yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Akademika, 14 (2)*.
- Puspaningtyas, Z. (2012). Relevansi Nilai Informasi Akuntansi dan Manfaatnya Bagi Investor. *Ekuitas : Jurnal Ekonomi dan Keuangan ISSSN 1411-0393*.

- Putra, R. (2019). Good Corporate Governance dan Manajemen Laba di Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Finance and Accounting*.
- Putra, R. N. (2019). Good Corporate Governnace dan Manajemen Laba di Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Finance and Accounting*.
- Quttainah, M. A. (2013). Do Islamic Bank Employ Less Earnings Management ? *Journal of International Financial Management & Accounting* 24 (3).
- Ramachandran, J. Z. (2015). Does Corporate Governance Influnce Earning Management ? Evidence From Singapore. *The Journal of Developing Areas*, , 49(3), 263–274. <https://doi.org/10.1353/jda.2015.0169>.
- Rokhlinasari, S. (2016). Perbankan Syariah dan Manajemen Laba. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 6.1.
- Sahami, & Praptitorini. (2015). Pengaruh Ukuran Komite Audit, Komite Audit Independensi dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Laba pada Perbankan Umum Syariah Indonesia Peiode 2010-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen da Akuntansi Terapan (JIMAT) Volume 6 Nomor 2 November 2015*.
- Santoso, V. (2018). Analisis Perbandingan Manajemen lana pada perbankan Syariah dan Perbankan konvensional di Indonesia. *Parsiomonia*.
- Scott, W. R. (2015). *Fianancial Accounting Theory* (seventh edition ed.). Canada, US: Pearson Canada Inc.
- Setiawan, D. (2018). Karakteristik dewan komisaris dan manajemen laba : Bukti pada peristiwa penawaran saham perdana. *Jurnal Siasat Bisnis*.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiawan, D. d. (2011). *Creative Accounting: Mengungkap Manajemen Lab a dan Skandal Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sulistyanto, S. (2008). *Manajemen Laba dan Model Empiris*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sulistyanto, S. (2012). *Manajemen Laba dan Model Empiris*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Sun, J. L. (2011). Does Female Directorship on Independent Audit Committees Constrains Earning Managemet ? *Journal of Business Ethics*, 99,, 369-382.
- Suryanto, T. (2014). Manajemen Laba Pada Bank Syariah di Indonesia : Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah. *Kinerja, Volume 18 No.1 Tahun 2014*, 90-100.
- Zainuldin, M. &. (2018). Earnings management in financial institutions: A comparative study of Islamic banks and conventional banks in emerging market. *Pacific-Basin Finance Journal* .
- Zarai, H. &. (2014). Corporate Governance Practices and Earnings Management in Islamic Banking Institutions. *Research Journal of Finance and Accounting ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.5, No.9, 2014*www.iiste.org.
- Zeptian, A. (2013). *Analisi Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada perbankan (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2010)*. Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Zeptian, A., & Rohman, A. (2013). Analisis Pengaruh Penerapan Cororate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pda Perbankan. *Diponegoro Journal of Accounting* (2) 4, 1-11.

LAMPPIRAN

LAMPIRAN I
Hasil Output SPSS versi 24.00

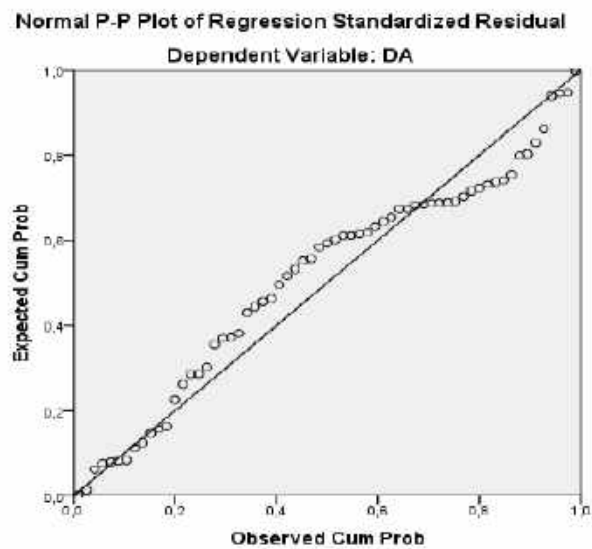
1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA	63	-,906925	,614627	-,11799308	,289348454
U-DK	63	2,00	6,00	3,9048	1,02728
P-KI	63	,40	1,00	,6695	,16515
KepIns	63	,846	1,000	,97768	,043109
KepMan	63	,000000000	,016430000	,0009478597	,0033312435 90
U-KA	63	2,00	7,00	3,9365	1,37809
U-DPS	63	2,00	3,00	2,3651	,48532
Valid N (listwise)	63				

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

P Plot Non Probability Plots



Uji Normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov* sebelum data di transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,28062199
Most Extreme Differences	Absolute	,112
	Positive	,108
	Negative	-,112
Test Statistic		,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		,048 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Uji Normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov* sesudah data di transformasi :

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		63
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,16263769
Most Extreme Differences	Absolute	,101
	Positive	,093
	Negative	-,101
Test Statistic		,101
Asymp. Sig. (2-tailed)		,181 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

b. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	,653	,151		4,320	,000		
	Ln-UDK	-,103	,118	-,156	-,870	,388	,509	1,966
	Ln_KI	-,022	,138	-,031	-,163	,871	,463	2,160
	Ln_KepInst	-,663	,630	-,179	-1,051	,298	,565	1,771
	Ln_Kepman	-5,635	7,547	-,109	-,747	,458	,761	1,314
	Ln_KA	,142	,083	,278	1,710	,093	,619	1,615
	Ln_DPS	-,126	,143	-,146	-,883	,381	,599	1,670

a. Dependent Variable: Ln-DA

c. Uji Autokorelasi

Uji Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,291 ^a	,085	-,013	,17113	1,620

a. Predictors: (Constant), Ln_DPS, Ln_KI, Ln_Kepman, Ln_KA, Ln_KepInst, Ln-UDK

b. Dependent Variable: Ln-DA

Uji Run

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,02145
Cases < Test Value	31
Cases >= Test Value	32
Total Cases	63
Number of Runs	27
Z	-1,396
Asymp. Sig. (2-tailed)	,163
a. Median	

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji korelasi Rank Spearman

Correlations

			Ln-UDK	Ln_KI	Ln_KepInst	Ln_Kepman	Ln_KA	Ln_DPS	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Ln-UDK	Correlation Coefficient	1,000	-,616**	-,269*	-,168	,322*	,345**	-,043
		Sig. (2-tailed)	.	,000	,033	,189	,010	,006	,735
		N	63	63	63	63	63	63	63
	Ln_KI	Correlation Coefficient	-,616**	1,000	,497**	,434**	-,193	,022	,034
		Sig. (2-tailed)	,000	.	,000	,000	,129	,862	,792
		N	63	63	63	63	63	63	63
	Ln_KepInst	Correlation Coefficient	-,269*	,497**	1,000	,835**	,396**	-,129	,140
		Sig. (2-tailed)	,033	,000	.	,000	,001	,315	,273
		N	63	63	63	63	63	63	63
	Ln_Kepman	Correlation Coefficient	-,168	,434**	,835**	1,000	,486**	-,024	,054
		Sig. (2-tailed)	,189	,000	,000	.	,000	,854	,676
		N	63	63	63	63	63	63	63
	Ln_KA	Correlation Coefficient	,322*	-,193	,396**	,486**	1,000	,121	-,051
		Sig. (2-tailed)	,010	,129	,001	,000	.	,347	,694
		N	63	63	63	63	63	63	63
	Ln_DPS	Correlation Coefficient	,345**	,022	-,129	-,024	,121	1,000	-,020

		Sig. (2-tailed)	,006	,862	,315	,854	,347	.	,877
		N	63	63	63	63	63	63	63
	Unstandardi	Correlation Coefficient	-,043	,034	,140	,054	-,051	-,020	1,000
	zed	Sig. (2-tailed)	,735	,792	,273	,676	,694	,877	.
	Residual	N	63	63	63	63	63	63	63
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).									

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,291 ^a	,085	-,013	,17113
a. Predictors: (Constant), Ln_DPS, Ln_KI, Ln_Kepman, Ln_KA, Ln_Keplnst, Ln-UDK				
b. Dependent Variable: Ln-DA				

b. Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,653	,151		4,320	,000
	Ln-UDK	-,103	,118	-,156	-,870	,388
	Ln_KI	-,022	,138	-,031	-,163	,871
	Ln_Keplnst	-,663	,630	-,179	-1,051	,298
	Ln_Kepman	-5,635	7,547	-,109	-,747	,458
	Ln_KA	,142	,083	,278	1,710	,093
	Ln_DPS	-,126	,143	-,146	-,883	,381
a. Dependent Variable: Ln-DA						

c. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,152	6	,025	,863	,528 ^b
	Residual	1,640	56	,029		
	Total	1,792	62			
a. Dependent Variable: Ln-DA						
b. Predictors: (Constant), Ln_DPS, Ln_KI, Ln_Kepman, Ln_KA, Ln_Keplnst, Ln-UDK						

d. Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,653	,151		4,320	,000
	Ln-UDK	-,103	,118	-,156	-,870	,388
	Ln_KI	-,022	,138	-,031	-,163	,871
	Ln_KepInst	-,663	,630	-,179	-1,051	,298
	Ln_Kepman	-5,635	7,547	-,109	-,747	,458
	Ln_KA	,142	,083	,278	1,710	,093
	Ln_DPS	-,126	,143	-,146	-,883	,381

a. Dependent Variable: Ln-DA

LAMPIRAN II

Data masukan untuk Variable View pada SPSS

NO	TAHUN	KODE BANK	DA	U-DK	PDKI	KepInst	KepMan	U-KA	U-DPS
1	2012	BCAS	-0,215058	3	0,67	1	0	3	2
2	2013		-0,269772	3	0,67	1	0	3	2
3	2014		-0,457196	3	0,67	1	0	3	2
4	2015		-0,426761	3	0,67	1	0	3	2
5	2016		-0,040955	3	0,67	1	0	3	2
6	2017		-0,033391	3	0,67	1	0	3	2
7	2018		-0,054362	3	0,67	1	0	3	2
8	2019		0,035870	3	0,67	1	0	4	2
9	2020		0,077199	4	0,75	1	0	3	2
10	2012	BMI	-0,495182	6	0,50	0,8456	0,000004335	3	3
11	2013		-0,204312	6	0,50	0,8881	0,000003139	3	3
12	2014		-0,040166	6	0,50	0,8881	0,000003139	3	3
13	2015		0,122072	6	0,50	0,8985	0	4	3
14	2016		0,020841	4	0,50	0,8984	0,000001510	4	3
15	2017		-0,118413	5	0,60	0,8881	0,000001510	3	3
16	2018		0,174880	5	0,60	0,8881	0,000001510	3	3
17	2019		0,070571	5	0,60	0,8881	0,000001510	3	3
18	2020		0,066557	5	0,60	0,8881	0,000001510	3	2
19	2012	BMS	-0,906925	3	1,00	1	0	3	3
20	2013		-0,482792	3	1,00	1	0	3	3

21	2014		0,446777	3	1,00	1	0	3	3
22	2015		0,443695	3	1,00	1	0	3	3
23	2016		-0,139452	3	1,00	1	0	3	3
24	2017		0,157651	3	1,00	1	0	3	2
25	2018		0,019557	3	1,00	1	0	3	2
26	2019		-0,047657	3	1,00	1	0	3	2
27	2020		0,427229	3	1,00	1	0	3	3
28	2012	BNIS	-0,514144	3	0,67	1	0	4	2
29	2013		-0,808898	3	0,67	1	0	4	2
30	2014		-0,601408	3	0,67	1	0	5	2
31	2015		-0,263054	3	1,00	1	0	5	2
32	2016		-0,185372	4	0,50	1	0	6	2
33	2017		-0,127523	4	0,75	1	0	4	2
34	2018		-0,115940	4	0,50	1	0	3	2
35	2019		-0,064742	4	0,50	1	0	6	2
36	2020		-0,052870	4	0,50	1	0	6	2
37	2012	BRIS	-0,400562	5	0,60	1	0	5	2
38	2013		-0,355000	5	0,60	1	0	4	2
39	2014		-0,153970	5	0,60	1	0	4	2
40	2015		0,010538	5	0,40	1	0	6	2
41	2016		-0,078959	5	0,60	1	0	5	2
42	2017		0,004323	4	0,75	1	0	5	2
43	2018		-0,077030	4	0,75	1	0	6	2
44	2019		-0,129297	4	0,50	0,9430	0	5	2
45	2020		-0,585451	2	0,50	0,8752	0,002190000	5	2

46	2012	BSB	-0,676255	3	0,67	0,9740	0,016430000	2	2
47	2013		-0,470712	3	0,67	0,9225	0,016430000	2	2
48	2014		0,614627	3	0,67	0,9847	0,009660000	2	2
49	2015		0,008765	4	0,50	0,9873	0,007730000	3	2
50	2016		-0,011715	4	0,50	0,9892	0,006840000	3	2
51	2017		0,227903	4	0,50	0,9916	0,000210000	3	2
52	2018		0,062483	4	0,50	0,9916	0,000207000	2	2
53	2019		-0,011076	3	0,67	0,9719	0	3	2
54	2020		0,155257	3	0,67	0,9916	0	3	2
55	2012		BSM	-0,415165	5	0,60	1	0	4
56	2013	-0,265323		5	0,60	1	0	5	3
57	2014	-0,012158		5	0,60	1	0	6	3
58	2015	-0,031376		5	0,60	1	0	7	3
59	2016	0,001869		5	0,60	1	0	6	3
60	2017	0,001622		4	0,75	1	0	7	3
61	2018	-0,068675		3	0,67	1	0	7	3
62	2019	-0,056722		3	0,67	1	0	4	3
63	2020	-0,118063		6	0,67	1	0	7	3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Sudirman No. 137 Kubusajo Batusangkar 27213
Telp. (0752) 71150, 574221, 574222 Fax (0752) 71879
<http://www.iainbatusangkar.ac.id> e-mail: info@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B- 122.b/In.27/D.1/PP.00.9/06/2021
Lampiran : 1 Rangkap
Hal : Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian

15 Juni 2021

Yth. Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan

السلام عليكم ورحمة ملا وبركاته

Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : FITRI YENI/1702042005
Tempat/tanggal Lahir : Simawang, 15 Maret 1994
Kartu Identitas : No. KTP 1304035503940002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Pintu Robang, Jorong Piliang Bendang, Kel. Simawang, Kec. Rambatan

Akan melakukan pengumpulan data untuk proses penulisan Tesis Magisternya sebagai berikut:

Judul : Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Lokasi : Bank Umum Syariah di Indonesia
Waktu : Juni 2021 s/d Juli 2021

Untuk itu diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi izin dalam rangka pelaksanaan penelitian mahasiswa bersangkutan.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n Direktur
Wakil Direktur,



Dr. H. M. Yusuf Salam, S.Ag., MA.

Telp: 051 890033



001862

TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN
KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Sudah terima dari : FITRI YENI
Uraian Dokumen : Penelitian
Jumlah : Satu I
Jenis Dokumen : Asli/Tambahan/Copy
Sifat Dokumen : Biasa/Rahasia
Ditujukan Kepada : OJK prov - sumba

Yang menerima, Pasang 22-6-2021

Wahyu Prawan Yang menyerahkan,

Fitri Yenni

No. Agenda Unit Kearsipan :
Diteruskan ke Unit Pengolah Tgl :
Yang Menerima : Yang Menyerahkan